

MMXXIV
RORENKEU



LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2024







LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2024



BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

 (021) 424-1646  Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan
Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  rorenkeu@pom.go.id  @birorenkeu.bpom



KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat menjalankan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2024 dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai media informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selama tahun 2024. Laporan ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab institusional kami, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan yang lebih baik di masa mendatang.

Laporan ini memuat rangkaian narasi kegiatan, data statistik, grafik, dan visualisasi lainnya yang menggambarkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM. Kami percaya bahwa capaian yang diraih tidak terlepas dari peran aktif dan sinergi seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta dukungan dan kerja sama yang erat dari unit kerja di seluruh Badan POM.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna menyempurnakan penyusunan laporan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 1 Maret 2025

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Antonius Tarigan
Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	xi
SOROTAN KEGIATAN	xii
BAB. I: PENDAHULUAN	1
1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI	1
1.1.1 VISI.....	1
1.1.2 MISI.....	2
1.1.3 BUDAYA ORGANISASI.....	2
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
1.2.1 TUGAS POKOK	4
1.2.2 FUNGSI.....	5
1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.2.4 TIM KERJA	7
BAB 2: PENGELOLAAN SUMBER DAYA	16
2.1. SUMBER DAYA MANUSIA.....	16
2.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024	16
2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	18
2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN.....	18
2.1.4. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA	20
2.1.5. KEBUTUHAN PEGAWAI.....	21
2.1.6. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM.....	23
2.2. SURAT MENYURAT	24
2.3. SARANA DAN PRASARANA	26
2.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	27

2.5. SASARAN MUTU.....	28
2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	31
BAB 3: HASIL KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2024	34
SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN BPOM DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	34
IKU 1: NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA BPOM	34
IKU 2: NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BPOM	57
IKU 3: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPOM.....	59
IKU 4: PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISUSUN DENGAN SAP	65
SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	72
IKU 5: INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	72
SASARAN KEGIATAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER SESUAI PEDOMAN	76
IKU 6: PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER TERHADAP PEDOMAN	76
SASARAN KEGIATAN 4: MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM	105
IKU 7: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR.....	105
IKU 8: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SETTAMA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR.....	122
SASARAN KEGIATAN 5: TERWUJUDNYA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG EFEKTIF	126
IKU 9: INDEKS REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	126
IKU 10: NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	134

SASARAN KEGIATAN 6: TERWUJUDNYA SDM BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BERKINERJA OPTIMAL	136
IKU 11: INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	136
SASARAN KEGIATAN 7: MENGUATNYA DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	138
IKU 12: INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BAIK.....	138
SASARAN KEGIATAN 8: TERKELOLANYA KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SECARA AKUNTABEL.....	140
IKU 13: TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	140
BAB 4: PENUTUP	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bangga Melayani Bangsa: Makna yang Dihidupkan Lewat BerAKHLAK.....	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Lama.....	5
Gambar 1. 3 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan 2025	6
Gambar 2. 1 Grafik PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	18
Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2024	19
Gambar 2. 3 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2024	20
Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2015-2024.....	21
Gambar 2. 5 Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2024	25
Gambar 2. 6 Perbandingan Jumlah Surat dari 2021-2024.....	25
Gambar 2. 7 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI DARI TAHUN 2019-2024.....	27
Gambar 3. 1 Pembukaan Rapat Kerja Nasional Tahun 2024 oleh Plt. Badan POM.....	139
Gambar 3. 2 Kegiatan Rapat Kerja Nasional BPOM Tahun 2024.....	36
Gambar 3. 3 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM	37
Gambar 3. 4 Jumpa Pakar dalam forum peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender bagi Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis	38
Gambar 3. 5 Penguatan Sensitivitas Gender bagi staf dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah.....	39
Gambar 3. 6 Kegiatan yang dipandu oleh Bapak Yulius Hendra (pakar gender dan Penasihat PATTIRO).....	40
Gambar 3. 7 Proses Pengambilan Video untuk Video Pembelajaran Pengarustamaan Gender	40
Gambar 3. 8 Pertemuan Daring bersama Pokja-Subpokja PUG serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi PUG	41
Gambar 3. 9 Data yang telah terintegrasi dengan Satu Data BPOM	43
Gambar 3. 10 Tabel-tabel di menu overview	43

Gambar 3. 11 Aliran Data API	44
Gambar 3. 12 Sub menu <i>role user</i>	44
Gambar 3. 13 sub menu role akses	44
Gambar 3. 14 sub menu log API	45
Gambar 3. 15 sub menu activity	45
Gambar 3. 16 Menu <i>Dashboard</i>	46
Gambar 3. 17 Menu Renstra	47
Gambar 3. 18 Menu Realisasi IKU	47
Gambar 3. 19 Menu verifikasi capaian data IKU	48
Gambar 3. 20 Menu Rekomendasi Tindak Lanjut	48
Gambar 3. 21 Menu Import RAPK	49
Gambar 3. 22 Menu Realisasi Anggaran	49
Gambar 3. 23 Menu Pohon Kinerja	50
Gambar 3. 24 Menu Kerangka Kerja Logis	50
Gambar 3. 25 Sub menu capaian kinerja	51
Gambar 3. 26 Sub Menu Laporan RTL	51
Gambar 3. 27 sub menu laporan tingkat efisiensi	52
Gambar 3. 28 menu e-Tiket	52
Gambar 3. 29 sub menu log API	53
Gambar 3. 30 sub menu manajemen akses & role	53
Gambar 3. 31 menu pemberitahuan	54
Gambar 3. 32 Kepala Badan POM membuka kegiatan REN Tahun 2024	55
Gambar 3. 33 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023	57
Gambar 3. 34 Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Monev Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2024 di Pimpin Plt. Kepala BPOM RI, Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS	58

Gambar 3. 35 Focus Group Discussion (FGD) pada 21–23 Mei 2024 di Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran.	60
Gambar 3. 36 Data Transaksi KKP Satjer BPOM s.d Mei 2024.....	62
Gambar 3. 37 Sosialisasi OMSPAN Atas IKPA Serta Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target Dan Realisasi Capaian Output Pada Aplikasi Sakti Tahun 2024.....	64
Gambar 3. 38 . Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan	65
Gambar 3. 39 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023 Unaudited.....	68
Gambar 3. 40 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2024.....	68
Gambar 3. 41 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III TA 2024 (secara daring)	69
Gambar 3. 42 LAPORAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2024	72
Gambar 3. 43 Grafik Perbandingan Hasil Penilaian Layanan antar Fungsi	73
Gambar 3. 44 Trend Hasil Survei IPP IPAK Bulan Januari – Desember 2024 Versi Baru	75
Gambar 3. 45 Tampilan login baru SIMETRIS	76
Gambar 3. 46 Tampilan <i>Dashboard</i> SIMETRIS	77
Gambar 3. 47 Tampilan Pusat Bantuan	78
Gambar 3. 48 Tampilan rewiu PK/RAPK.....	78
Gambar 3. 49 Tampilan Matriks A2	78
Gambar 3. 50 Kegiatan Bimtek penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) K/L 2020-2024.....	80
Gambar 3. 51 RKT SATKER	81
Gambar 3. 52 Perjanjian Kinerja (PK) Satker.....	81
Gambar 3. 53 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi e-planning SIMETRIS.....	82
Gambar 3. 54 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Reformasi Birokrasi.....	88

Gambar 3. 55 Laporan Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulanan	89
Gambar 3. 59 Buku petunjuk pelaksanaan anggaran ta 2024.....	94
Gambar 3. 60 Buku Petunjuk Teknis Kegiatan TA 2024	94
Gambar 3. 61 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2024	95
Gambar 3. 62 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM di Gorontalo, 28 Februari – 1 Maret 2024.....	96
Gambar 3. 63 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Samarinda, 22 – 25 Oktober 2024.....	96
Gambar 3. 64 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Loka POM di Banyumas, 6 – 8 November 2024.	96
Gambar 3. 65 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Loka POM Toba Samosir, 13 – 15 November 2024.....	97
Gambar 3. 66 Suasana Diskusi dan Tanya Jawab dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun 2023-2024 di Kota Batam, 29 Februari 2024.....	98
Gambar 3. 67 Suasana Diskusi dan Tanya Jawab dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun 2023-2024 di Kabupaten Bintan, 29 Februari 2024 ..	98
Gambar 3. 68 Kunjungan Kerja ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, 21 Maret 2024	99
Gambar 3. 69 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, 14 – 17 Juli 2023 & Kunjungan Kerja ke Pasar Cibinong, 21 Maret 2024.....	99
Gambar 3. 70 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 28 – 29 Maret 2023 & Kunjungan Kerja ke Pasar Depok Jaya, 21 Maret 2024	99
Gambar 3. 71 RDP dengan Komisi IX DPR RI, 28 Maret 2024	101
Gambar 3. 72 RDP dengan Komisi IX DPR RI, 10 September 2024	101
Gambar 3. 73 Rapat Koordinasi Penganggaran dengan lintas sektor, Jakarta 13 Agustus 2024.	102
Gambar 3. 74 Rapat Koordinasi Penganggaran dengan lintas sektor, Jakarta 11 September 2024.....	102

Gambar 3. 75 Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2024, Jakarta tanggal 22 Maret 2024	103
Gambar 3. 76 Pedoman KIE Tahun 2024	104
Gambar 3. 77 Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2024, Jakarta, 20 Februari 2024	104
Gambar 3. 78 Penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029.....	105
Gambar 3. 79 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2025.....	106
Gambar 3. 80 Buku Pencapaian 100 Hari Kerja Kepala BPOM RI.....	107
Gambar 3. 81 Kegiatan Penyusunan Juknis BOK POM TA 2025.....	109
Gambar 3. 82 Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK Nonfisik dengan UPT dan Dinas Kesehatan Kab/Kota	110
Gambar 3. 83 Pertemuan Moneyev Terpadu DAK Nonfisik BOK POM	111
Gambar 3. 84 Persentase Realisasi Anggaran dan Output DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2020-2024	111
Gambar 3. 85 Realisasi Anggaran DAK Nonfisik BOK POM per Kabupaten/Kota Tahun 2024	112
Gambar 3. 86 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM	113
Gambar 3. 87 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2025.....	114
Gambar 3. 88 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2024.....	114
Gambar 3. 89 Siklus Hibah	115
Gambar 3. 90 Proses Hibah Langsung.....	116
Gambar 3. 91 Monitoring dan Evaluasi Hibah.....	117
Gambar 3. 92 Buku Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2023	120
Gambar 3. 93 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2025	123
Gambar 3. 94 Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2024.....	124
Gambar 3. 95 Laporan Tahunan Biro PErencanaan dan Keuangan Tahun 2023	125

Gambar 3. 96 Secara Daring Ka. Biro Renkeu membuka RTM 2024 126

Gambar 3. 97 Kegiatan RTM 22 Juli 2024 di Hotel Lumire 128

Gambar 3. 98 Rapat penyusunan MPH Biro Perencanaan dan Keuangan di Bekasi, 13 Februari 2024 133

Gambar 3. 99 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025, Jakarta 31 Juli – 1 Agustus 2024 142

Gambar 3. 100 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025, Jakarta, 8 – 10 Oktober 2024 143

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 ANALISIS BEBAN KERJA DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2024.	22
Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024	24
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana pada tahun 2024.....	26
Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024.....	28
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	29
Tabel 2. 6 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024	31
Tabel 3. 1 Hasil Penilaian Layanan Setiap Fungsi	73
Tabel 3. 3 Jadwal Kegiatan Asistensi dan Supervisi Perencanaan	84
Tabel 3. 4 Pelaporan Penerimaan dan pengesahan Hibah langsung Uang, Barang dan Jasa Tahun 2024	118
Tabel 3. 5 Matriks Daftar Isu Internal dan Eksternal Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024.....	127

SOROTAN KEGIATAN

RAKERNAS 2024



Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM Tahun 2024 diselenggarakan pada 26–28 Maret di Semarang secara hybrid, diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan daerah. Mengangkat tema **“Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan: Mendukung Pertumbuhan Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antarunit, sekaligus forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan program prioritas pengawasan obat dan makanan tahun 2025.

Rakernas juga menjadi momen penting dalam konsolidasi peran BPOM terhadap Rancangan RPJMN 2025–2029 dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun Anggaran 2025. Melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, BPOM *memperkuat sinergi pengawasan nasional sekaligus mengukuhkan kontribusinya dalam agenda Prioritas Nasional, khususnya pembangunan SDM, kesehatan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan.*



REN 2024

Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) 2024 pada 3–4 Desember di Surabaya adalah forum evaluasi kinerja dan refleksi akhir atas pelaksanaan Renstra 2020–2024. Mengusung tema **“Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mewujudkan BPOM sebagai Organisasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Emas 2045”**, REN 2024 difokuskan pada evaluasi capaian Renja 2024 serta penyusunan strategi menuju Renstra 2025–2029.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, REN juga dirangkaikan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tindak lanjut atas hasil audit penerapan Sistem Mutu ISO 9001:2015. Dalam laporannya, Sekretaris Utama menekankan *pentingnya REN sebagai sarana konsolidasi organisasi dan evaluasi menyeluruh dalam memperkuat peran BPOM dalam perlindungan kesehatan masyarakat.*

Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025

Dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025, BPOM menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025 pada 31 Juli – 1 Agustus 2024 di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator aplikasi RKA-K/L dari seluruh unit pusat dan UPT BPOM. Pertemuan ini menjadi tahap awal penyusunan RKA-K/L, yang mencakup penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta data dukung lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah *untuk memastikan seluruh satuan kerja menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran serta PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan TA 2025*. Selain itu, dilakukan juga penelaahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review awal oleh APIP. Output dari kegiatan ini berupa data elektronik RKA-K/L dan data dukung Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar kelengkapan perencanaan anggaran BPOM secara nasional.



Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025



BPOM menggelar Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025 pada 8–10 Oktober 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satker pusat dan UPT BPOM untuk menindaklanjuti hasil penelaahan sebelumnya dan menyempurnakan dokumen perencanaan sesuai ketentuan PMK terbaru.

Fokus kegiatan meliputi finalisasi KAK, RAB, dan data dukung, serta Desk RKA-K/L bersama APIP BPOM. Hasil dari bimtek ini adalah dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran dan data dukung lengkap yang menjadi dasar penyusunan DIPA TA 2025 serta proses penerbitan SAPSK dan DIPA oleh Kementerian Keuangan.

Sosialisasi Penyusunan PK dan RAPK Tahun 2025

Sebagai bagian dari implementasi Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi PK (RAPK) Tahun 2025 pada 18 Desember 2024 secara hybrid di Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Kegiatan ini melibatkan seluruh satuan kerja BPOM dan bertujuan *untuk menyelaraskan dokumen PK dan RAPK dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.*

Penyusunan dilakukan melalui aplikasi Simetris e-Planning dengan pemetaan alokasi anggaran terhadap IKK, IKP, dan IKSS. Dalam kesempatan ini juga diluncurkan Aplikasi Simetris 2.1, yang hadir dengan fitur baru seperti Pusat Bantuan, tampilan dashboard yang diperbarui, serta menu Diagram Sasaran untuk mendukung perencanaan yang lebih komprehensif dan efisien.



Penelaahan Rancangan Renstra BPOM 2025–2029

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2025–2029, BPOM bersama Bappenas telah melaksanakan penelaahan pada 12 November 2024 guna memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJPN 2025–2045 dan rancangan RPJMN 2025–2029. Hasil pembahasan menghasilkan lembar catatan kesepakatan yang menjadi dasar perbaikan rancangan Renstra BPOM.

Penelaahan mencakup kesesuaian visi dan misi BPOM dengan visi Presiden, konsistensi kebijakan dan program dengan RPJMN, serta keterkaitan sasaran strategis hingga indikator kinerja (ISS, IKP, IKK) dengan target pembangunan nasional. Langkah ini *memperkuat posisi strategis BPOM dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah nasional secara terarah dan terukur.*



Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2023

- Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023 Unaudited dilaksanakan pada 30 Januari hingga 3 Februari 2024 di Hotel Double Tree Cikini, Jakarta. Kegiatan ini melibatkan tim dari pusat hingga daerah, termasuk Tim Penyusun Laporan Keuangan, Tim BMN, Tim Review Inspektorat Utama, dan petugas dari Satker maupun wilayah. Fokus utama kegiatan adalah konsolidasi 10 laporan keuangan Satker Pusat dan 18 laporan keuangan wilayah melalui verifikasi rekonsiliasi, klarifikasi peristiwa penting dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta identifikasi informasi relevan lainnya untuk dimasukkan dalam CaLK BPOM.
- Penyusunan laporan keuangan dilanjutkan untuk Semester I dan Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Semester I berlangsung secara hybrid pada 17–19 Juli 2024 di Hotel Grand Melia Jakarta dan melalui Zoom Meeting, dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM dan diisi paparan dari Inspektur Utama serta narasumber Kemenkeu. Sementara itu, kegiatan Triwulan III dilaksanakan daring penuh pada 16–18 Oktober 2024. Pada kedua kegiatan tersebut, kembali dibahas dan dikonsolidasikan laporan dari 10 Satker Pusat dan 18 wilayah guna memastikan keakuratan laporan keuangan BPOM secara keseluruhan.



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB. I:

PENDAHULUAN

Sebagai unit penunjang dukungan manajemen, Biro Perencanaan dan Keuangan menjalankan perannya dengan berpedoman pada misi Badan POM dalam menyusun perencanaan tahunan dan lima tahunan. Seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan diupayakan tertuang secara konsisten dalam dokumen perencanaan, lengkap dengan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaannya.

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan fasilitator, Biro Perencanaan dan Keuangan memastikan bahwa setiap sumber daya diarahkan pada program dan kegiatan yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi. Pemantauan dilakukan secara periodik melalui indikator *output* dan *outcome* yang terukur.

Dalam keterbatasan sumber daya yang ada, penetapan skala prioritas menjadi kunci. Kebijakan ini senantiasa mengacu pada kebutuhan organisasi serta arahan pimpinan agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dan berdaya guna.

1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan berperan strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:

1.1.1 VISI

*"Obat dan Makanan **aman, bermutu, dan berdaya saing** untuk mewujudkan Indonesia maju yang **berdaulat, mandiri, dan berkepribadian** berlandaskan gotong royong"*

1.1.2 MISI

- ✓ Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- ✓ Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- ✓ Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- ✓ Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

1.1.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi memegang peranan penting dalam membentuk karakter, etos kerja, serta arah kebijakan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Nilai-nilai luhur yang diyakini secara bersama menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjadi sumber semangat dalam mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi.

Budaya organisasi merupakan refleksi dari keyakinan serta perilaku yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh pegawai. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang secara konsisten inilah yang menjadi penggerak utama dalam berkarya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai wujud penguatan nilai ASN yang profesional dan berkarakter, Biro Perencanaan dan Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terangkum dalam budaya kerja **BerAKHLAK**, yang menjadi *Core Values* seluruh ASN Indonesia.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Core Values **BerAKHLAK** disusun untuk menyeragamkan interpretasi terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berbagai nilai yang sebelumnya tersebar di tiap instansi kini dirumuskan menjadi satu

kesatuan nilai yang dapat berlaku secara umum. **BerAKHLAK** merupakan akronim untuk enam *core values* diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan

- ✓ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- ✓ Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- ✓ Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- ✓ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- ✓ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- ✓ Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- ✓ Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- ✓ Membantu orang lain belajar.
- ✓ Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- ✓ Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- ✓ Suka menolong orang lain.
- ✓ Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- ✓ Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
- ✓ Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara.
- ✓ Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- ✓ Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- ✓ Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- ✓ Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- ✓ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- ✓ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- ✓ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai **BerAKHLAK**, Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen untuk menjadi teladan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan bangsa dan negara.



Gambar 1. 1 Bangga Melayani Bangsa: Makna yang Dihidupkan Lewat

Slogan “**Bangga Melayani Bangsa**” bukan sekadar ungkapan, melainkan bentuk kebanggaan dan panggilan moral setiap ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai **BerAKHLAK**. ASN Biro Perencanaan dan Keuangan tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi untuk mengabdikan, melayani dengan ketulusan, kebanggaan, dan dedikasi penuh kepada bangsa dan negara.

Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang menuntun ASN Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menjadikan pelayanan sebagai kehormatan, bukan beban. Karena sesungguhnya, **melayani adalah wujud cinta pada tanah air**.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 TUGAS POKOK

Berdasarkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan* pasal 12 bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas ***melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.***

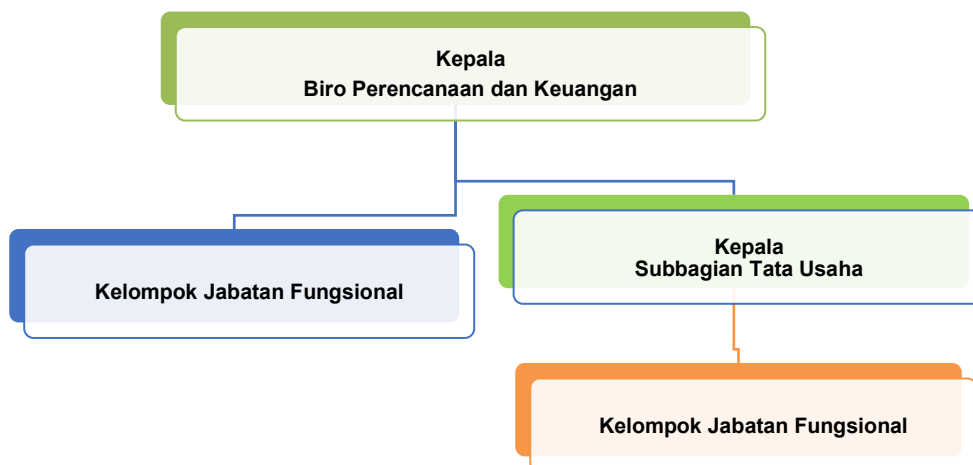
1.2.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 pasal 13, yaitu:

- a) penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM.
- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c) penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.
- d) penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM.
- e) penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022** tentang *Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*, struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi

Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, sistem kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyesuaikan dengan **Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023** tentang *Pedoman*

Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pedoman ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, struktur organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan disesuaikan menjadi penugasan terhadap delapan Tim Kerja dan satu Subbagian, yaitu:

1. Tim Kerja Perencanaan
2. Tim Kerja Penganggaran
3. Tim Kerja Urusan Daerah
4. Tim Kerja Hibah
5. Tim Kerja Pengarusutamaan Gender
6. Tim Kerja Keuangan
7. Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
8. Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
9. Subbagian Tata Usaha

Struktur organisasi penugasan tersebut ditujukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan secara lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi. Adapun Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Struktur Penugasan Biro Perencanaan dan Keuangan 2025

Sebagaimana bagan pada Gambar 1.2 pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh **Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan**, yang bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengawasan seluruh tim kerja di bawahnya. Kepala Biro menetapkan arah strategis, memberikan arahan teknis, serta memastikan integrasi kerja antarunit untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan fungsi teknis operasional didistribusikan kepada delapan tim kerja dan satu subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh ketua tim dan kepala subbagian.

Sebagaimana bagan pada Gambar 1.2 pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, yang bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengawasan seluruh tim kerja di bawahnya. Kepala Biro menetapkan arah strategis, memberikan arahan teknis, serta memastikan integrasi kerja antarunit untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara menyeluruh. Pelaksanaan fungsi teknis operasional didistribusikan kepada delapan tim kerja dan satu subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh ketua tim dan kepala subbagian.

1.2.4 TIM KERJA

Penjelasan tugas setiap tim kerja dijabarkan sebagai berikut:

1) Tim Kerja Perencanaan

Tim Kerja Perencanaan melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Lingkup pelaksanaan tugas dimaksud meliputi:

✓ **Penyusunan Perencanaan Strategis**

Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan analisis, dan penyerasian dokumen perencanaan strategis, yang mencakup Rencana Strategis (Renstra), Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan serta masukan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan jangka menengah nasional (RPJPN dan RPJMN)

✓ ***Penyusunan Perencanaan Tahunan***

Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan analisis, dan penyesuaian dokumen perencanaan kerja tahunan, yang meliputi Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

2) Tim Kerja Penganggaran

Tim Kerja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim Kerja Penganggaran menyelenggarakan fungsi berupa penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup pelaksanaan tugas dimaksud meliputi:

✓ ***Penyusunan Dokumen Penganggaran***

Menyusun Dokumen Penganggaran untuk tahun $n+1$. Dimulai dari penyusunan baseline kebutuhan anggaran tahun $n+1$, penyusunan usulan kebutuhan dan anggaran tahun $n+1$ dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) tahun $n+1$. Melakukan penelaahan dengan meneliti kesesuaian RKA-K/L dan data dukung dengan besaran alokasi pagu anggaran sehingga menghasilkan DIPA BPOM.

✓ ***Penyusunan Pedoman/Standar Penganggaran***

Menyusun Dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK), Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (Juklak) yang digunakan sebagai Pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Satker yang ada lingkungan BPOM.

✓ ***Penyusunan Target Penyusunan dan Penerimaan PNB***

Menyusun Target Perkiraan PNB yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan, membuat proyeksi setoran PNB sampai dengan akhir tahun berjalan dan menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan sehingga terbit SE Maksimum Pencairan PNB.

✓ ***Koordinasi Penganggaran dengan Instansi Eksternal***

Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi eksternal untuk melakukan pembahasan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan penyusunan bahan RDP dengan mitra kerja BPOM.

3) Tim Kerja Urusan Daerah

Tim Kerja Urusan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim Kerja Urusan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ ***Mengawal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Obat dan Makanan (BOK POM)***

Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Obat dan Makanan (BOK POM).

✓ ***Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM***

Menyusun Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM yang digunakan sebagai Pedoman/acuan dalam pengelolaan dana BOK POM bagi seluruh Pemerintah Daerah penerima dana BOK POM.

✓ ***Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Daerah***

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Tim Kerja Hibah

Tim Kerja Hibah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penyiapan bahan dan pengelolaan pinjaman serta hibah, baik dari dalam maupun luar negeri, di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Hibah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- ✓ ***Penyiapan Bahan Koordinasi***
Menyiapkan bahan untuk koordinasi internal dan eksternal terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang didanai melalui pinjaman dan hibah, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan prioritas BPOM.
- ✓ ***Pengelolaan Pinjaman dan Hibah***
Melaksanakan pengelolaan administrasi dan teknis atas pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ ***Koordinasi dengan Instansi Terkait***
Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan pinjaman dan hibah untuk mendukung program dan kegiatan BPOM.
- ✓ ***Pemantauan dan Evaluasi***
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang didanai melalui pinjaman dan hibah, serta menyusun laporan kinerja dan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

5) Tim Kerja Pengarusutamaan Gender

Merujuk pada **Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024** tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan* dan **Keputusan Kepala BPOM Nomor 180 Tahun 2024** tentang *Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan koordinator Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM.*

Untuk memperkuat kinerja tim teknis Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM tersebut, dibentuklah tim kerja dalam Biro Perencanaan dan Keuangan yakni Tim Kerja Pengarusutamaan Gender yang memiliki fungsi mengoordinasikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Tim Kerja Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- ✓ Mereviu dan menyusun kebijakan/program/kegiatan dalam rangka penguatan implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- ✓ Mengembangkan jejaring kerja dan koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender lintas sekto.
- ✓ Memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan sensitifitas gender.

6) Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ **Monitoring Kinerja**

Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPOM untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

✓ **Evaluasi Kinerja**

Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi.

✓ **Pelaporan Kinerja**

Menyusun laporan kinerja secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

7) Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan BPOM. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja PIPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ **Penyiapan Bahan Koordinasi dan Kebijakan PIPK**

Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan perumusan kebijakan terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan, termasuk penyusunan pedoman, strategi, dan rencana aksi guna mendukung pelaksanaan pengendalian intern yang efektif dan efisien.

✓ **Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Intern**

Melaksanakan kegiatan yang mendukung implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan, termasuk identifikasi risiko, penilaian pengendalian yang ada, dan pengembangan serta pelaksanaan rencana tindak pengendalian.

✓ ***Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern***

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta menyusun laporan sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar perbaikan berkelanjutan.

✓ ***Koordinasi dengan Instansi Terkait***

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan instansi eksternal dalam rangka sinergi pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Tim Kerja Keuangan

Tim Kerja Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ ***Pengelolaan Perbendaharaan***

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, termasuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ ***Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan***

Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja keuangan BPOM.

✓ ***Pemantauan dan Evaluasi Sistem Akuntansi***

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi instansi pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.

✓ ***Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)***

Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian.
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

BAB 2

PENGELOLAAN SUMBER DAYA



BAB 2:

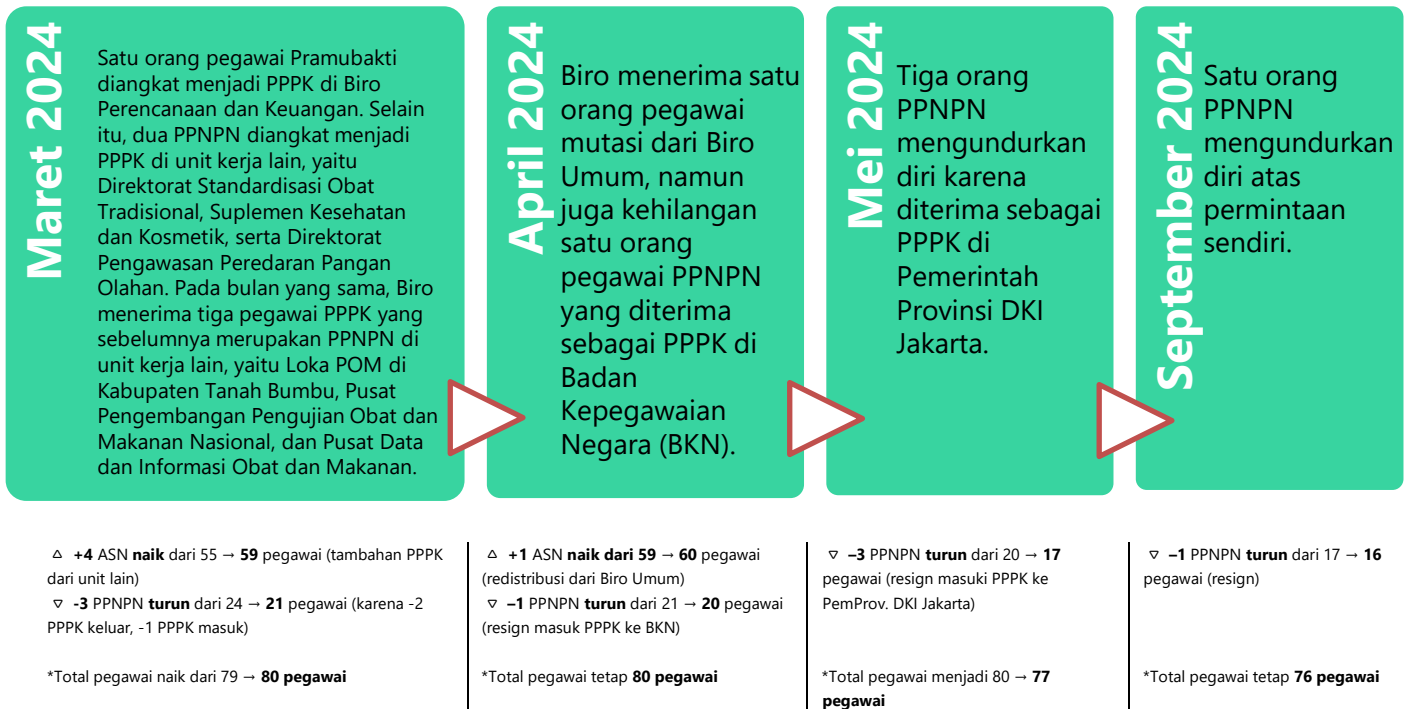
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh lima Ketua Tim Kerja Fungsi dan satu Kepala Subbagian Tata Usaha. Hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak 76 orang, terdiri atas 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 16 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sepanjang tahun 2024, terjadi beberapa dinamika dalam komposisi pegawai, antara lain:



✓ **Maret 2024**

Per Maret, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan sebanyak 80 orang, terdiri dari 59 ASN (49 PNS dan 10 PPPK) serta 21 PPNPN. Pada bulan ini terdapat penambahan 4 PPPK (1 PPNPN perubahan status menjadi PPPK dan 3 pindahan dari unit lain menjadi PPPK ke Biro). Hal ini mengurangi 3 PPNPN karena 1 pegawai naik PPPK ke internal dan 2 pegawai menjadi PPPK ke unit lain.

✓ **April 2024**

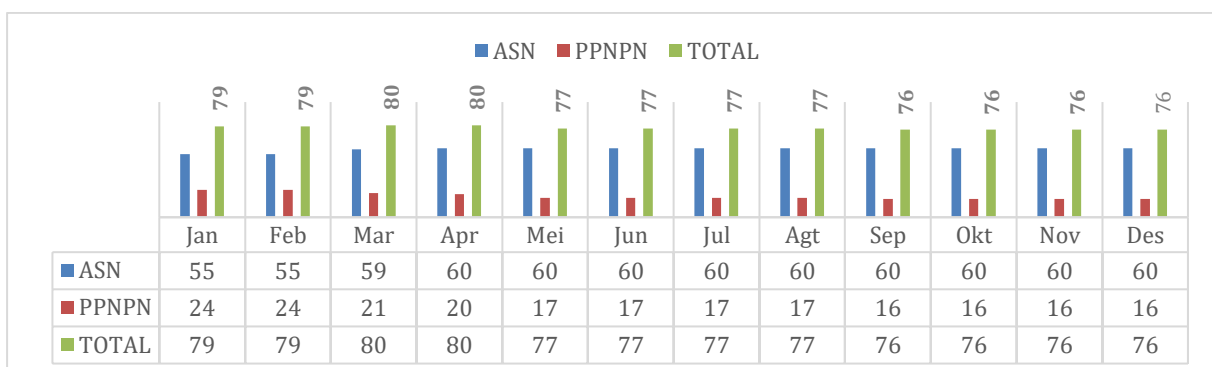
Per April, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tetap sebanyak 80 orang. Terdapat perubahan komposisi pegawai, yaitu penambahan 1 PNS redistribusi dari Biro Umum, serta pengurangan 1 PPNPN yang diterima sebagai PPPK di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, susunan pegawai bulan April terdiri atas 50 PNS, 10 PPPK, dan 20 PPNPN.

✓ **Mei 2024**

Pada bulan Mei, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan berkurang menjadi 77 orang. Hal ini disebabkan oleh pengunduran diri tiga orang PPNPN yang diterima sebagai pegawai PPPK di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan perubahan ini, komposisi pegawai bulan Mei terdiri dari 50 PNS, 10 PPPK dan 17 PPNPN.

✓ **September 2024**

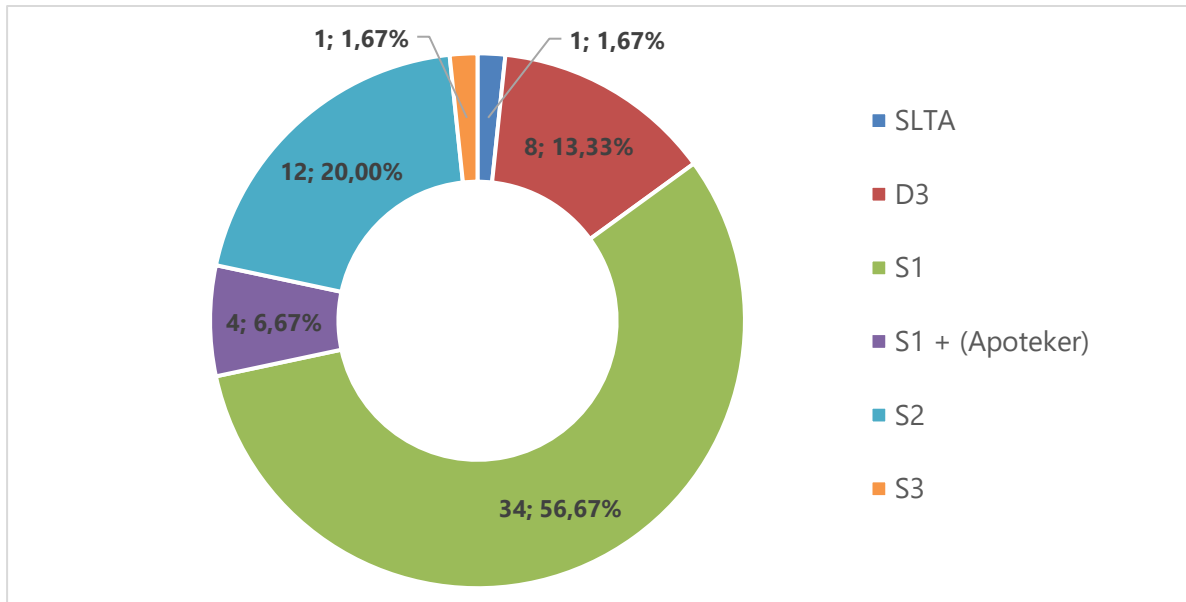
Pada bulan September, Satu orang PPNPN mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Dengan demikian, susunan pegawai bulan September terdiri atas 50 PNS, 10 PPPK dan 16 PPNPN. Sehingga jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tersisa 76 orang.



Dengan demikian hingga tahun 2024, total pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berjumlah **76 orang**, terdiri dari **60 ASN (PNS dan PPPK)** dan **16 PPNPN**.

2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2. 1 Grafik PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024, populasi terbesar pada tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan **Sarjana (S1)** sejumlah **34 pegawai** dengan persentase **56,67%** dari total pegawai.

2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

Berdasarkan data kepegawaian, hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak 60 (enam puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, 2 (dua) orang menduduki jabatan struktural, sedangkan sisanya menduduki jabatan fungsional, baik sebagai pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum.

Pada bulan Maret 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh tambahan sumber daya manusia melalui pengangkatan 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keempat pegawai tersebut mengisi formasi jabatan

fungsional, terdiri dari 2 (dua) orang Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Pertama, dan 1 (satu) orang Pranata Komputer Terampil.

Selanjutnya, pada bulan April 2024, terdapat mutasi internal antarunit kerja yang menambah jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, dengan jabatan Perencana Ahli Pertama, yang sebelumnya bertugas di Biro Umum.

Selain itu, pada tahun yang sama, terdapat 1 (satu) orang pegawai dengan jabatan Perencana Ahli Pertama yang mendapat penugasan untuk mengikuti program Tugas Belajar, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai.

Perubahan komposisi kepegawaian ini menunjukkan dinamika dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

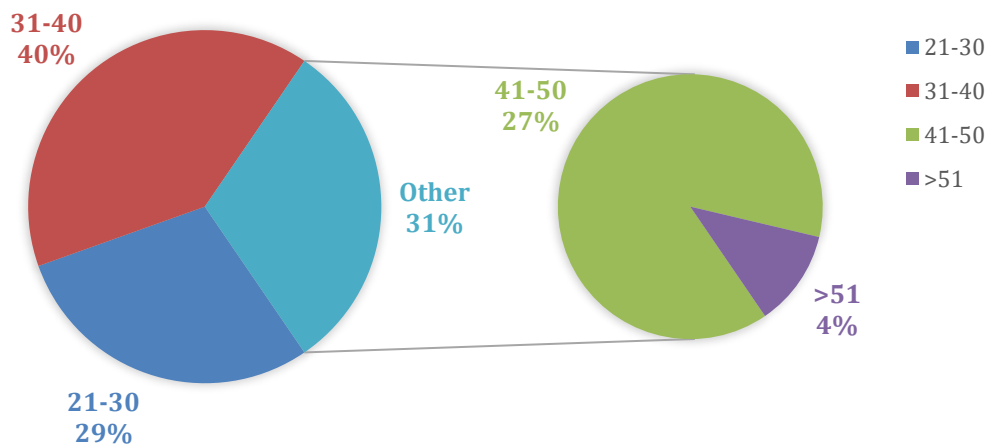


Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Grafik pada Gambar 2.2 menyajikan gambaran komposisi pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 berdasarkan jenis jabatan yang diemban. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati jabatan fungsional tertentu, dengan dominasi pada jabatan **Analisis Kebijakan Madya** sebanyak **9 orang** (15% dari total pegawai), diikuti oleh **Analisis Anggaran Ahli Muda** sebanyak **7 orang**, serta **Perencana Ahli Pertama** dan **Analisis Anggaran Ahli Pertama** masing-masing sebanyak **5 orang**. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural relatif kecil, mencerminkan struktur organisasi yang lebih menekankan pada peran fungsional. Selain itu, adanya pegawai yang mengikuti tugas belajar serta penambahan personel baru, termasuk melalui pengangkatan PPPK, menjadi indikator dinamika dan penguatan kapasitas SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan.

2.1.4. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan **termuda** berusia **24 tahun** dan **tertua (55 tahun)** dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini:

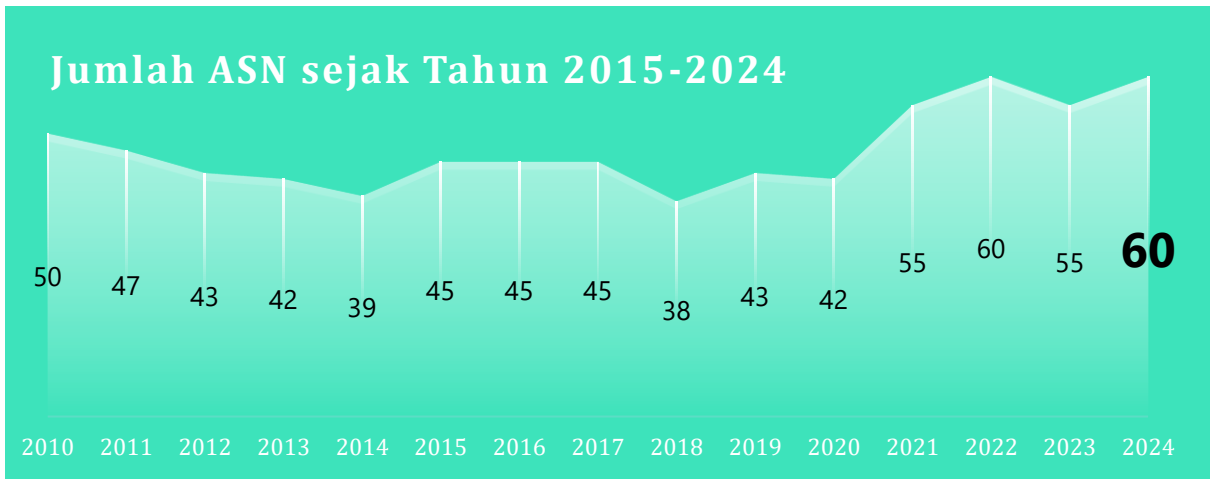


Gambar 2. 3 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2024

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, populasi terbesar PNS Biro Perencanaan dan Keuangan adalah usia **31-40 tahun** yaitu sebesar **35%**, diikuti oleh kelompok usia **41-50 tahun** ke atas yaitu sebesar **33,33%**.

2.1.5. KEBUTUHAN PEGAWAI

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan mendapatkan tambahan 5 (lima) orang pegawai yang terdiri dari 4 (empat) orang pegawai PPPK dan pindahan 1 (satu) orang pegawai PNS dari Biro Umum sehingga sampai akhir tahun 2024 total pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berjumlah 60 (enam puluh) pegawai ASN.



Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 2.4, selama lima tahun terakhir (2020–2024), jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami peningkatan bersih sebesar **42,86%**, dari 42 orang pada tahun 2020 menjadi 60 orang pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi di tengah periode, tren secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah pegawai.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2024, kebutuhan SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 ANALISIS BEBAN KERJA DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2024

No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	GAP
1	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	6	2	4
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	9	4	5
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	9	3	6
6	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	11	7	4
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	3	1	2
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	4	3	1
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5	6	-1
11	Arsiparis Terampil	4	2	2
12	Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0
13	Perencana Ahli Madya	7	2	5
14	Perencana Ahli Muda	10	5	5
15	Perencana Ahli Pertama	17	10	7
16	Pranata Keuangan APBN Mahir	3	1	2
17	Pranata Keuangan APBN Penyelia	3	2	1
18	Pranata Keuangan APBN Terampil	3	4	-1
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2	0
20	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
21	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	0	5
22	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
23	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
24	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
25	Arsiparis Mahir	2	0	2
26	Arsiparis Penyelia	1	0	1
27	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	0
28	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
TOTAL		114	60	54

Sepanjang tahun 2024, dinamika kepegawaian di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami perubahan yang cukup signifikan, seiring dengan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada bulan Maret 2024, terjadi

pergeseran sumber daya manusia dengan keluarnya 3 (tiga) pegawai PPNP dan masuknya 4 (empat) orang pegawai PPPK. Selanjutnya, pada April 2024, biro menerima 1 (satu) pegawai pindahan dari Biro Umum berstatus CPNS, sementara 1 (satu) pegawai PPNP mengakhiri masa tugasnya karena diterima sebagai PPPK di instansi lain. Pada bulan Mei, 3 (tiga) pegawai PPNP kembali dilepas setelah dinyatakan lulus seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, pada bulan September 1 (satu) pegawai PPNP mengundurkan diri atas permintaan pribadi.

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak **76 orang**, terdiri atas **60 pegawai PNS dan PPPK**, serta **16 pegawai PPNP**.

2.1.6. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka menjawab tantangan pelaksanaan program dan tanggung jawab yang semakin besar, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pelatihan kompetensi. Perencanaan ini didasarkan pada kebutuhan aktual organisasi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini.

Sebagian besar tugas strategis seperti perencanaan jangka panjang, pengembangan organisasi dan tatalaksana kerja, penyempurnaan sistem sampling, integrasi pengelolaan data, serta sistem pelaporan terpadu membutuhkan kemampuan analitis yang tinggi. Oleh karena itu, selain memerlukan penambahan jumlah pegawai, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial menjadi kebutuhan mendesak yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan kompetensi yang berlaku.

Pada tahun 2024, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan berkelanjutan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pegawai, yaitu Okto Dasa Matra Suharjo, S.T., yang sedang menjalani Tugas Belajar melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pegawai tersebut menempuh Program Studi *Master's in Applied Geographic Information Systems* di National University of Singapore.

Di samping itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan juga dilakukan secara mandiri oleh seluruh pegawai melalui platform IDEAS yang disediakan oleh

Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan data dari aplikasi SIASN tahun 2024, tercatat terdapat **630 jenis pelatihan** yang telah diikuti oleh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, Pengembangan Kompetensi yang diajukan pada SIASN menu *Perencanaan Pengembangan Kompetensi* tahun 2024 terealisasi sebagaimana terlihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

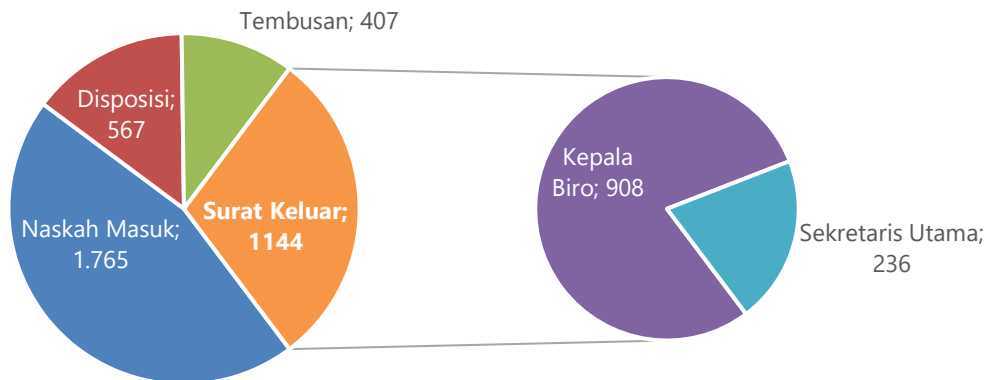
Detail Pengembangan Kompetensi														
No	Status	Nama Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Indikator Kinerja Organisasi yang didukung Pencapaiannya	Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM yang didukung Implementasinya	Jenis Pengembangan Kompetensi	Kompetensi yang akan dikembangkan	Garis Besar materi Pengembangan kompetensi	Target jumlah dan syarat peserta	Waktu dan tanggal pelaksanaan Kegiatan	Rencana widyaiswara/narasumber/fasilitator kegiatan	Rencana anggaran biaya dan Sumber anggarannya	Level Evaluasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Unit sebagai penyelenggara	Status Verifikasi
1	Terlaksana	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Detail Permohonan Sertifikat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	Peningkatan kompetensi SDM pengelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.	Bimbingan Teknis / Penataran File Kurikulum	Teknis >> Lainnya (Lainnya)	1. Perencanaan Strategis: a. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi b. Menetapkan tujuan dan strategi c. Evaluasi rencana strategi 2. Perencanaan Tahunan: a. Penyusunan perencanaan dan anggaran b. Analisis Risiko Perencanaan c. Monitoring dan evaluasi kinerja	20 Pejabat Fungsional Perencana di Biro Perencanaan dan Keuangan	20 Juni 2024 s.d 21 Juni 2024	1. Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp. 410.000.000, Biro Perencanaan dan Keuangan	Level 3	Penyelenggara	Disetujui
Total Perencanaan								410.000.000						

2.2. SURAT MENYURAT

Sepanjang tahun 2024, seluruh proses penerimaan surat masuk di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan secara digital melalui Aplikasi Srikandi. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak **3.883 naskah** berhasil diterima dan dikelola, yang terdiri atas **1.765 naskah masuk**, **567 disposisi**, dan **407 tembusan**.

Sementara itu, pengelolaan surat keluar juga telah sepenuhnya terdigitalisasi. Sepanjang tahun 2024, jumlah **surat keluar** tercatat sebanyak **1.144 dokumen**, dengan rincian **908 dokumen ditandatangani oleh Kepala Biro** dan **236 dokumen ditandatangani oleh Sekretaris Utama**.

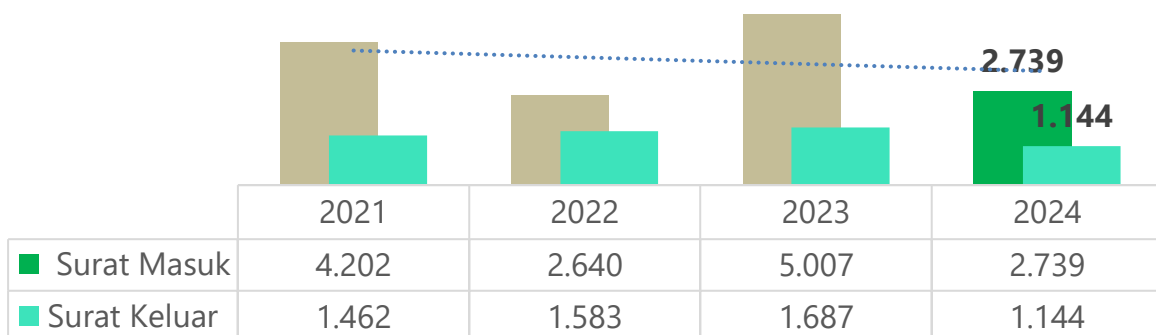
Rekapitulasi Surat Masuk vs Surat Keluar



Gambar 2. 5 Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2024

Transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi Srikandi ini menjadi bagian dari komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan ramah lingkungan.

Tahun	Naskah Masuk	Disposisi	Tembusan	Total Surat Masuk	Total Surat Keluar
2021	1.753	1.555	894	4.202	1.462
2022	1.537	863	240	2.640	1.583
2023	2.983	1.321	703	5.007	1.687
2024	1.765	567	407	2.739	1.144



Gambar 2. 6 Perbandingan Jumlah Surat dari 2021-2024

Sepanjang periode 2021–2024, volume surat di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami dinamika signifikan. Jumlah surat masuk mencapai puncaknya pada 2023 sebanyak 5.007 dokumen, kemudian menurun drastis sebesar **45,3%** pada 2024 menjadi 2.739 dokumen.

Sementara itu, surat keluar relatif stabil pada 2021–2023 dengan rata-rata di atas 1.500 dokumen per tahun, namun mengalami penurunan sebesar **32,2%** pada 2024 menjadi 1.144 dokumen. Penurunan ini mencerminkan efisiensi yang diperoleh melalui digitalisasi proses persuratan menggunakan **Aplikasi Srikandi**, serta peningkatan kualitas komunikasi dan penyederhanaan proses administrasi yang lebih efektif dan terarah.

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Adapun Sarana dan Prasarana pada tahun 2024 di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan pengadaan BMN yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana pada tahun 2024

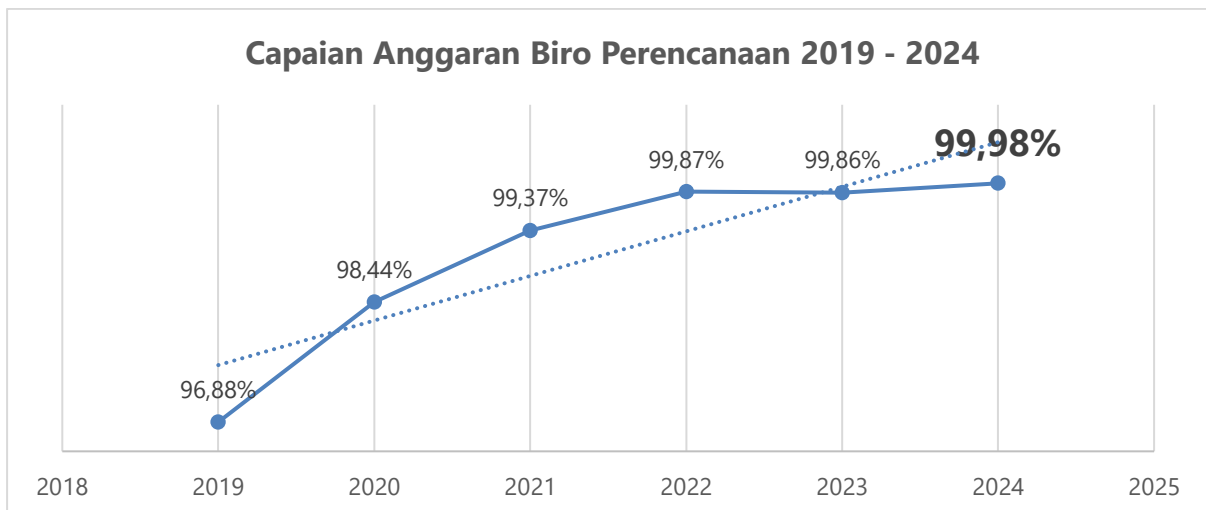
No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Tim Kerja
1	Notebook	Asus Expertbook 1TB	2024	3.10.01.02.003	690	Vini Anggraini, A.Md	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
2	P.C Unit	Axioo My PC one P7Z	2024	3.10.01.02.001	1151	Ali Muharam, SIP, MSE, MA	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3	Notebook	Asus ExpertBook	2024	3.10.01.02.003	691	Ani Susanti, S.Farm, Apt	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
4	Notebook	Asus ExpertBook	2024	3.10.01.02.003	692	Awali Romadhon, S.Ak.	Urusan Daerah dan Hibah
5	Notebook	Asus ExpertBook	2024	3.10.01.02.003	693	Rita Alita Mardani, SE	Urusan Daerah dan Hibah
6	Notebook	Asus ExpertBook	2024	3.10.01.02.003	695	Sutan Sahala Parulian, SE	Penganggaran
7	Notebook	Asus ExpertBook	2024	3.10.01.02.003	694	Putra Perkasa	Tata Usaha
8	Video conference	Video conference	2024	3.06.01.02.132	8	Kevin Djap, S.M	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

9	Tripod	Takara Rover 66	2024	3.06.01.02.045	22	Kevin Djap, S.M	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
10	Printer	Epson workforce WF-100	2024	3.10.02.03.003	951	Arum Lathifah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
11	Printer	Epson workforce WF-100	2024	3.10.02.03.003	952	Vini Anggraini, A.Md	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
12	Lemari es	Kulkas 2 Pintu LG	2024	3.05.02.04.001	128	Fungsi Tata Usaha	Tata Usaha

2.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, pagu anggaran yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar **Rp20.161.517.000**, yang terdiri dari Belanja Barang sebesar **Rp19.691.517.000** dan Belanja Modal sebesar **Rp470.000.000**.

Realisasi anggaran hingga **31 Desember 2024** mencapai **Rp20.156.986.380**, atau **99,98%** dari total pagu. Meskipun nilai penyerapan ini sedikit lebih rendah secara nominal dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar Rp20.946.341.879, namun secara persentase menunjukkan **peningkatan dari 99,86%** pada tahun 2023 **menjadi 99,98%** pada tahun 2024, atau **naik sebesar 0,12 poin persentase**.



Gambar 2. 7 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI DARI TAHUN 2019-2024

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.6 capaian anggaran Biro Perencanaan tahun 2019–2024, terlihat tren yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 96,88%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 98,44% pada tahun 2020. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2021 (99,37%) dan 2022 (99,87%). Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 (99,86%), capaian kembali naik pada tahun 2024 mencapai 99,98%.

Secara keseluruhan, grafik mencerminkan bahwa dalam lima tahun terakhir Biro Perencanaan berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan, dengan tingkat serapan yang sangat mendekati sempurna, menunjukkan kinerja yang efisien dan terukur.

Adapun realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan per kegiatan Tahun Anggaran 2024 capaiannya sebesar **99,98% cut-off** tanggal **31 Desember 2024**. Adapun detail realisasi tersebut dapat dilihat melalui matriks di bawah ini:

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024

No	Nama Program/ Kegiatan/ Rincian Output/SubOutput	Satuan	Volume Output			Anggaran (dalam Ribu)		
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian
			2024	TW IV	2024	2024	TW IV	2024
	3159-Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan Penyusunan Dokumen Anggaran Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan					20.161.517.000	20.156.986.350	99,98%
A	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	100%	2.075.649.000	2.074.807.324	99,96%
1	960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100%	2.075.649.000	2.074.807.324	99,96%
B	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	dok	45	45	100%	18.085.868.000	18.082.179.026	99,98%
2	952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	dok	18	18	100%	10.033.185.000	10.031.412.010	99,98%
3	953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	dok	18	18	100%	3.577.575.000	3.576.046.532	99,96%
4	955.Layanan Manajemen Keuangan	dok	9	9	100%	4.475.108.000	4.474.720.484	99,99%

2.5. SASARAN MUTU

Sasaran Mutu merupakan target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran pencapaian mutu layanan di suatu instansi dalam periode tertentu. Pada Tahun Anggaran 2024, Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro

Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPOM pada tanggal 22 Desember 2023.

Namun, seiring dengan terjadinya perubahan struktur organisasi di akhir tahun 2024, termasuk peralihan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk posisi Sekretaris Utama, maka dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dimaksud. Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan tersebut ditetapkan kembali oleh Sekretaris Utama yang baru pada tanggal 5 November 2024.

Adapun ketentuan terbaru mengenai Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Mutu	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	62.25
		2 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93.23
		3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96.15
		4 Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,85
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker sesuai pedoman	1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	92

4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100
		2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91.9
		2	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5
6	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88.7
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	3
8	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100

2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

Berikut pencapaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024:

Tabel 2. 6 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	62.25	61	97.99%	Cukup
2	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93.23	80.08	85.90%	Cukup
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96.15	98.27	102.20%	Sangat Baik
4	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100	100	100%	Baik
5	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3.85	3.69	96%	Cukup
6	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	92	92	100%	Baik
7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100%	Baik
8	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100%	Baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
9	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91.9	88.23	96%	Cukup
10	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	98.46	101%	Sangat Baik
11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88.7	84.74	95.54%	Cukup
12	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	3	2.75	92%	Cukup
13	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100%	Baik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 13 indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024, diperoleh hasil bahwa sebanyak **2 indikator** berada dalam kategori **Sangat Baik**, **5 indikator** dengan kategori **Baik**, dan **6 indikator** termasuk dalam kategori **Cukup**. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, serta mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan akuntabel.

Keterangan:

Kategori Capaian Periode **Januari - Agustus 2023**

Warna	Keterangan
○	Belum Ada Capaian
●	Tidak Memenuhi Ekspektasi (Capaian < 80%)
●	Belum Memenuhi Ekspektasi (80% ≤ Capaian < 100%)
●	Memenuhi Ekspektasi (100% ≤ Capaian < 120%)
●	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

Kategori Capaian Periode **September - Desember 2023**

Warna	Keterangan
○	Belum Ada Capaian
●	Kurang (Capaian < 70%)
●	Cukup (70% ≤ Capaian < 100%)
●	Baik (Capaian = 100%)
●	Sangat Baik (100% > Capaian ≤ 120%)
●	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

BAB 3

HASIL KEGIATAN



BAB 3:

HASIL KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2024

Pencapaian 8 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh kedelapan Tim Kerja dan 1 Sub Bagian diantaranya, Tim Kerja Perencanaan, Tim Kerja Penganggaran, Tim Kerja Urusan Daerah, Tim Kerja Hibah, Tim Kerja Pengarusutamaan Gender, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja, Subbagian Tata Usaha juga kegiatan yang disusun dengan melibatkan lintas sektor/supra sistem.

SASARAN KEGIATAN 1:

MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN BPOM DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 1: NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 1 adalah:

A. RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2024

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2024 merupakan forum koordinasi yang dilaksanakan antara BPOM bersama lintas sektor yang membahas perencanaan Pengawasan Obat dan Makanan, serta sinkronisasi perencanaan antar Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pelaksanaan Rakernas BPOM 2024 merupakan momentum dalam konsolidasi dalam proses perencanaan kontribusi BPOM dalam Rancangan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2025-2029.



Gambar 3. 1 Pembukaan Rapat Kerja Nasional Tahun 2024 oleh Plt. Badan POM

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 26-28 Maret 2024 bertempat di Hotel Gumaya, Semarang. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Kepala Badan POM dan diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. Tema utama Rakernas Badan POM 2024 adalah "Penguatan Pengawasan Obat dan

Makanan: Mendukung Pertumbuhan Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Rangkaian kegiatan Rakernas diawali dengan diskusi Panel dari Pihak Eksternal dengan tema pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB. Selain itu dari Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan juga memberikan pemaparan mengenai Postur Anggaran K/L Tahun 2025 serta Sinkronisasi Program Pengawasan Obat dan Makanan Daerah pada RPJMD oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan mengenai Distribusi Obat Program dan Vaksin disampaikan oleh Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan, serta Pengelolaan Masalah Gizi: Sinergi Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Asupan GGL oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan.



Gambar 3. 2 Kegiatan Rapat Kerja Nasional BPOM Tahun 2024

Tujuan penyelenggaraan Rakernas adalah melakukan konsolidasi Rancangan Teknokratik RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029, serta menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun Anggaran 2025, dimana seluruh unit kerja berdiskusi untuk memberikan masukan terhadap Arah Kebijakan dan Program Prioritas BPOM 2024 serta Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Unit Eselon I dan II untuk mencapai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dukungan Badan POM terhadap RKP 2025 termasuk dalam Kegiatan Prioritas Nasional keempat yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

B. FORUM DISKUSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) BPOM

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, soliditas, serta profesionalitas JFP BPOM telah dilaksanakan Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM pada tanggal 20 – 21 Juni 2024 yang diselenggarakan di Hotel Raja Mandalika, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB. Forum diskusi JFP yang mengusung tema “Peran Strategis Perencana sebagai *Think Tank* Pengawasan Obat dan Makanan”, diikuti sebanyak 75 orang Perencana dan Calon Perencana, baik dari Unit Pusat maupun UPT BPOM. Hasil yang diharapkan dari forum ini adalah peserta mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai Perencana sesuai pedoman dan memberikan kontribusi aktif dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.



Pertemuan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Ibu Dr. Dra Lucia Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm., MARS selaku Plt. Kepala BPOM. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan narasumber dari Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) - Bappenas, Departemen MKP Fisipol UGM dan Sharing

Session bersama Ibu Dr. Penny K Lukito dan Coach Harri Firmansyah dengan agenda: *Re- Integrating Values & Strengthening Culture.*



Gambar 3. 3 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM

Di dalam forum diskusi disampaikan mengenai tugas dan beban kerja Jabatan Fungsional Perencana dimana tugas JFP Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Namun saat ini, beban kerja JFP perencana masih sangat banyak di luar ranah perencana sehingga tidak dapat fokus pada tugas perencanaan. Upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, diantaranya yaitu menyusun Pedoman Teknis Kinerja JFP sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja JFP, menyusun analisis beban kerja (ABK) pegawai JFP, dan menyusun rencana peningkatan kompetensi bersama PPSDM.

Selain itu, pada forum diskusi ini peserta dibina dalam hal teknis pembuatan *Policy Brief dan Policy Paper* dalam rangka meningkatkan kompetensi JFP Perencana dalam menganalisis isu kebijakan, pengambilan keputusan, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan.

C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA TAHUN 2024

Terbagi dalam 5 kategori, diantaranya:

1. Jumpa Pakar: Menakar Kesenjangan dalam Pengawasan Obat dan Makanan



Jumpa Pakar merupakan forum peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender bagi Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis bersama dengan pakar gender yakni Bapak Yulius Hendra (pakar gender dan Penasihat PATTIRO). Untuk tahun 2024, jumpa pakar diselenggarakan dalam tiga *batch*. Batch Kesatu dilaksanakan pada 22-23 Februari 2024 dihadiri oleh 33 orang Kepala UPT, Batch Kedua dilaksanakan pada 21-22 Maret 2024 dihadiri oleh 13 orang Pimpinan Tinggi Pratama, sedangkan *Batch* Ketiga dilaksanakan pada 7-8 Mei 2024 dihadiri 56 orang Kepala UPT dan Pimpinan Tinggi Pratama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, sensitivitas, dan kepedulian terhadap isu gender, sekaligus memperdalam pemahaman peserta terhadap analisis gender serta mendorong inisiatif masing-masing pimpinan Unit Kerja.



Gambar 3. 4 Jumpa Pakar dalam forum peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender bagi Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis

2. Penguatan Sensitivitas Gender Satuan Kerja

Untuk lebih memperkuat pemahaman dan kepedulian terhadap isu gender bagi pegawai, diselenggarakanlah Penguatan Sensitivitas Gender bagi staf dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di wilayah sekitar Kota Semarang dan Kota Banjarmasin. Batch Kesatu dilaksanakan di BBPOM Semarang pada 5-6 Maret 2024 dengan jumlah peserta sejumlah 28 orang dan Batch Kedua dilaksanakan di BBPOM Banjarmasin pada 14-15 Mei 2024 dengan jumlah peserta sejumlah 56 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, sensitivitas, dan kepedulian terhadap isu gender, sekaligus memperdalam pemahaman peserta terhadap analisis gender. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain pemutaran video.



Gambar 3. 5 Penguatan Sensitivitas Gender bagi staf dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah

3. Konsolidasi Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Rincian Output yang ditagging ARG TA 2025

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan tahunan, penganggaran tahun sebelumnya, serta pelaksanaan dan pemantauan pada tahun berjalan. Pada 17 September 2024, sebanyak 37 Aparatur Sipil Negara dari 15-unit kerja mengikuti kegiatan yang dipandu oleh Bapak Yulius Hendra (pakar gender dan Penasihat PATTIRO). Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender, eksplorasi isu gender, serta Gender Action Budget. Peserta kemudian menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Action Budget yang selanjutnya direviu oleh pakar untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan prinsip Pengarusutamaan Gender.



Gambar 3. 6 Kegiatan yang dipandu oleh Bapak Yulius Hendra (pakar gender dan Penasihat PATTIRO)

4. Penyusunan Video Pembelajaran Pengarusutamaan Gender bidang Pengawasan Obat dan Makanan

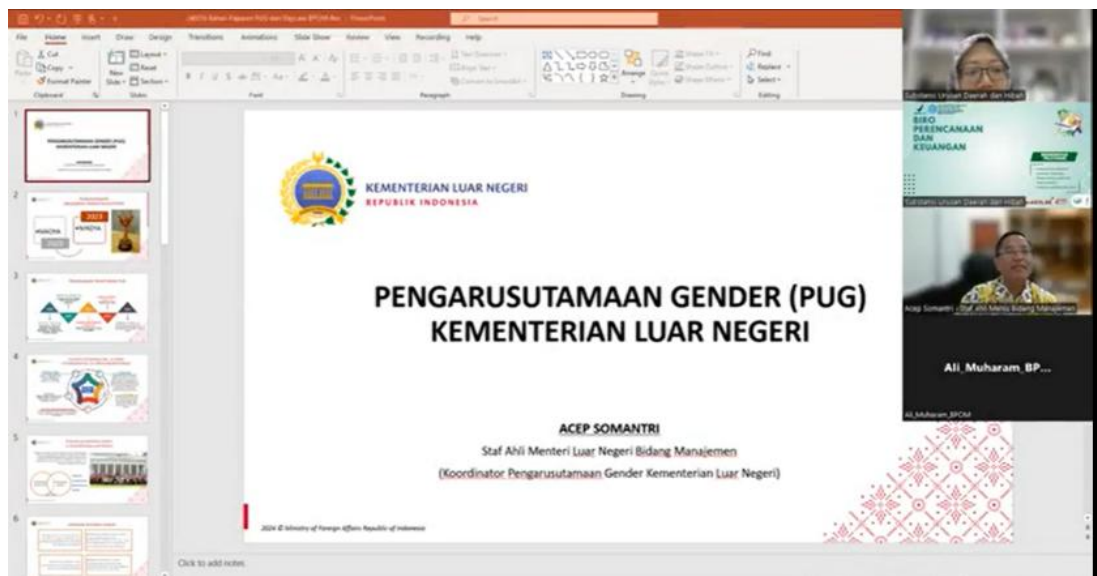
Sebagai upaya menurunkan kesenjangan akses terhadap informasi dan materi terkait Pengarusutamaan Gender serta memperkuat pemahaman dan implementasi PUG dalam pengawasan obat dan makanan diselenggarakan kegiatan penyusunan video pembelajaran pada 28 September 2024. Video Pembelajaran ini kemudian dimasukkan dalam IDEAS PPSDM. Dengan fasilitasi dari Bapak Yulius Hendra, peserta mendapatkan wawasan mendalam mengenai integrasi perspektif gender dalam materi edukasi, sekaligus memastikan bahwa video yang dikembangkan dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dalam mendukung penerapan PUG di sektor pengawasan obat dan makanan.



Gambar 3. 7 Proses Pengambilan Video untuk Video Pembelajaran Pengarusutamaan Gender

5. Pertemuan Rutin Anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG BPOM dan Subkelompok Kerja (Subpokja) PUG Satuan Kerja

Untuk meningkatkan pemahaman dari anggota Pokja-Subpokja PUG serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi PUG pada tahun berjalan, diselenggarakanlah pertemuan rutin yang dilakukan setiap tiga-empat bulan sekali. Pada pertemuan pertama, dilakukan diskusi tematik pembelajaran Beset Practice implementasi PUG pada Kementerian Luar Negeri.



Gambar 3. 8 Pertemuan Daring bersama Pokja-Subpokja PUG serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi PUG

D. PENGEMBANGAN APLIKASI SIMETRIS RHPK

Aplikasi RHPK merupakan sistem pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) yang dilaporkan secara elektronik di lingkungan BPOM. Pelaporan RHPK dilakukan secara berkala per bulan. Unit kerja pusat dan UPT melakukan pelaporan capaian kinerja dan anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya melalui aplikasi RHPK per bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sehingga kepala unit dapat melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran unit kerjanya masing-masing pada RHPK. Dilihat dari pentingnya aplikasi RHPK yang dimanfaatkan oleh unit Pusat dan UPT, sehingga perlu penyempurnaan aplikasi yang dapat memudahkan user dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya.

Sebelumnya di tahun 2023 Aplikasi RHPK sudah melakukan pengembangan namun belum maksimal. Di tahun 2024 Aplikasi RHPK dikembangkan kembali, guna untuk penyempurnaan aplikasi dalam memudahkan user dan tim Monev dan Lapkin untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran unit pusat dan UPT.

Pengembangan Aplikasi RHPK mencakup terkait integrasi data dengan aplikasi unit melalui satu data BPOM. Integrasi data dilakukan, agar unit Pusat dan UPT tidak melakukan input manual lagi di Aplikasi RHPK dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya.

Dari hasil pengembangan tahun 2023, masih ditemukan rumus yang belum sesuai dengan pedoman monev. Oleh karena itu, perlu perbaikan rumus pada monev overview yang masih ditemukan kesalahan rumus penghitungan data hasil rekapitan pelaksanaan kegiatan unit Pusat dan UPT.

Pengembangan Aplikasi RHPK tahun 2024 ini juga mencakup terkait penyempurnaan fitur-fitur yang belum berjalan optimal serta penambahan sub menu monitoring data API dan log API, role user, role akses dan panduan user guide guna untuk memudahkan admin pusat dalam monitoring aliran data yang bersumber dari API serta melakukan setting role user, role akses, log user, log activity pada pengguna Aplikasi RHPK. Berikut detail pengembangan yang telah dilakukan:

a. Integrasi Data dengan Aplikasi Satu Data BPOM

Beberapa data yang telah diintegrasikan ke Aplikasi RHPK melalui Aplikasi Satu Data BPOM yaitu data indikator dan target dari aplikasi e-planing, data profil peraturan, standar, dan pedoman BPOM dari aplikasi SISOBAT, data hasil operasi

intelijen, rawan kasus, dan patroli siber dari aplikasi penindakan, data hasil analisis kebijakan dari aplikasi Pusakom, data pengawasan iklan pre review dari aplikasi Sireka, data pengawasan iklan dan label/penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan dari aplikasi SIPT, dan data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan dari aplikasi SIPT.

Pengawasan Iklan Pre Review (Tahun 2025)

Unit Kerja : Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Preview Data | Export Data | Refresh Data Dari Satu Data BPOM | Cek Aliran Satu Data BPOM

⚠ Data diambil secara realtime dari <https://satudata.pom.go.id>

No	Komoditi	Unit	Jumlah Permohonan	Jumlah Keputusan Yang Ditetapkan
1	Obat	Dit. KMEI	48	40

Gambar 3. 9 Data yang telah terintegrasi dengan Satu Data BPOM

b. Perbaikan rumus sesuai pedoman monev di menu monev overview

List Form Monev

List Form Monev Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025

Basah Pengawas Obat dan Makanan

Table 1: Hasil Sampel dan Pengujian Obat dan Makanan

Table 2: Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Table 3: Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Table 4: Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Table 5A: Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dibekukan

Table 5B: Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Table 6: Hasil Sampel Pengujian Obat dan Makanan

Table 6: Intelijen dan Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Table 7: Pengawasan Min Pre Risiko

Table 7A: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengabdian Masyarakat

Table 7B: Jaring Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Table 8: Pengawasan Min dan Label / Penandaan

Table 9: Pengawasan Sarana Farmasi Dan Makanan

Table 9: Pengawasan Label/Penandaan Sarana Farmasi Dan Makanan

Table 9: Revisi Anggaran

Table 10: Pengawasan Sertifikasi

Gambar 3. 10 Tabel-tabel di menu overview

c. Penambahan dan penyempurnaan fitur

Aliran Data API Penindakan (ADP) Data Rawan Kasus Obat dan Makanan (Tahun 2025)

No	Bulan	UPT	Obat	Kuasi	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan Olahan	Terakhir Diperbarui
1	Februari	Balai Besar POM di Banda Aceh	2	0	0	0	0	0	2025-02-13 03:05
2	Februari	Balai Besar POM di Banjarmasin	0	0	1	0	0	0	2025-02-13 03:05
3	Februari	Balai Besar POM di Denpasar	0	0	1	0	9	1	2025-02-13 03:05
4	Februari	Balai Besar POM di Jakarta	2	0	3	0	3	0	2025-02-13 03:05
5	Februari	Balai Besar POM di Jayapura	2	0	0	0	0	0	2025-02-13 03:05
6	Februari	Balai Besar POM di Makassar	6	0	0	0	2	0	2025-02-13 03:05
7	Februari	Balai Besar POM di Manado	2	0	0	0	0	0	2025-02-13 03:05
8	Februari	Balai Besar POM di Mataram	13	0	2	0	5	0	2025-02-13 03:05
9	Februari	Balai Besar POM di Medan	0	0	0	0	3	0	2025-02-13 03:05

Gambar 3. 11 Aliran Data API

Role User

Daftar Role User

No	Role	Deskripsi	Status	Aksi
1	User		Active	Ops
2	Monitoring		Active	Ops
3	Monitoring Kedeputan		Active	Ops
4	Admin		Active	Ops

Showing 1 to 4 of 4 entries

Gambar 3. 12 Sub menu role user

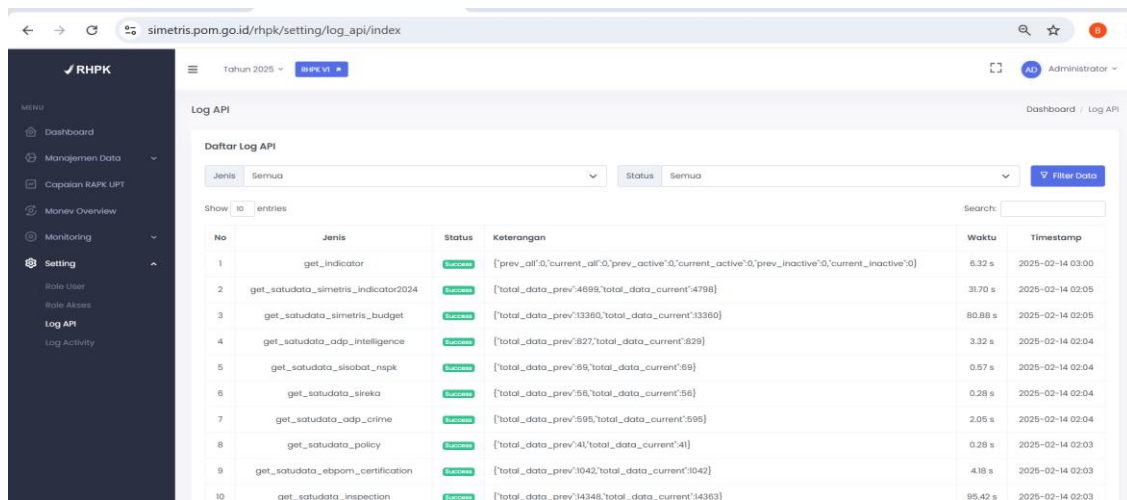
Role Akses

Daftar Role Akses Aplikasi RHPK BPOM

Tambah Pengguna

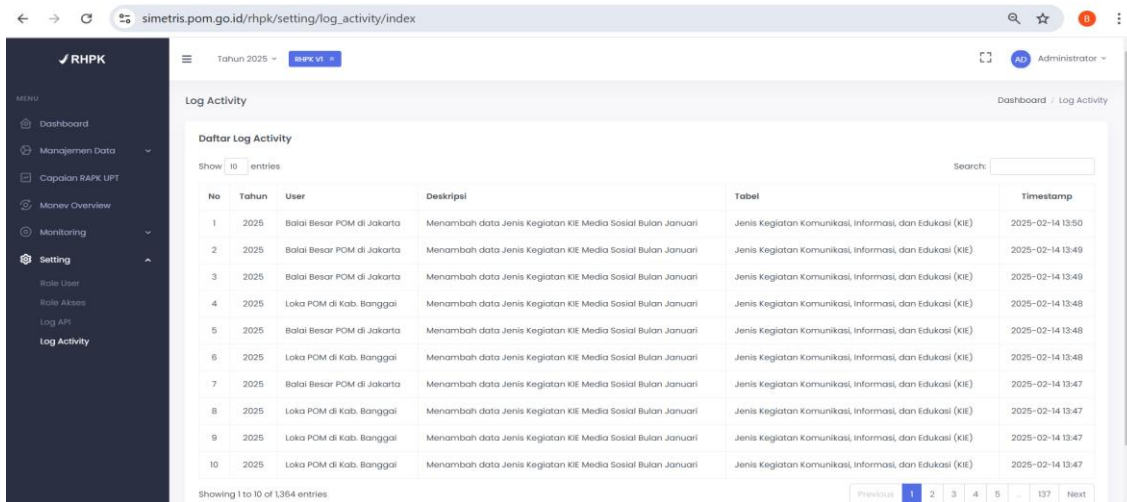
No	Username	Nama	Email	Peran	Status	Aksi
1	monitoring_udh	Iksani	udh@pom.go.id	Monitoring Kedeputan	Active	Ops
2	money_dep4	deputiempat	deputi4@gmail.com	Monitoring Kedeputan	Active	Ops
3	money_dep3	deputitiga	deputi3@gmail.com	Monitoring Kedeputan	Active	Ops
4	money_dep2	deputidua	deputi2@gmail.com	Monitoring Kedeputan	Active	Ops
5	money_dep1	deputisatu	deputi1@gmail.com	Monitoring Kedeputan	Active	Ops
6	YusriHalim	YusriHalim	yusri@gmail.com	User	Inactive	Ops
7	money_lakabelu	Loka POM di Kabupaten Belu	loka_belu@pom.go.id	User	Active	Ops
8	money_lakasumbatimur	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	loka_sumbatimur@pom.go.id	User	Active	Ops
9	money_lokacembas	Loka POM di Kabupaten Cembas	loka_cembas@pom.go.id	User	Active	Ops

Gambar 3. 13 sub menu role akses



No	Jenis	Status	Keterangan	Waktu	Timestamp
1	get_indicator	Success	['prev_alf':0,'current_alf':0,'prev_active':0,'current_active':0,'prev_inactive':0,'current_inactive':0]	6.32 s	2025-02-14 03:00
2	get_satudata_simetris_indikator2024	Success	['total_data_prev':4698,'total_data_current':4798]	31.70 s	2025-02-14 02:05
3	get_satudata_simetris_budget	Success	['total_data_prev':13360,'total_data_current':13360]	80.88 s	2025-02-14 02:05
4	get_satudata_oadp_intelligence	Success	['total_data_prev':827,'total_data_current':829]	3.32 s	2025-02-14 02:04
5	get_satudata_sisabat_nspk	Success	['total_data_prev':59,'total_data_current':69]	0.57 s	2025-02-14 02:04
6	get_satudata_sireka	Success	['total_data_prev':56,'total_data_current':56]	0.28 s	2025-02-14 02:04
7	get_satudata_oadp_crime	Success	['total_data_prev':595,'total_data_current':595]	2.05 s	2025-02-14 02:04
8	get_satudata_policy	Success	['total_data_prev':41,'total_data_current':41]	0.28 s	2025-02-14 02:03
9	get_satudata_ebpom_certification	Success	['total_data_prev':1042,'total_data_current':1042]	4.18 s	2025-02-14 02:03
10	get_satudata_inspection	Success	['total_data_prev':14348,'total_data_current':14363]	95.42 s	2025-02-14 02:03

Gambar 3. 14 sub menu log API



No	Tahun	User	Deskripsi	Tabel	Timestamp
1	2025	Balai Besar POM di Jakarta	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:50
2	2025	Balai Besar POM di Jakarta	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:49
3	2025	Balai Besar POM di Jakarta	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:49
4	2025	Loka POM di Kab. Banggai	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:48
5	2025	Balai Besar POM di Jakarta	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:48
6	2025	Loka POM di Kab. Banggai	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:48
7	2025	Balai Besar POM di Jakarta	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:47
8	2025	Loka POM di Kab. Banggai	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:47
9	2025	Loka POM di Kab. Banggai	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:47
10	2025	Loka POM di Kab. Banggai	Menambah data Jenis Kegiatan KIE Media Sosial Bulan Januari	Jenis Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	2025-02-14 13:47

Gambar 3. 15 sub menu activity

E. REDESIGN APLIKASI E-PERFORMANCE

Aplikasi *e-Performance* merupakan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja secara online yang bertujuan untuk melaporkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada indikator kinerja organisasi yang disusun berdasarkan *Balanced Score Card* (BSC).

Aplikasi *e-Performance* dibangun tahun 2019, sehingga secara framework sudah tidak update dan berisiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan redesign Aplikasi *e-Performance* guna untuk keamanan data dengan cara mengupdate

framework yang terbaru. Dan tidak hanya fokus pada update *framework*, redesign aplikasi *e-Performance* juga berfokus dalam penambahan fitur yang dapat memudahkan user pusat dan UPT dalam melaporkan pencapaian sasaran strategisnya.

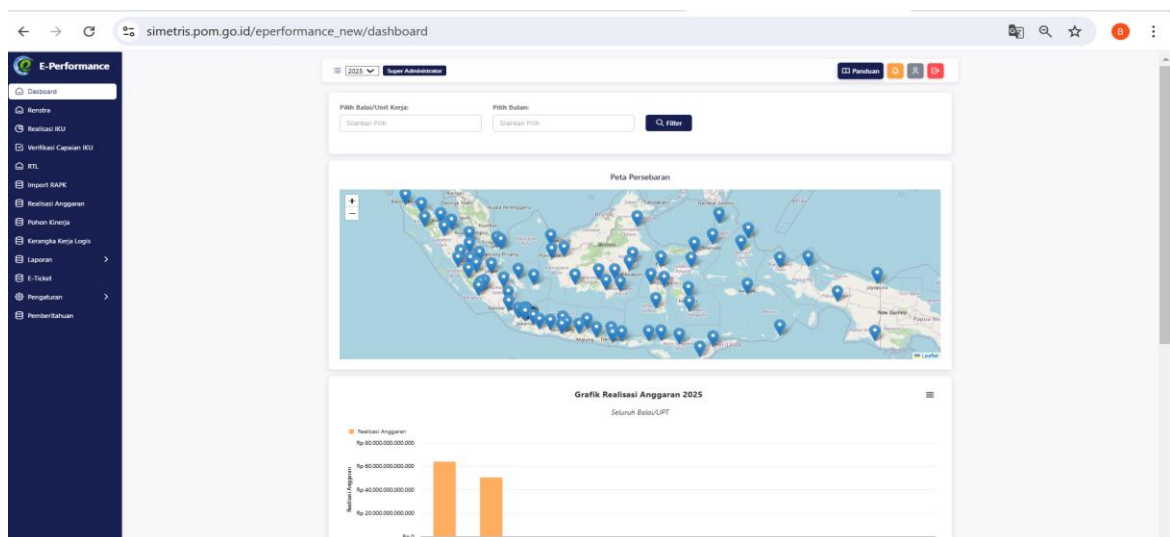
Aplikasi *e-Performance* saat ini menggunakan *framework* yang terbaru yaitu laravel 9.0 dengan PHP 8.2, *database postgresql* dan sudah *user friendly*, sehingga lebih aman dan memudahkan dari versi yang sebelumnya.

Beberapa fitur yang dikembangkan antara lain menu *dashboard*, menu laporan, menu RTL, menu renstra, menu realisasi IKU, menu verifikasi realisasi IKU, menu realisasi anggaran, *menu import* data RAPK, menu kerangka kerja logical framework, menu pohon kinerja, menu e-tiket, menu pemberitahuan, menu *setting* dan menu panduan user guide. Dan tidak hanya penambahan fitur, redesign Aplikasi *e-Performance* juga mencakup integrasi data dengan data sakti, SIMAKIN dan RHPK melalui Aplikasi Satu Data BPOM.

Berikut fitur-fitur Aplikasi *e-Performance* yang telah dikembangkan:

a. Menu Dashboard

Informasi yang tersedia di menu dashboard antara lain : peta sebaran realisasi anggaran, grafik realisasi anggaran dan tabel monitoring IKU.



Gambar 3. 16 Menu *Dashboard*

b. Menu Renstra

Di menu renstra terdapat data renstra unit selama 5 tahun

BALAI/UPT	SASARAN	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan					
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman					
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Nilai AKIP PPPOMN					
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan					
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan penoujian sediaan farmasi dan					

Gambar 3. 17 Menu Renstra

Menu Realisasi IKU

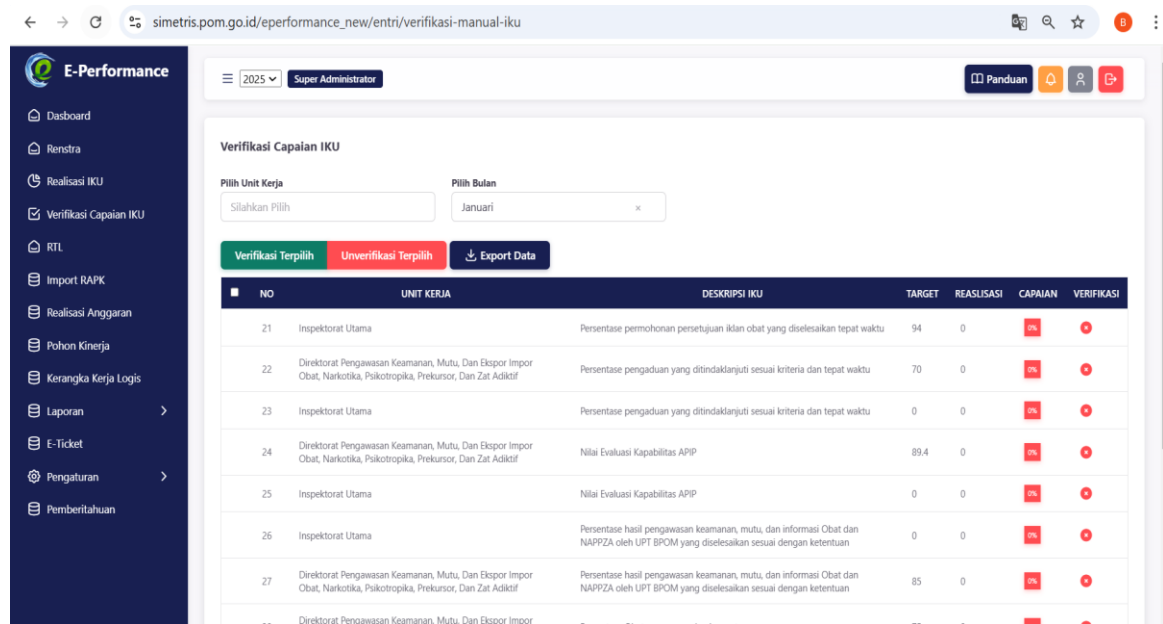
Pada menu realisasi IKU terdapat informasi data indikator kinerja unit serta target dan realisasi per bulannya.

UNIT KERJA	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	STATUS
Inspektorat Utama	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	Februari	94	85	90.43%	🟢
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	Februari	78	85	108.97%	🟢
Inspektorat Utama	Persentase hasil pengawasan mutu Obat dan NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Februari	0	85	0	🟢
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	Persentase hasil pengawasan mutu Obat dan NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Februari	70	85	121.43%	🟢
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Februari	89.4	85	95.08%	🟢
Inspektorat Utama	Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Februari	0	85	0	🟢

Gambar 3. 18 Menu Realisasi IKU

c. Menu Verifikasi Capaian IKU

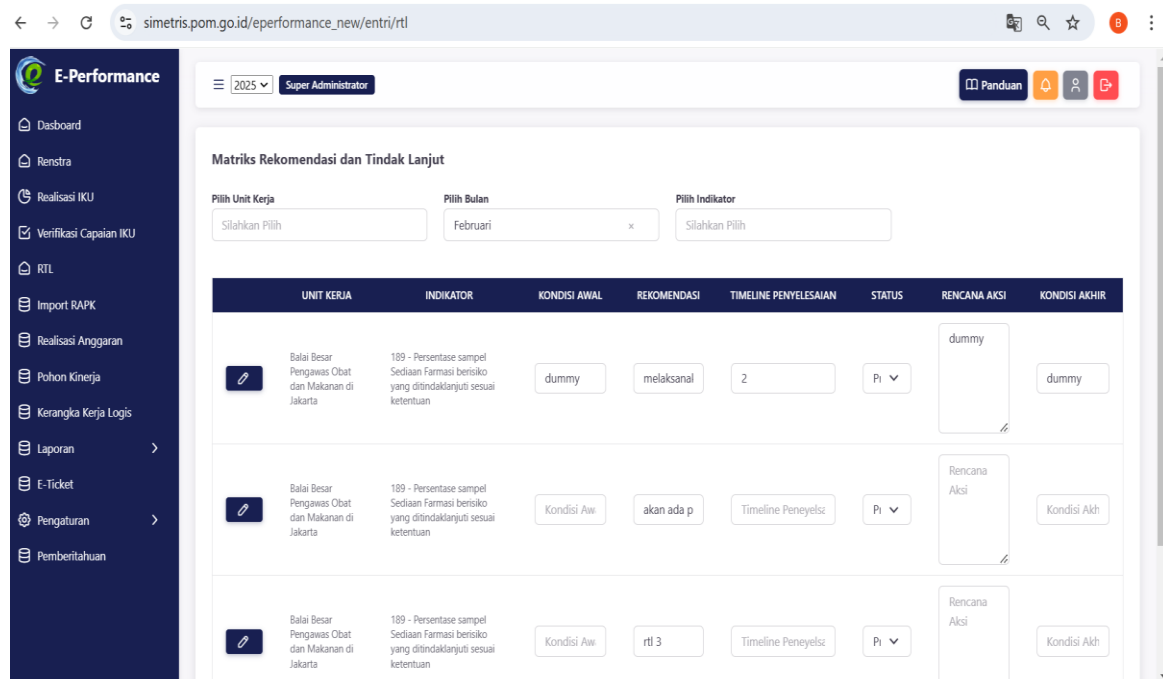
Proses verifikasi data capaian IKU seperti berikut:



Gambar 3. 19 Menu verifikasi capaian data IKU

d. Menu Rekomendasi Tindak Lanjut

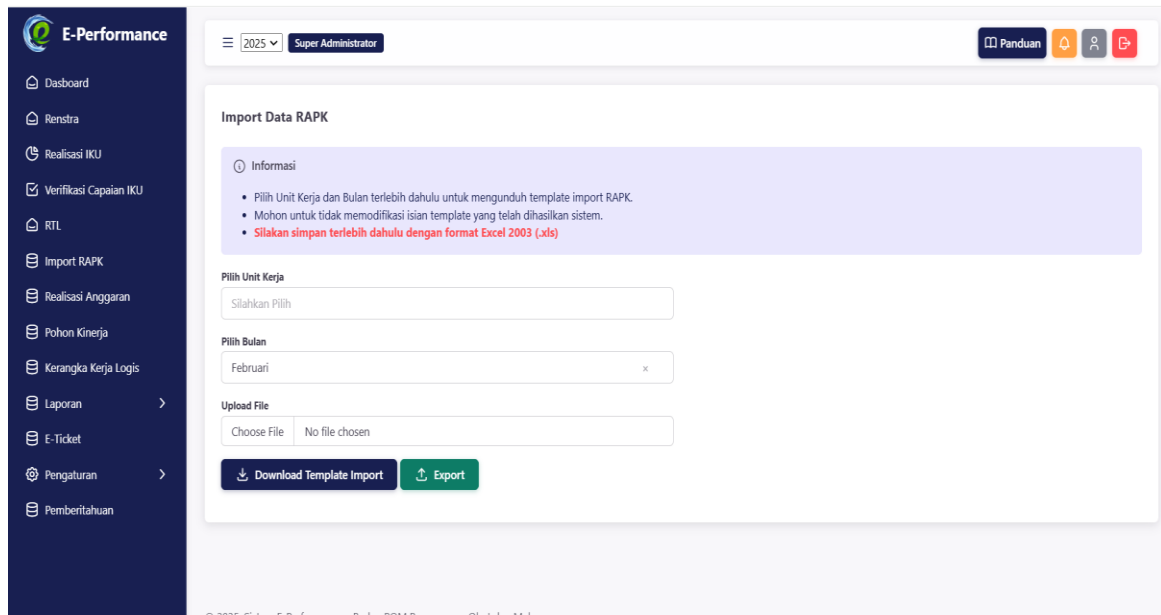
Berfungsi untuk menginput data kondisi awal, rekomendasi, timeline, rencana aksi dan kondisi akhir setiap IKU unit



Gambar 3. 20 Menu Rekomendasi Tindak Lanjut

e. Menu Import RAPK

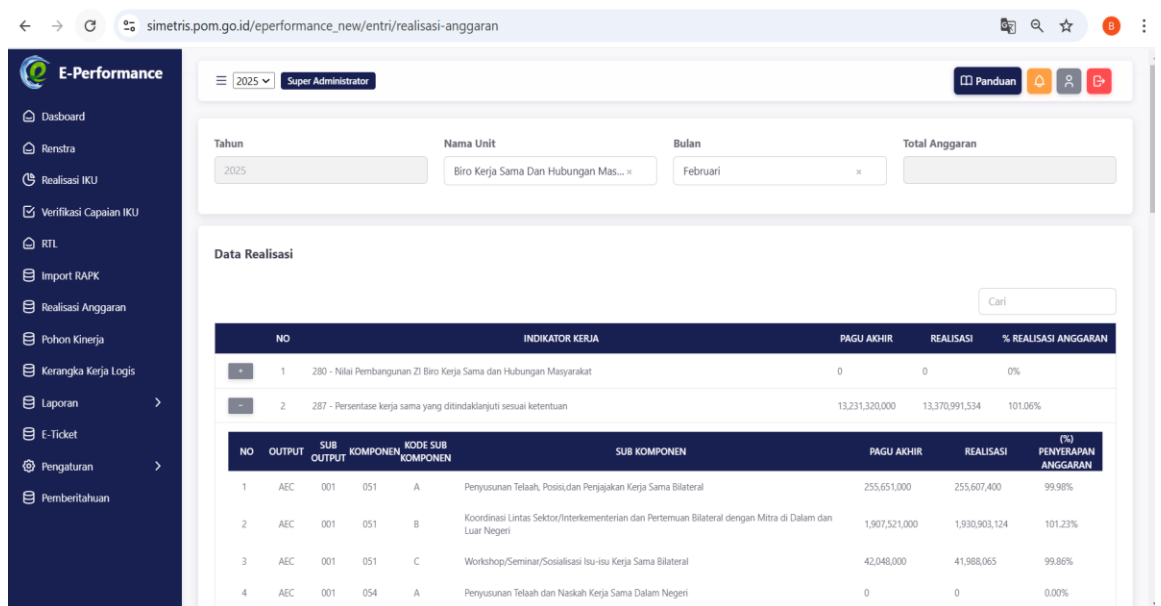
Berfungsi untuk import data manual RAPK dalam bentuk excel. Templates excel dapat di ekspor dengan memilih periode bulan dan nama unit kerja.



Gambar 3. 21 Menu Import RAPK

f. Menu Realisasi Anggaran

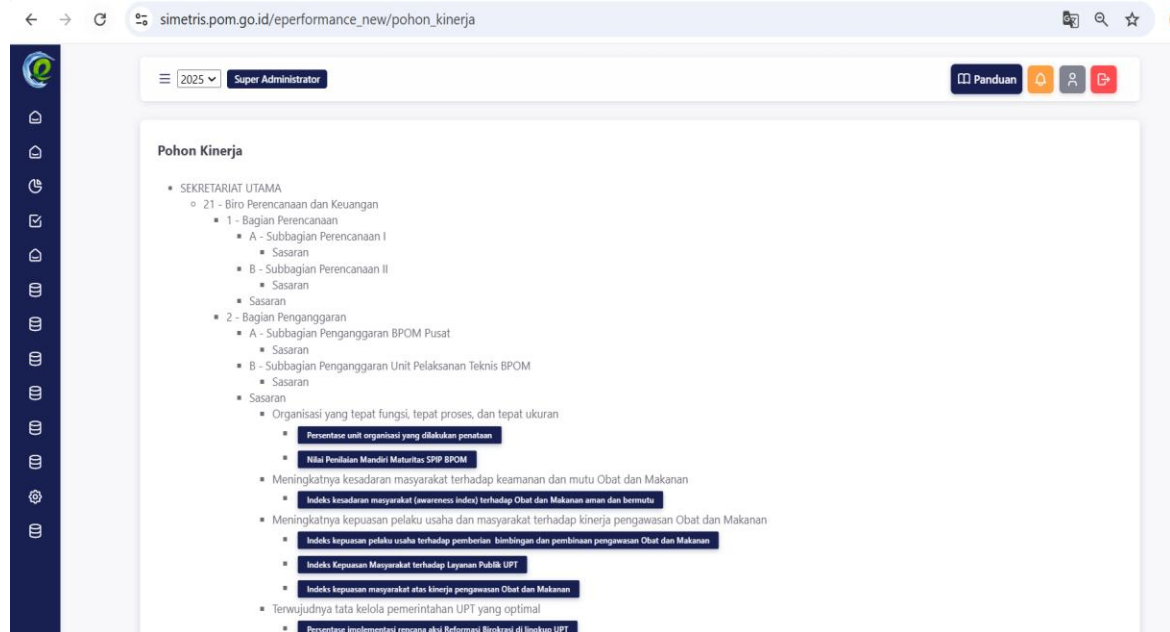
Data realisasi anggaran per unit yang bersumber dari data SAKTI melalui satu data BPOM



Gambar 3. 22 Menu Realisasi Anggaran

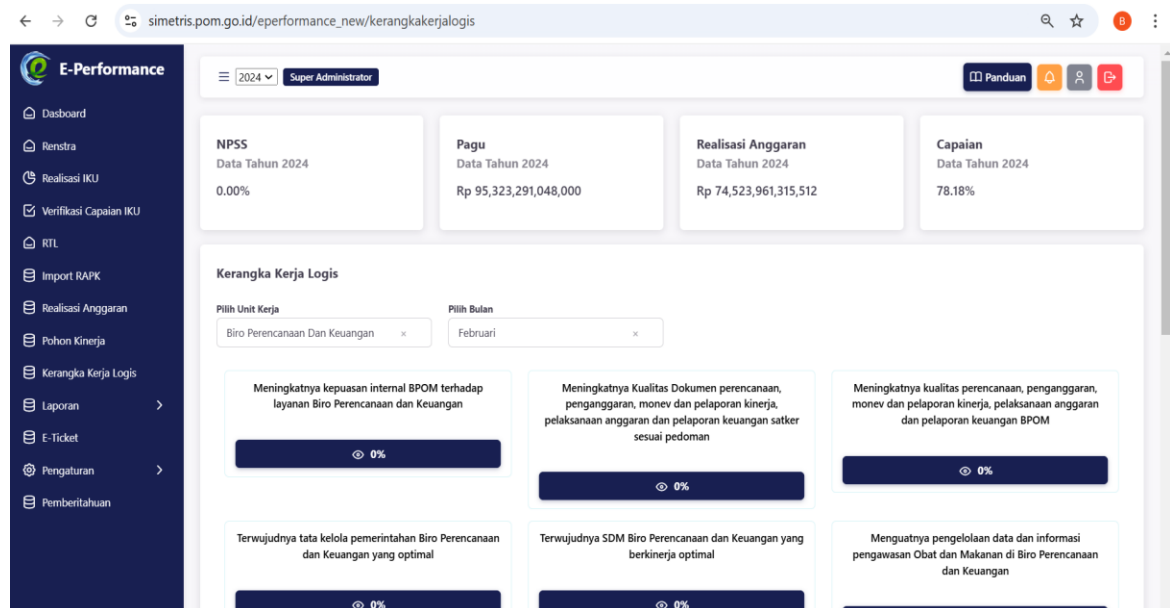
g. Menu Pohon Kinerja

Data bersumber dari Aplikasi SIMAKIN yang berisi data indikator dan MPH per individu.



Gambar 3. 23 Menu Pohon Kinerja

h. Menu Kerangka Kerja Logis



Gambar 3. 24 Menu Kerangka Kerja Logis

i. Menu Laporan

- Sub menu capaian kinerja

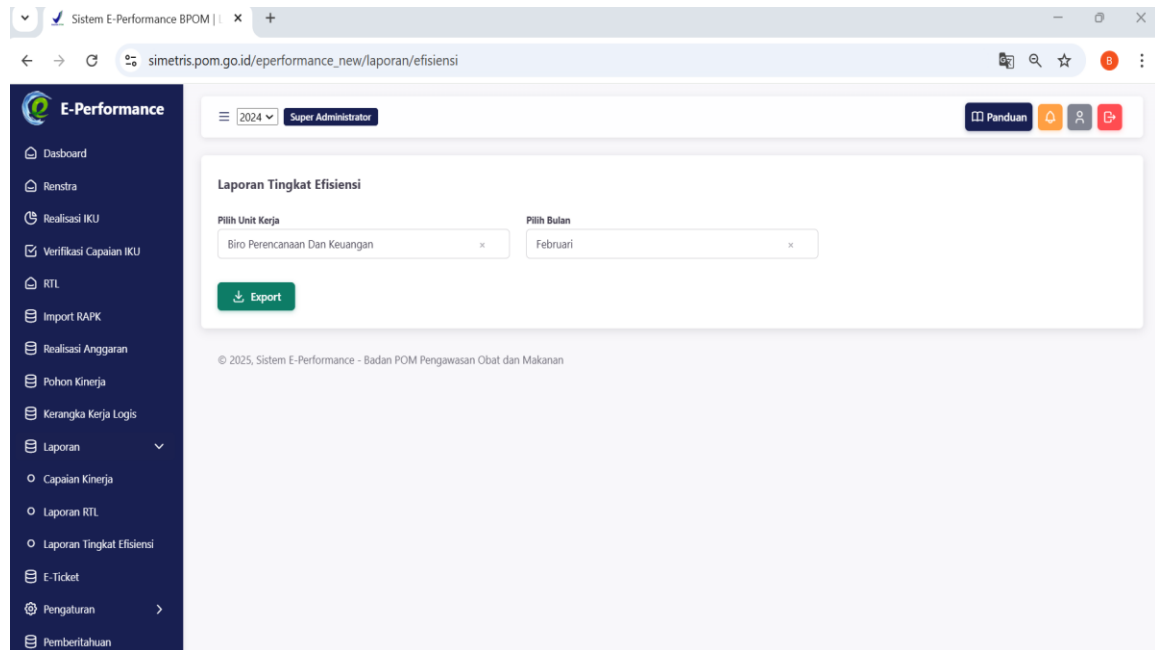
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BULAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	PAGU	REALISASI	%CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Februari	0	-	0	-	-	-
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro SDM yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Februari	0	-	0	-	-	-
3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	Februari	0	-	0	-	-	-
4	Terwujudnya SDM Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	Februari	87,21	-	0	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk	Persentase fasilitas pengembangan inovasi pangan	Februari	0	-	0	-	-	-

Gambar 3. 25 Sub menu capaian kinerja

- Sub menu laporan RTL

Gambar 3. 26 Sub Menu Laporan RTL

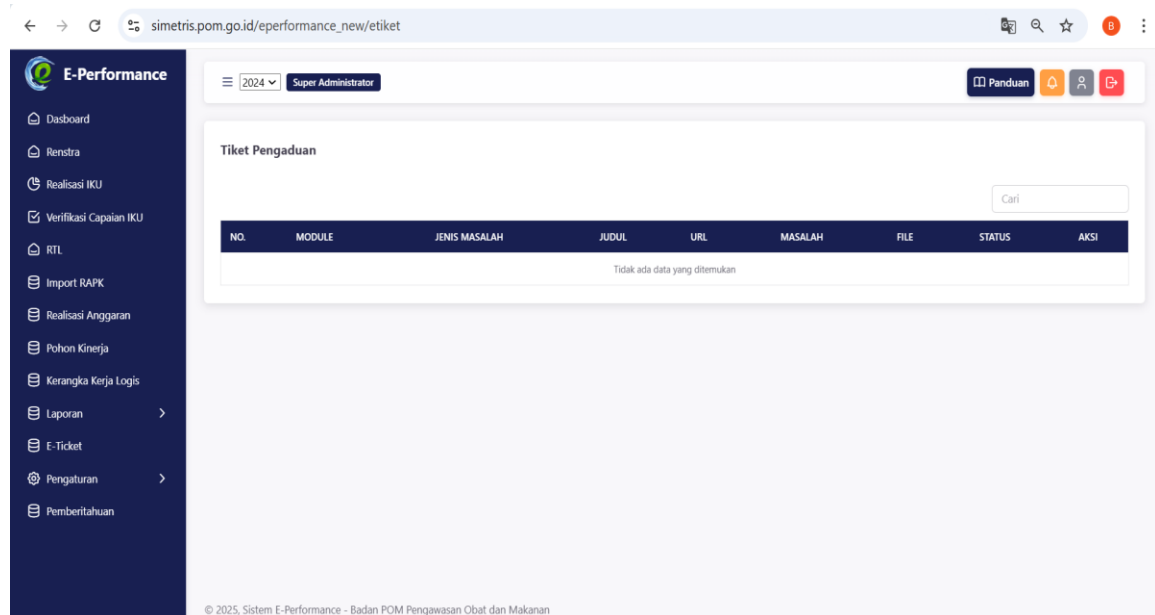
- Sub menu laporan tingkat efisiensi



Gambar 3. 27 sub menu laporan tingkat efisiensi

j. Menu E-Tiket

Data pengaduan dari unit



Gambar 3. 28 menu e-Tiket

k. Menu Pengaturan

- Sub menu log API

List informasi log data API yang terintegrasi dengan aplikasi e-Performance

NO	MODULE	STATUS	TANGGAL
1	get_total_anggaran	success	16-02-2025 04:55:07
2	get_realisasi_anggaran	success	16-02-2025 03:02:38
3	get_target	success	16-02-2025 02:02:17
4	get_data_rapak	success	16-02-2025 01:32:05
5	get_master_sasaran	success	16-02-2025 01:00:06
6	get_master_indikator	success	16-02-2025 00:00:13
7	get_total_anggaran	success	15-02-2025 04:55:38
8	get_realisasi_anggaran	success	15-02-2025 03:02:42
9	get_data_rapak	success	15-02-2025 01:32:04
10	get_master_sasaran	success	15-02-2025 01:00:07
11	get_master_indikator	success	15-02-2025 00:00:11
12	get_total_anggaran	success	14-02-2025 05:03:30

Gambar 3. 29 sub menu log API

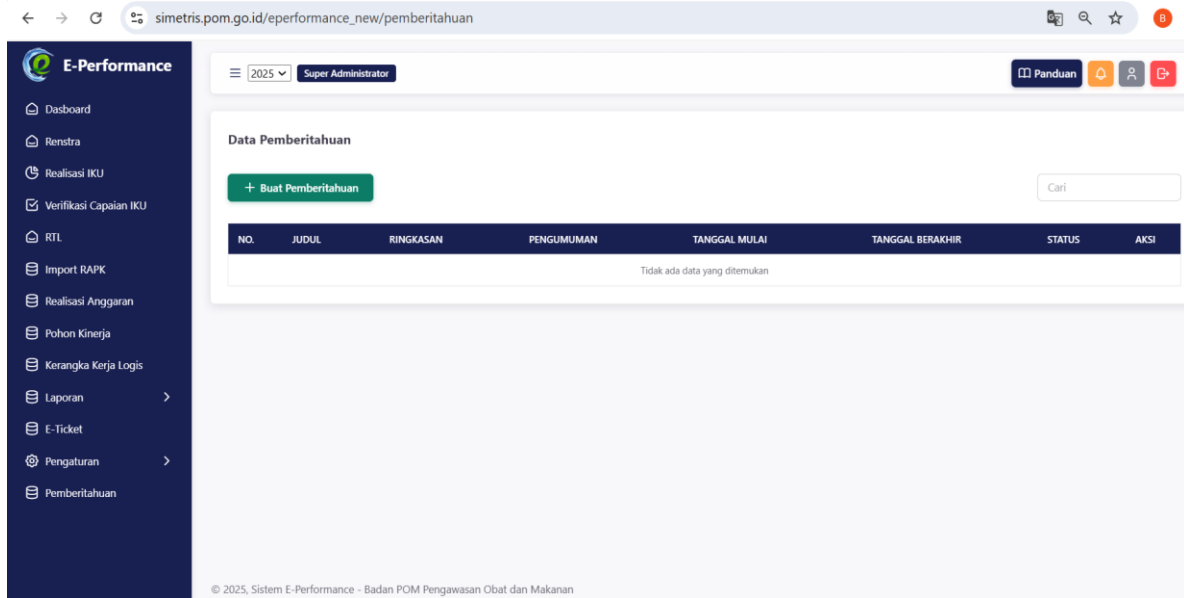
- Sub menu manajemen akses & role

NAME	EMAIL	GROUP	STATUS	TANGGAL PEMBUATAN
LPT	upti@pom.go.id	User	Aktif	30 Agustus 2024
Monev	bagianevapori@gmail.com	Monev	Aktif	30 Agustus 2024
Kepala Balai	kepala_balai@pom.go.id	Kepala Unit	Aktif	30 Agustus 2024
userotsk	UserOTSK@pom.go.id	User	Aktif	17 Desember 2024
UserRPO	UserRPO@pom.go.id	User	Aktif	17 Desember 2024
userkendari	UserKendari@pom.go.id	User	Aktif	17 Desember 2024
userSurakarta	UserSurakarta@pom.go.id	User	Aktif	17 Desember 2024
adminOTSK	AdminOTSK@pom.go.id	Admin Unit	Aktif	17 Desember 2024
adminRPO	AdminRPO@pom.go.id	Admin Unit	Aktif	17 Desember 2024

Gambar 3. 30 sub menu manajemen akses & role

I. Pemberitahuan

Berisi informasi pemberitahuan yang dikirim ke unit pusat dan UPT



Gambar 3. 31 menu pemberitahuan

F. RAPAT EVALUASI NASIONAL (REN) BPOM TAHUN 2024

Rapat Evaluasi Nasional (REN) merupakan forum evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BPOM yang dihadiri oleh seluruh pimpinan unit kerja baik pusat maupun UPT BPOM. REN Tahun 2024 mengambil tema **“Optimalisasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mewujudkan BPOM sebagai Organisasi Kelas Dunia Menuju Indonesia Emas 2045”**, difokuskan pada evaluasi Renja Tahun 2024 dan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024. Selain itu juga dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) BPOM yang merupakan tindak lanjut dari temuan hasil audit penerapan sistem mutu ISO 9001:2015 di lingkungan BPOM.





Gambar 3. 32 Kepala Badan POM membuka kegiatan REN Tahun 2024

Bertempat di Kota Pahlawan, Surabaya, pada 3-4 Desember 2024 acara kegiatan REN tahun 2024 dibuka langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dan perwakilan pegawai BPOM yang hadir secara luring dan daring. Acara REN juga dihadiri oleh narasumber

eksternal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain internal BPOM, hadir pula undangan lintas sektor yaitu Pejabat Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM; Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (FF UNAIR) Prof. Junaidi Khotib; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dr. Iwan S.Hut., M.M.; Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Provinsi Jawa Timur Danny Wibisono; dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman.

Dalam laporannya, Sekretaris Utama menyampaikan pentingnya REN tahun 2024 yang merupakan REN terakhir dalam periode Renstra 2020-2024 sehingga REN ini dapat dijadikan wahana refleksi dari setiap unit kerja dalam memastikan pencapaian kinerjanya serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan di tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Renstra 2025-2029.

G. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring melalui aplikasi Zoom) dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan serta dihadiri oleh perwakilan dari 30 Unit Kerja Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 34 Loka POM.

Pelaksanaan bimtek bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di masing-masing unit kerja dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan kualitas laporan kinerja. Agenda kegiatan meliputi paparan oleh narasumber eksternal dan internal serta *desk* data hasil *monev* tahun 2024 antara unit kerja dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Narasumber pada bimtek ini berasal dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Kementerian PANRB), Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Inspektorat I, Inspektorat II, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam paparannya menyampaikan bahwa seluruh unit kerja sampai level terkecil perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Selain itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan juga memaparkan pentingnya supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kualitas laporan kinerja dan dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk perencanaan kinerja periode berikutnya.

Pada sesi berikutnya, narasumber dari Kementerian Keuangan memaparkan regulasi terbaru terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, maka sudah tidak terdapat lagi irisan penilaian antara nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penilaian penyerapan anggaran dan konsistensi rencana penarikan dana menjadi fokus pemantauan pada nilai IKPA sementara efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi fokus pemantauan nilai EKA. Kementerian Keuangan juga meminta Badan POM melakukan *assessment* RO dengan tujuan untuk menyamakan persepsi cara pelaporan capaian kinerja level RO di antara satuan kerja Badan POM.

Pada hari kedua, narasumber dari Kementerian PANRB menyampaikan paparan terkait hasil evaluasi AKIP Badan POM tahun 2023. Secara umum, hasil evaluasi AKIP Badan POM menunjukkan tren peningkatan dengan dengan nilai AKIP pada tahun 2023

sebesar 81,45 (predikat A). Hal ini menunjukkan manajemen kinerja di Badan POM sudah cukup baik namun tetap perlu ada perbaikan berkelanjutan pada seluruh komponen penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Setelah paparan dari narasumber Kementerian PANRB, agenda bimtek dilanjutkan dengan paparan capaian indikator unit kerja oleh narasumber internal Badan POM sampai dengan hari ketiga. Di penghujung acara, juga dilakukan *desk* terhadap data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), RKP/RAPK, E-Performance, dan draf Laporan Kinerja Tahun 2023 dari masing-masing unit kerja. Kegiatan *desk* ini bertujuan untuk memastikan data yang diinput sudah valid dan selaras.



Gambar 3. 33 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023

IKU 2: NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 3 adalah:

A. RAPAT KOORDINASI PIMPINAN DALAM MONEV KINERJA ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2024

Sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran BPOM, salah satu tahap yang harus dilakukan untuk memastikan program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Karena itu pada hari Senin, 15 Juli 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Monev Kinerja dan Anggaran sampai dengan Semester I tahun 2024 di Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Plt. Kepala BPOM RI diikuti seluruh Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 3. 34 Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Monev Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2024 di Pimpin Plt. Kepala BPOM RI, Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Pertemuan diawali dengan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran BPOM hingga 30 Juni 2024. Realisasi anggaran BPOM sebesar 43,95%, sedangkan realisasi anggaran dengan outstanding kontrak mencapai 48,69%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional (42,61%) dan menempatkan BPOM pada peringkat 29 dari 85 K/L. Jika pagu dikurangi Automatic Adjustment, realisasi anggaran menjadi 47,24%. BPOM memiliki 27 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan 9 IKU yang dapat diukur pada triwulan II-2024 dan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 100,72%. Dari 9 IKU tersebut, 4 IKU mencapai target dengan kategori "Sangat Baik", 4 IKU tidak mencapai target dengan kategori "Cukup", dan 1 IKU tidak mencapai target dengan kategori "Kurang".

Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kegiatan, serta peningkatan pencapaian target kinerja untuk menghindari permasalahan serupa di periode selanjutnya. Evaluasi kinerja dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menunjukkan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) UPT mencapai 99,95% dengan kategori "Baik". Beberapa UPT memiliki deviasi anggaran lebih dari $\pm 5\%$, sehingga perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kegiatan ke depan. Deputi Pembina diminta untuk menyampaikan solusi berdasarkan kluster UPT lama dan baru guna mengatasi permasalahan teknis di beberapa UPT.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Plt. Kepala BPOM memberikan beberapa arahan, antara lain perlunya switching anggaran dari unit kerja yang tidak dapat menyerap anggaran secara optimal ke unit kerja dengan program strategis yang kekurangan anggaran. UPT diberikan kewenangan untuk mengembangkan pengujian sesuai

kebutuhan tanpa harus menunggu instruksi dari Pusat, dengan tetap melakukan koordinasi dan pelaporan kepada unit Pusat terkait.

Selain itu, dibentuk tim lintas unit Eselon I untuk memperbaiki pedoman sampling dan pengujian obat serta makanan. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator dan target kinerja BPOM agar tidak ada target yang capaiannya berada di luar kendali BPOM. Target indikator "Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat" harus seragam di seluruh UPT, sementara definisi operasional sampling disesuaikan dengan prioritas, risiko, dan kemampuan masing-masing UPT. Laporan ini menjadi dasar untuk perbaikan dan optimalisasi kinerja serta anggaran BPOM pada periode mendatang.

IKU 3: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 4 adalah:

A. SOSIALISASI PERATURAN BAGI PPK



Sebagai bagian dari program terstruktur yang dirancang oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, telah diselenggarakan Sosialisasi Peraturan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi

PPK di lingkungan Satuan Kerja. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendalami pemahaman PPK terkait peraturan pengelolaan keuangan dan kinerja pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang harus diantisipasi, serta merumuskan upaya perbaikan dalam proses pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana APBN.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring melalui metode Focus Group Discussion (FGD) pada 21–23 Mei 2024 di Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran. Peserta terdiri dari 126 orang, termasuk 90 peserta inti dan 36 peserta tambahan dari 81 Satuan Kerja

di lingkungan Badan POM. Beberapa Satuan Kerja, seperti BPOM di Mamuju dan Pusakom, tidak dapat mengirimkan peserta karena alasan kegiatan lain yang sedang berlangsung.



Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, termasuk PPK yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PPK memiliki tugas dan wewenang, antara lain menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, menerbitkan surat penunjukan penyedia, menandatangani perjanjian dengan penyedia, melaksanakan kegiatan swakelola, serta mengendalikan pelaksanaan perikatan dan pertanggungjawaban keuangan. PPK juga bertanggung jawab atas kebenaran materiil penggunaan bukti hak tagih kepada negara, validitas data supplier dan kontrak, serta kesesuaian barang/jasa dengan spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu, PPK wajib melaporkan perjanjian yang dilakukan kepada KPA serta menyampaikan data supplier dan kontrak kepada KPPN untuk pembayaran melalui mekanisme SPM-LS. Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019, PPK juga diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 3. 35 Focus Group Discussion (FGD) pada 21–23 Mei 2024 di Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman PPK terhadap berbagai peraturan terkait tugas dan kewenangannya, serta menjadi wadah berbagi pengalaman untuk memitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Anggaran Bidang PMK DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb, Direktorat Sistem Penganggaran DJA, Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan DJPb, Direktorat P2Humas Ditjen Pajak, APIP dari Inspektorat Utama BPOM, serta UKPBJ BPOM. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mendukung optimalisasi kinerja Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KKP DI LINGKUNGAN BADAN POM

Pada 10 Juni 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi KKP secara daring menggunakan platform *Zoom Meeting* yang menghadirkan narasumber Dwi Harivarman, Dhaniel TM Manurung, dan PIC KKP Bank Himbara. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran yang digunakan untuk belanja APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit. Prinsip utama KKP mencakup fleksibilitas dalam penggunaan, keamanan untuk menghindari fraud, efektivitas dalam mengurangi idle cash, serta akuntabilitas dalam pembayaran tagihan negara. Berdasarkan peruntukannya, KKP terbagi menjadi KKP untuk belanja barang operasional/belanja modal (seperti pembelian ATK, pemeliharaan, dan jamuan) serta KKP untuk belanja perjalanan dinas (termasuk pembelian tiket, penginapan, dan sewa kendaraan). Sementara itu, berdasarkan penyedia (*provider*), terdapat dua jenis KKP, yaitu KKP Non-Domestik yang menggunakan principal Visa/Mastercard dan KKP Domestik atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang menggunakan principal GPN.

Pada tahun 2023, sebanyak 4.138 satker dari 74 BA, yang terdiri dari 73 BA K/L dan 1 BA BUN, telah menggunakan KKP dengan nilai transaksi terbesar untuk pembelian tiket transportasi sebesar Rp277 miliar dari 65 ribu transaksi. Di lingkungan BPOM, penggunaan KKP terus meningkat sejak 2020, dengan puncaknya pada 2021 mencapai Rp47,59 miliar. Pada 2023, nilai transaksi KKP mencapai Rp36,12 miliar atau meningkat 61,63% dibandingkan 2022. Penggunaan terbesar KKP BPOM pada 2023 mencakup pembelian tiket transportasi sebesar Rp11,66 miliar, hotel/penginapan Rp4,95 miliar, langganan daya dan jasa Rp4,00 miliar, pembelian ATK Rp1,84 miliar, serta pembelian

diperkuat dengan Bank Indonesia dan bank penerbit KKP guna mempercepat penerbitan KKP serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaannya.

Dari aspek monitoring dan evaluasi, penggunaan teknologi informasi terus dikembangkan, antara lain melalui Dashboard KKP yang mengintegrasikan data KKP dengan Bank Himbara serta pengembangan data transaksi KKP dalam aplikasi OMSPAN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan KKP di lingkungan BPOM semakin optimal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi belanja pemerintah.

C. SOSIALISASI OMSPAN ATAS IKPA SERTA MEKANISME PELAPORAN PROYEKSI TARGET DAN REALISASI CAPAIAN OUTPUT APLIKASI SAKTI TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di satuan kerja Badan POM, telah diselenggarakan Sosialisasi OMSPAN atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output pada Aplikasi SAKTI Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022.

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2024, di Hotel Aryaduta Menteng, dengan tujuan meningkatkan ketercapaian output dan outcome belanja pemerintah serta mempersiapkan pelaporan proyeksi target dan realisasi capaian output tahun 2024, khususnya untuk Triwulan I dan II. Capaian IKPA BPOM pada Triwulan I 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali pada indikator deviasi halaman III DIPA. Capaian IKPA BPOM juga lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, kecuali pada aspek penyerapan anggaran.

Evaluasi menunjukkan bahwa capaian IKPA nasional dipengaruhi oleh kinerja satuan kerja di wilayah dengan transaksi dominan seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Indikator yang memerlukan perbaikan ke depan meliputi deviasi halaman III DIPA serta pengelolaan UP dan TUP. Dalam evaluasi kualitas data pelaporan capaian output tahun 2023 ditemukan beberapa permasalahan, seperti PCRO dilaporkan 0 meskipun ada realisasi anggaran, PCRO lebih rendah dari realisasi anggaran, atau PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak sesuai target. Diperlukan

standardisasi cara pelaporan, penyamaan persepsi di antara operator satuan kerja, serta peningkatan kualitas data untuk analisis yang lebih akurat.

Rekomendasi peningkatan kinerja capaian output mencakup penetapan metode perhitungan capaian output, pemantauan periodik tingkat kemajuan aktivitas, percepatan pelaksanaan aktivitas relevan, serta optimalisasi koordinasi antar PPK dan pengelola kegiatan. Pengembangan capaian output tahun 2024 mencakup assessment RO untuk standardisasi pelaporan, penyederhanaan input data pada target kinerja satuan kerja, dan pemutakhiran data oleh satker dengan bimbingan unit eselon I.

Strategi optimalisasi mencakup penetapan target dan metode perhitungan capaian output, pemantauan berkala progres dan realisasi volume, disiplin dalam pengisian data capaian output sebelum batas waktu, peningkatan koordinasi antar PPK, serta monitoring status data pada aplikasi OMSPAN guna memastikan data telah terkonfirmasi. Dengan strategi ini, diharapkan capaian output dapat lebih terukur dan transparan, mendukung efektivitas pengelolaan anggaran Badan POM.



Gambar 3. 37 Sosialisasi OMSPAN Atas IKPA Serta Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target Dan Realisasi Capaian Output Pada Aplikasi Sakti Tahun 2024

IKU 4: PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISUSUN DENGAN SAP

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 4 adalah:

A. PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PUSAT DAN BALAI)



Gambar 3. 38 . Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan

Keuangan adalah untuk memberikan pemahaman kepada petugas pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di Badan POM yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan meliputi:

1. Memberikan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.
2. Memberikan pengayaan kepada Satuan Kerja tentang teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan yang sesyau dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- a) Memberikan kesamaan persepsi serta kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di badan POM yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- b) Tertibnya pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di Badan POM sebagai wujud pertanggungjawaban yang tertib, dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c) Merupakan kegiatan prioritas yang mendukung kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai standar PSAP.
- d) Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:
- e) Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa materi-materi yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.
- f) Melakukan Analisa terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja yang dibina.
- g) Menelusuri kebenaran dokumen sumber yang telah diinput.
- h) Memastikan bahwa rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilakukan dengan benar.

Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini dilaksanakan dengan mengirimkan 2 (dua) orang petugas pusat ke Satuan Kerja di seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Selama tahun 2024, kegiatan ini

dilaksanakan di Satker Balai Besar/Balai/Loka POM di Bengkulu, Aceh Tengah, Banda Aceh, Rejang Lebong, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Surakarta, Kediri, Tasikmalaya, Bandar Lampung, Jayapura, Batam, Medan, Palangkaraya, Banggai, Muara Bungo, Tanah Bumbu, Belitung, Palu dan Bandung.

B. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023 *Unaudited* berlangsung mulai dari tanggal 30 Januari s.d. 3 Februari 2024, bertempat di Hotel Double Tree Cikini, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah, Petugas BMN/persediaan Tingkat Wilayah. Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Petugas BMN/persediaan Tingkat Satker. Dalam pertemuan ini akan dibahas Laporan Keuangan 10 Satker Pusat dan 18 Laporan Keuangan Wilayah untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM, melalui proses:

- a) Verifikasi dan analisa hasil rekonsiliasi internal dan eksternal seluruh LK Wilayah dan Satker Pusat melalui aplikasi MONSAKTI.
- b) Klarifikasi dan konfirmasi peristiwa/kejadian penting yang telah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Wilayah dan Satker Pusat.
- c) Identifikasi informasi penting lainnya dari CaLK Wilayah dan Satker Pusat yang perlu dielaborasi dan diungkap dalam CaLK BPOM.





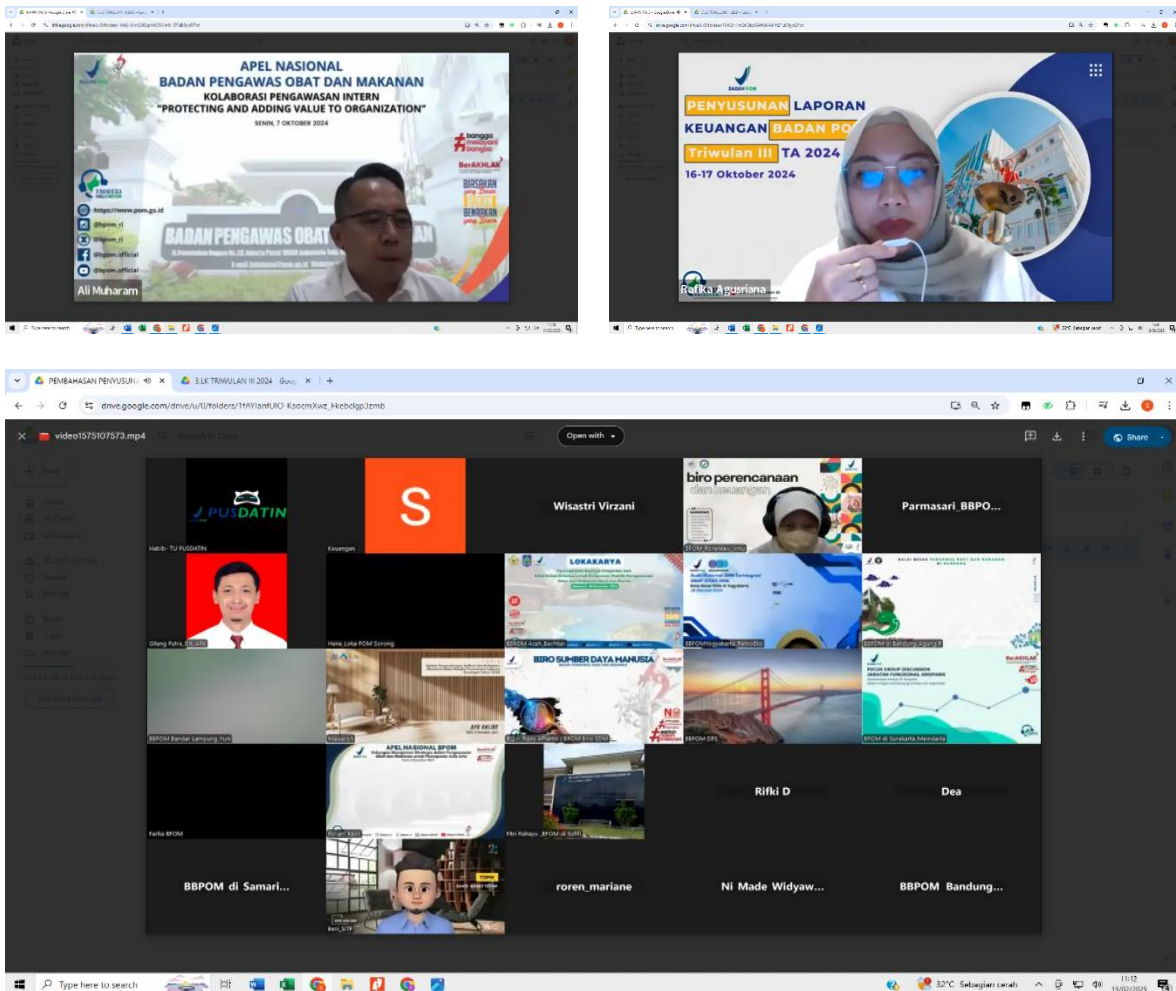
Gambar 3. 39 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2023 Unaudited

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan pada tanggal 17 - 19 Juli 2024. Kegiatan ini diselenggarakan secara Hybrid dimana Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Pusat dan UAPPA Wilayah melaksanakan secara luring di Hotel Grand Melia Jakarta dan Petugas penyusun LK Satker daerah secara zoom meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM selanjutnya terdapat paparan dari Inspektur Utama dan Narasumber dari Direktorat APK dan SITP, Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Dalam pertemuan ini dibahas 10 Laporan Keuangan Satker Pusat dan 18 Laporan Keuangan Wilayah untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM.



Gambar 3. 40 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2024

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan pada tanggal 16 - 18 Oktober 2024. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dimana Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan Satker Pusat, Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Daerah dan Satwil bergabung melalui zoom meeting. Dalam pertemuan ini dibahas 10 Laporan Keuangan Satker pusat dan 18 Laporan Keuangan Wilayah untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM.

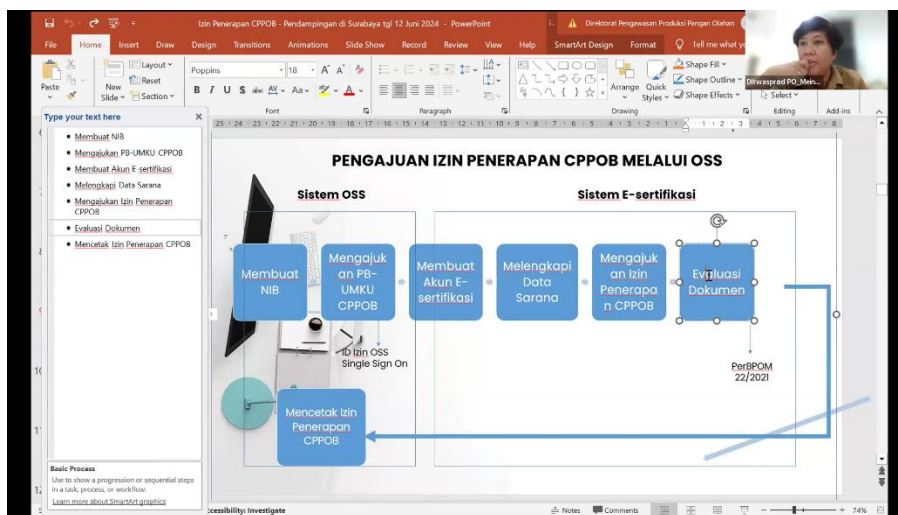


GAMBAR 3. 41 KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN POM TRIWULAN III TA 2024 (SECARA DARING)

C. REVIU KEBIJAKAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TERHADAP PENDAPATAN JASA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mengevaluasi penerapan kebijakan Pendapatan Diterima Dimuka (PDDM) terhadap Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sesuai rekomendasi BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPOM TA 2023, yang terkait dengan temuan "Sistem Informasi Pengelolaan PNBP dan Pelayanan Publik pada BPOM Belum Dapat Menyajikan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Secara Akurat", Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan beberapa intervensi. Selama periode Juni hingga Desember 2024, telah diadakan serangkaian pertemuan evaluasi kebijakan PDDM yang melibatkan seluruh unit kerja penghasil PNBP di lingkungan BPOM, Biro Hukum dan Organisasi, Pusdatin serta APIP. Pada kick-off meeting yang berlangsung pada 11 Juni 2024, hadir sebagai narasumber Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Direktorat PNBP KL, DJA, Kementerian Keuangan.

No	Uraian Jasa Pengawasan	Satuan Ukur	Tingkat Tarif
a.	Pencabutan Bares	Per Sertifikat Per Sarana	Rp. 500.000,00
b.	Perubahan	Per Sertifikat Per Sarana	Rp. 100.000,00
c.	Perpanjangan	Per Sertifikat Per Sarana	Rp. 250.000,00
T. Sertifikasi Ekspor dan Impor			
1. Surat Keterangan Impor			
a.	Dahulu baku	Per Item Produk	Rp. 50.000,00
b.	Produk jadi	Per Item Produk	Rp. 100.000,00
c.	Dahulu tambahkan	Per Item Produk	Rp. 50.000,00
2. Pemasangan kembali Melanisasi Jahar			
Klasifikasi Special Access Scheme untuk uji coba registrasi, riset, penemuan, penggunaan Paten Obat untuk keperluan Medis Klinis (PKM)			
3.	Surat Keterangan Ekspor (Certificate of Pharmaceutical Product) untuk obat	Per Item Produk	Rp. 50.000,00
4.	Surat Keterangan Ekspor (Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Certificate of Health, Surat Keterangan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang Baik, surat keterangan izin yang sesuai dengan persyaratan di negara tujuan ekspor untuk obat bahan alam, obat inaktiv, dan registrasi tradisional)	Per Item Produk	Rp. 0,00
5.	Surat Keterangan Ekspor (Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Certificate of Health, Surat Keterangan Sertifikat CPKB) untuk inonaktif	Per Item Produk	Rp. 0,00



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat dua jenis pendapatan yang diatur, yaitu Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Laporan Operasional (LO). Pendapatan LRA mencakup semua penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan menjadi hak pemerintah, sedangkan Pendapatan LO diakui sebagai penambah ekuitas pemerintah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Perbedaan pengakuan pendapatan LRA dan LO terletak pada basis pengakuannya, dimana Pendapatan LO diakui saat hak atas pendapatan timbul atau saat ada aliran masuk sumber daya, sementara Pendapatan LRA diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diterima di rekening kas umum negara.

PNBP Jasa Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pendapatan nonperpajakan yang diterima BPOM atas pemberian layanan kepada pihak ketiga, dengan pengakuan pendapatan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Buletin Teknis Nomor 23 tentang Pendapatan Nonperpajakan. Pengakuan pendapatan ini dapat dicatat baik sebagai Pendapatan LO maupun Pendapatan LRA, tergantung pada kondisi yang berlaku. BPOM diberikan kebebasan untuk memilih kebijakan akuntansi pendapatan yang digunakan, baik dicatat di awal transaksi atau di akhir. Untuk mengurangi kompleksitas dan piutang PNBP, KSAP dan Kemenkeu menyarankan untuk mencatat pendapatan di awal. Apabila pembayaran dilakukan untuk layanan yang mencakup beberapa periode, pendapatan diakui sesuai dengan masa layanan yang diberikan. Pengendalian atas kebijakan ini diserahkan kepada BPOM, dengan pengendalian internal yang lebih ketat diberlakukan pada layanan dengan risiko lebih tinggi.

Sistem pengelolaan PNBP dan aplikasi layanan publik yang digunakan BPOM juga perlu diperhatikan. Untuk memitigasi risiko salah saji pendapatan LO atas PNBP Jasa Pengawasan Obat dan Makanan serta mengantisipasi revisi PP 32 Tahun 2017, BPOM akan mempersiapkan sistem informasi PNBP yang lebih optimal, baik melalui aplikasi layanan publik maupun e-payment. Dalam hal ini, setiap unit kerja penghasil PNBP diminta untuk mengevaluasi setiap jenis layanan PNBP, sesuai dengan draft Revisi PP 32 Tahun 2017 dan PMK 73 Tahun 2024 mengenai Jenis dan Tarif atas PNBP yang Bersifat Volatil yang Berlaku di BPOM. Evaluasi ini meliputi amanat peraturan perundang-undangan, *Service Level Agreement (SLA)*, progres penyelesaian pekerjaan, serta integrasi aplikasi layanan publik dengan e-payment untuk perhitungan akrual dan penerbitan kode billing.

Hasil pembahasan dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusdatin, serta unit kerja penghasil PNBP menunjukkan bahwa untuk pengembangan aplikasi yanblik BPOM

pada TA 2024, progres penyelesaian pekerjaan masih mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 150 Tahun 2024 tentang Juklak Pengelolaan PNBPN di Lingkungan BPOM. Draft revisi Juklak PNBPN akan difinalkan setelah revisi PP 32 Tahun 2017 disahkan. Secara paralel, Pusdatin dan unit kerja penghasil PNBPN juga terus melakukan penyempurnaan integrasi aplikasi layanan publik dengan e-payment agar dapat mengakomodasi perhitungan PNBPN secara akrual untuk setiap jenis layanan publik, termasuk yang akan diatur dalam revisi PP 32 Tahun 2017.

SASARAN KEGIATAN 2:

MENINGKATNYA KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 5: INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 5 adalah:

A. SURVEI KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Gambar 3. 42
LAPORAN BIRO
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN TAHUN
2024

Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM sebagai unit kerja Eselon II memiliki mandat strategis dalam merancang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022. Komitmen untuk menjaga mutu layanan internal kepada unit-unit kerja dilakukan melalui pengukuran kepuasan layanan secara berkala, termasuk pada Triwulan IV Tahun 2024.

Survei ini bertujuan mengevaluasi kualitas penyelenggaraan layanan serta interaksi pegawai dalam memberikan layanan kepada unit kerja di lingkungan BPOM, baik di pusat maupun UPT. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui

kuesioner yang dibagikan mulai 6 Januari hingga 6 Februari 2025.

a. Metodologi dan Responden

Survei menggunakan skala Likert 1–4, dengan bobot sebagai berikut:

- 1 = Kurang (25 poin)
- 2 = Cukup (50 poin)
- 3 = Baik (75 poin)
- 4 = Sangat Baik (100 poin)

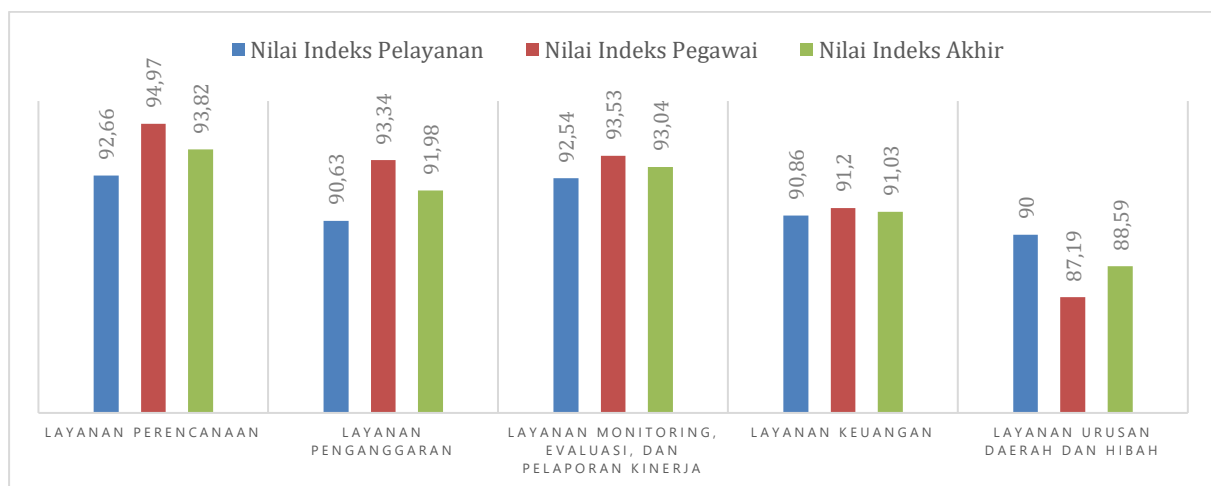
Total responden sebanyak 121 orang, berasal dari Unit Pusat (35%), Balai Besar/Balai POM (39%), dan Loka POM (26%). Mayoritas responden berusia di bawah 35 tahun dan telah bekerja selama 6–15 tahun.

b. Hasil Penilaian Layanan

Tabel 3. 1 Hasil Penilaian Layanan Setiap Fungsi

No.	Jenis Layanan	Nilai Indeks Pelayanan	Nilai Indeks Pegawai	Nilai Indeks Akhir	Kategori
1	Layanan Perencanaan	92,66	94,97	93,82	Sangat Baik
2	Layanan Penganggaran	90,63	93,34	91,98	Sangat Baik
3	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	92,54	93,53	93,04	Sangat Baik
4	Layanan Keuangan	90,86	91,20	91,03	Sangat Baik
5	Layanan Urusan Daerah dan Hibah	90,00	87,19	88,59	Sangat Baik
Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan				91,69	Sangat Baik

Dari hasil laporan tersebut dapat disimpulkan Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **91,69** (Sembilan Puluh Satu koma Enam Puluh Sembilan) dalam hal ini masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.



Gambar 3. 43 Grafik Perbandingan Hasil Penilaian Layanan antar Fungsi

c. Kesimpulan Umum

Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 91,69, masuk dalam kategori Sangat Baik. Secara umum, seluruh fungsi layanan memperoleh nilai di atas 88 dan menunjukkan peningkatan kualitas layanan secara konsisten. Pelayanan yang cepat, komunikatif, dan bebas dari gratifikasi menjadi indikator utama yang dipertahankan. Meski demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek sinergi antartim, peningkatan literasi keuangan di daerah, serta penyederhanaan sistem pelaporan.

Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan demi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

B. SURVEI INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) ANGKA YANG MENUNJUKKAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

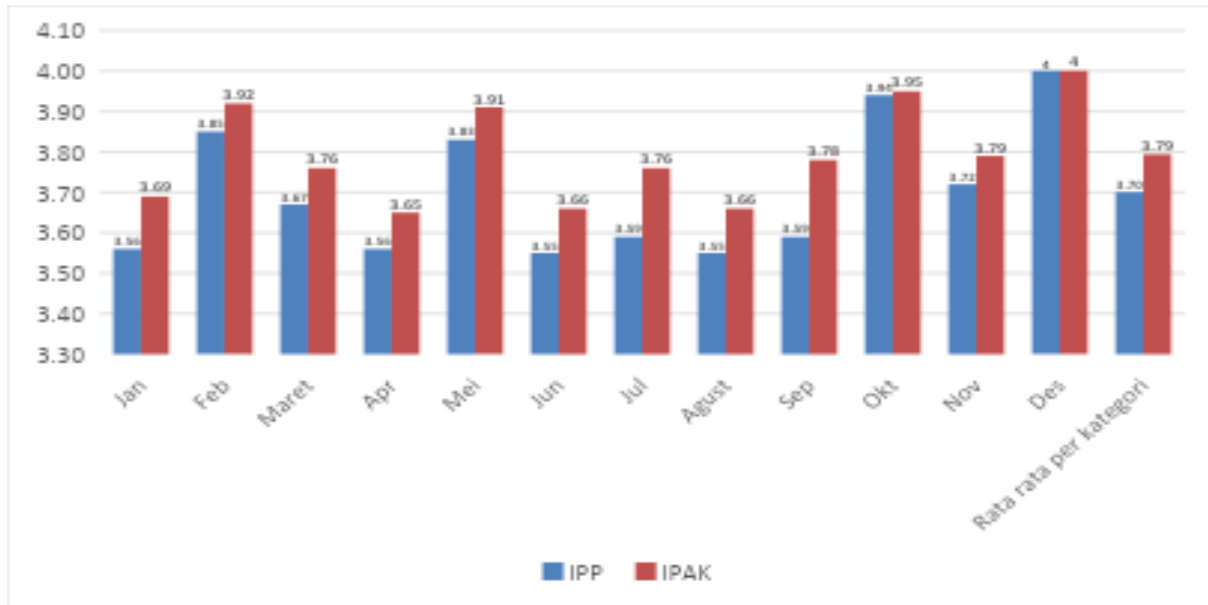
Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan Survei IPP/IPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

Biro Perencanaan dan Keuangan, yang berada di bawah Sekretariat Utama BPOM, melaksanakan survei bulanan IPP dan IPAK sebagai bagian dari evaluasi kualitas layanan dan implementasi budaya antikorupsi. Survei ini mendukung pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan, perhitungannya dengan menggunakan IPP mempunyai target sebesar

3,85. Dari hasil perhitungan IPP bulan Desember 2024 maka capaian indikator dimaksud sebesar **101,01%**, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut perbaikan.

Trend hasil survei IPP IPAK Bulan Januari – Desember 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.44.**



Gambar 3. 44 Trend Hasil Survei IPP IPAK Bulan Januari – Desember 2024 Versi Baru

Pada **Gambar 3.44** hasil survei IPP selama periode Januari s.d Desember 2024, nilai indeks rata-rata pada **IPP** sebesar **3,70** dan **IPAK** sebesar **3,79**. Untuk pencapaian tertinggi nilai IPP dan IPAK adalah pada bulan Oktober selama tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 3:

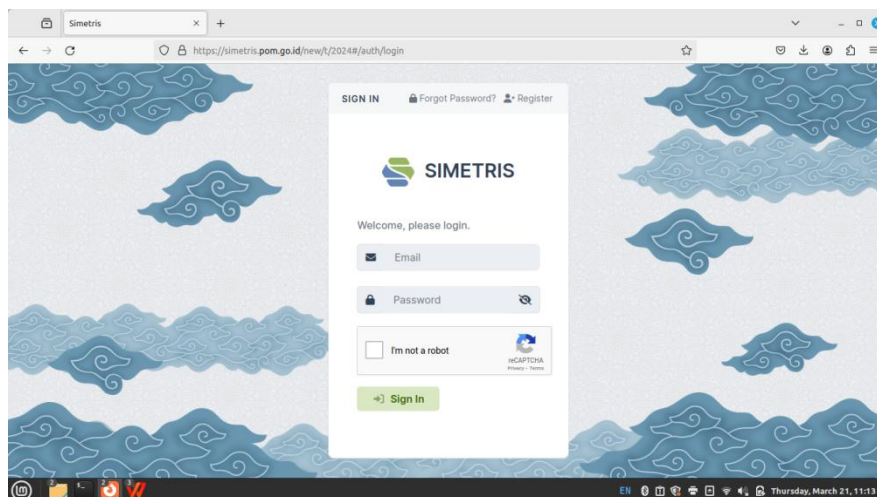
MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER SESUAI PEDOMAN

IKU 6: PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER TERHADAP PEDOMAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 6 adalah:

A. PENGEMBANGAN APLIKASI *E-PLANNING SIMETRIS*

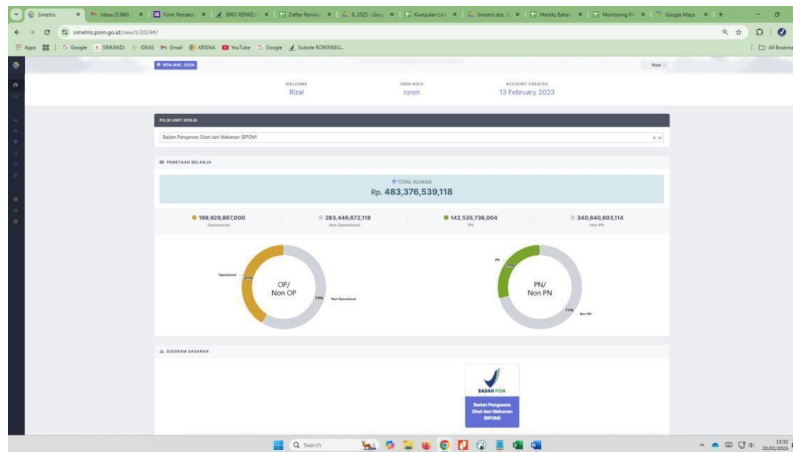
Aplikasi SIMETRIS atau Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi adalah aplikasi berbasis Web Base yang dapat diakses dari berbagai lokasi melalui jaringan internet. e-Planning SIMETRIS merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem *bottom-up planning* dan *topdown policy* yang efektif dan efisien berbasiskan Teknologi Informasi sebagai bagian dari pelaksanaan *e-Government*. Pada prinsipnya pembangunan Aplikasi e-planning SIMETRIS untuk mempermudah proses Perencanaan Strategis dan Tahunan di BPOM.



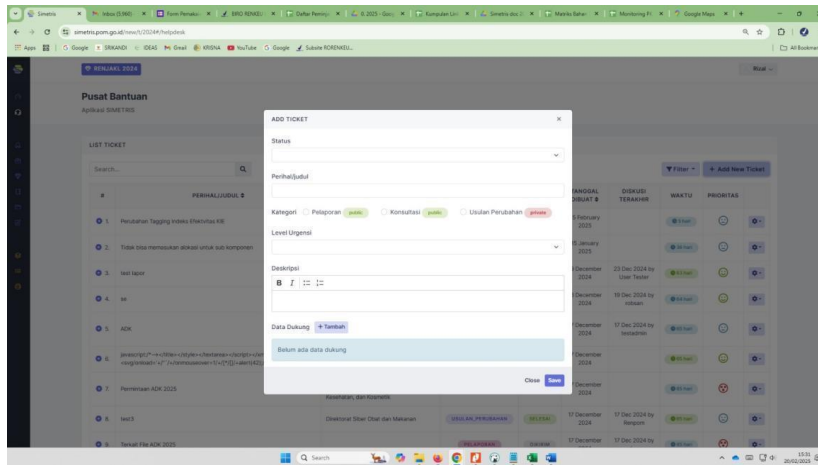
Gambar 3. 45 Tampilan login baru SIMETRIS

Pengembangan Aplikasi SIMETRIS tahun 2024 difokuskan pada penyempurnaan aplikasi sebelumnya dan integrasi data dengan aplikasi KRISNA yang merupakan aplikasi Supra Sistem dari Kementerian PPN/Bappenas sehingga penyusunan rancangan kerja awal Renja dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pengembangan Aplikasi SIMETRIS ini meliputi perbaikan dan pengembangan beberapa fungsi yang meliputi *redesign dashboard*, pengembangan pusat bantuan, pengembangan modul manual IKU dan manual RO (khusus untuk UPT), pengembangan modul rivi indikator pada PK/RAPK, pengembangan modul matriks/rekapitulasi dengan penambahan fungsi generate matriks A2.

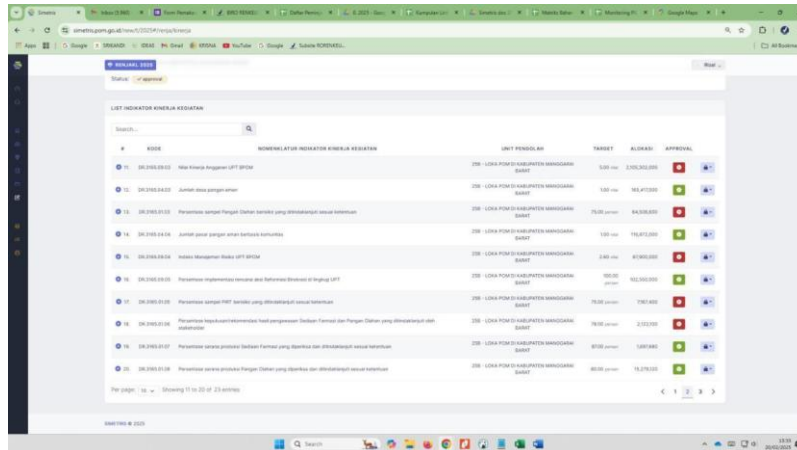
Pada pengembangan tampilan dashboard SIMETRIS user dapat melihat untuk pemetaan belanja dan diagram sasaran dari hasil penginputan SIMETRIS. *User* dapat melakukan koordinasi seperti pelaporan, konsultasi, atau melakukan usulan perubahan melalui menu Pusat Bantuan. Manual IKU dan Manual RO untuk UPT pada aplikasi Simetris setelah dilakukan pengembangan diinputkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengurangi kesalahan input dari UPT. Pada pengembangan ini juga memudahkan *user* Roren dalam melakukan reviu target PK/RAPK yang diinputkan oleh operator Unit Kerja/ Satuan kerja. Aplikasi Simetris juga sudah dapat mengakomodir dalam pembuatan Matriks A2 untuk user.



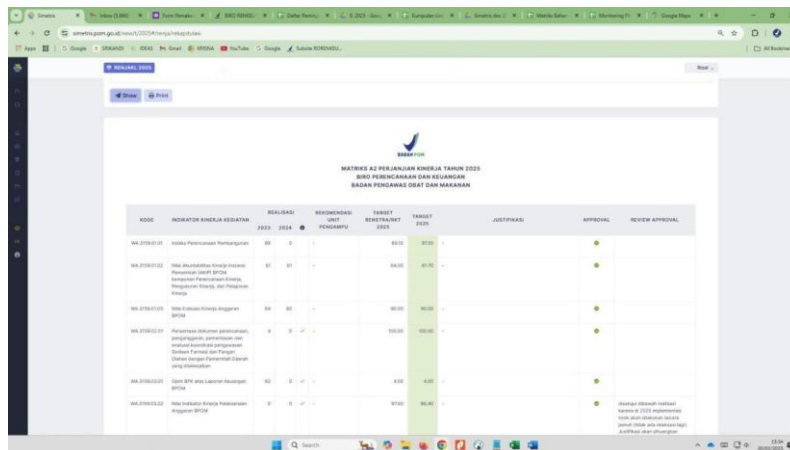
Gambar 3. 46 Tampilan *Dashboard* SIMETRIS



Gambar 3. 47 Tampilan Pusat Bantuan



Gambar 3. 48 Tampilan reviu PK/RAPK



Gambar 3. 49 Tampilan Matriks A2

Pada tahun 2024 ini pengembangan e-Planning SIMETRIS telah lolos *System Integration Testing* (SIT) dan *User Acceptance Test* (UAT) sehingga dapat masuk ke dalam serve SIMETRIS yang sudah ada di Pusat Data Nasional (PDN) untuk dilakukan Publikasi dan dimanfaatkan oleh user.

B. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIT ORGANISASI / SATKER DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2025-2029

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) K/L 2020-2024, serta merupakan tahun momentum transisi perencanaan pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 serta Renstra K/L (BPOM) 2025-2029. Dalam rangka persiapan penyusunan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi/Satker pada tanggal 19-20 September 2024 yang diselenggarakan di Hotel Sari Pacific Jakarta, diikuti sebanyak 181 peserta dari Unit Pusat maupun UPT BPOM.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dan arahan dari Sekretaris Utama BPOM. Kegiatan ini juga melibatkan narasumber pihak eksternal Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dan Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan – Kementerian PPN/Bappenas, serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kegiatan ini terdiri dari pemaparan narasumber eksternal serta pembentukan kelompok untuk melakukan sebuah diskusi terkait penyusunan Renstra.

Adanya kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel. Pada kegiatan ini akan memberikan gambaran konseptual dan teknis tentang analisis SWOT, kerangka logis (*logical framework*), perumusan indikator SMART, dan penetapan target, serta memastikan *cascading* sasaran dan indikator telah disusun dari level organisasi hingga unit kerja.



Gambar 3. 50 Kegiatan Bimtek penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) K/L 2020-2024

C. PENYUSUNAN DOKUMEN RKT DAN PK/RAPK SATKER

Sebagai wujud implementasi atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukannya penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi PK (RAPK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2024 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2025. Tujuan ditetapkannya RKT, PK, dan RAPK adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM pada Tahun Anggaran 2024.

<p>BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA</p> <p>Jl. Tompeweyan I, Tegalejo, Yogyakarta Kode Pos 55244 Telp. (0274) 561038, Tel/Fax : (0274) 519052/ULPK Telp./Fax (0274) 552250 Email : bpom_yogyakarta@pom.go.id ; Web site : www.pom.go.id</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA NOMOR PR.06.01.10A.09.24.05 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Tahun 2025;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Tahun 2025;</p> <p>Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</p>	<p style="text-align: center;">- 4 -</p> <p>LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA NOMOR PR.06.01.10A.09.24.05 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2025</p> <p style="text-align: center;">RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta</td> <td>Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="1">2</td> <td rowspan="1">Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor</td> <td>Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="1">3</td> <td rowspan="1">Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan</td> <td>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET																						
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100																						
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26																						
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100																						
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100																						
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100																						
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100																						
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100																						

Gambar 3. 51 RKT SATKER

<p style="text-align: center;">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR POM DI JAKARTA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Sofyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta</p> <p>Selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS. Jabatan : PII. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p> <p>Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 22 Desember 2023</p> <p>Pihak Pertama: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Pihak Kedua: PII. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>Sofyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.</p>	<p>Lampiran</p> <p style="text-align: center;">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR POM DI JAKARTA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT</td> <td>01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat</td> <td>87,5</td> </tr> <tr> <td>02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat</td> <td>96,5</td> </tr> <tr> <td>03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</td> <td>92,5</td> </tr> <tr> <td>05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">2.</td> <td rowspan="6">02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT</td> <td>01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</td> <td>90,9</td> </tr> <tr> <td>03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</td> <td>98,7</td> </tr> <tr> <td>04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>06 - Indeks Pelayanan Publik</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3.</td> <td rowspan="3">03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi</td> <td>07 - Persentase UMMW yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>08 - Persentase Keterlibatan LPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>01 - Tingkat Efektivitas KE Obat dan Makanan</td> <td>96,7</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5	02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5	03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,9	03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,7	04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	06 - Indeks Pelayanan Publik	4,9	3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	07 - Persentase UMMW yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100	08 - Persentase Keterlibatan LPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	01 - Tingkat Efektivitas KE Obat dan Makanan	96,7
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																																				
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja LPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5																																				
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5																																				
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83																																				
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5																																				
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85																																				
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93																																				
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,9																																				
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,7																																				
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78																																				
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80																																				
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4,9																																				
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	07 - Persentase UMMW yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100																																				
		08 - Persentase Keterlibatan LPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95																																				
		01 - Tingkat Efektivitas KE Obat dan Makanan	96,7																																				

Gambar 3. 52 Perjanjian Kinerja (PK) Satker

D. SOSIALISASI PENYUSUNAN PK DAN RAPK UNIT ORGANISASI / SATKER MELALUI APLIKASI E-PLANNING SIMETRIS



Sebagai wujud implementasi atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukannya penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana

Aksi PK (RAPK). Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyelenggarakan sosialisasi Penyusunan PK dan RAPK 2025 yang diselenggarakan tanggal 18 Desember 2024 secara hybrid daring dan luring di Grand Mercure Jakarta Kemayoran bersama seluruh Satuan Kerja di lingkup Badan POM. PK dan RAPK disusun melalui aplikasi Simetris e-Planning dengan melakukan pemetaan dukungan alokasi anggaran seluruh sub-komponen terhadap indikator kinerja kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Pada kegiatan tersebut juga dilakukan launching Aplikasi Simetris (e-Planning) 2.1, Adapun pengembangan yang dilakukan berupa penambahan Fitur Pusat Bantuan, Redesign Dashboard dan Penyediaan Menu Diagram Sasaran.



Gambar 3. 53 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi e-planning SIMETRIS

E. ASISTENSI DAN SUPERVISI PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM

Perencanaan merupakan proses tahap awal dalam menyusun target indikator dan sinkronisasi atas Anggaran pada Tahun-n berjalan dalam pencapaian suatu program untuk dielaborasi pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program guna mengidentifikasi masalah serta penyebabnya. Siklus manajemen kinerja mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan Tindakan dalam pelaksanaannya. Selain itu, tahap Perencanaan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada instansi pemberi dana atau pemilik program/kegiatan serta sarana komunikasi dalam melaporkan bentuk program kepada *stakeholder* dan masyarakat sebagai ketetapan terhadap kebijakan dan program yang sedang berjalan.

Keberhasilan sebuah perencanaan bergantung kepada hasil dari pelaksanaan dan monev yang terdiri dari beberapa faktor, di antaranya pemanfaatan informasi yang diperoleh, kualitas informasi yang dihasilkan, serta kesinambungan dalam perencanaan ke depan. Seluruh capaian kinerja dan anggaran yang telah dilaporkan oleh unit kerja pusat dan UPT menjadi sumber data utama dalam penyusunan buku kinerja Badan POM yang dibuat setiap triwulan. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaporan, seperti ketidaksesuaian dengan pedoman, keterlambatan dalam penyampaian laporan, kepatuhan terhadap pelaporan, serta kurangnya pemahaman mengenai definisi operasional.

Oleh karena itu, sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam melakukan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Mengingat program Pengawasan Obat dan Makanan tidak didesentralisasikan, diperlukan pendampingan dari pusat terhadap program yang dijalankan oleh UPT BPOM. Apa yang sudah direncanakan kemudian di-monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas pusat juga menjadi proses pembelajaran bagi Balai Besar/Balai POM agar dapat melaksanakan monitoring secara mandiri sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern.

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan supervisi secara regional dengan rincian UPT di tiap regional sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Asistensi dan Supervisi Perencanaan

Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta (@1 orang)	Tanggal Pelaksanaan
Regional 1	Balai Besar POM di Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar POM di Mataram 2. Balai Besar POM di Manado 3. Balai Besar POM di Makassar 4. Balai POM di Gorontalo 5. Balai POM di Kendari 6. Balai POM di Mamuju 7. Balai POM di Palu 8. Balai POM di Palopo 9. Loka POM di Kabupaten Banggai 10. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 11. Loka POM di Kota Baubau 12. Balai POM di Surakarta 	28 - 31 Mei 2024
Regional 2	Balai Besar POM di Batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar POM di Bandung 2. Balai Besar POM di Jakarta 3. Balai Besar POM di Pontianak 4. Balai Besar POM di Banjarmasin 5. Balai Besar POM di Palangka Raya 6. Balai Besar POM di Samarinda 7. Balai POM di Tarakan 8. Loka POM di Kabupaten Tabalong 9. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 10. Loka POM di Kabupaten Sanggau 11. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu 12. Loka POM di Kota Balikpapan 13. Loka POM di Kabupaten Sambas 	25 - 28 Juni 2024

Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta (@1 orang)	Tanggal Pelaksanaan
Regional 3	Balai Besar POM di Ambon	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Bandar Lampung Balai Besar POM di Palembang Balai POM di Batam Balai POM di Bengkulu Balai POM di Jambi Balai POM di Pangkalpinang Balai POM di Manokwari Loka POM di Kabupaten Belitung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Loka POM di Kabupaten Tulangbawang Loka POM di Kota Lubuklinggau Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Sorong 	24 - 25 Juli 2024
Regional 4	Balai Besar POM di Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Jayapura Balai Besar POM di Semarang Balai POM di Kupang Balai POM di Mamuju Loka POM di Kabupaten Bima Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Loka POM di Kabupaten Merauke Loka POM di Kabupaten Ende Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 	22 – 23 Agustus 2024
Regional 5	Balai Besar POM di Aceh	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Pekanbaru Baru 	25 - 26 September 2024

Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta (@1 orang)	Tanggal Pelaksanaan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Balai Besar POM di Surabaya 3. Balai Besar POM di Serang 4. Balai Besar POM di Medan 5. Balai POM di Jambi 6. Balai POM di Jember 7. Balai POM di Kediri 8. Balai POM di Bogor 9. Balai POM di Tasikmalaya 10. Balai POM di Tangerang 11. Loka TaPOM di Kabupaten Banyumas 12. Loka POM di Kabupaten Bungo 13. Loka POM di Kabupaten Buleleng 14. Loka POM di Kota Tanjungbalai 	
Regional 6	Balai Besar POM di Samarinda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar POM di Banda Aceh 2. Balai Besar POM di Padang 3. Balai Besar POM di Denpasar 4. Balai Besar POM di Samarinda 5. Balai POM di Payakumbuh 6. Balai POM di Tarakan 7. Loka POM di Kabupaten Toba 8. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 9. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 10. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 11. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 12. Loka POM di Kota Dumai 	22 - 25 Oktober 2024

Dalam setiap pelaksanaan supervisi perencanaan secara regional, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah paparan capaian anggaran dan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan; diskusi terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, beserta rencana tindak lanjut; kemudian evaluasi entri data capaian kinerja dan anggaran UPT baik pada aplikasi *monev online* (Bappenas, Smart DJA, Simetris modul RHPK dan Simetris modul E-Performance) maupun pelaporan manual (Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal). Dengan adanya kegiatan monitong dan supervisi ini diperoleh pola pencapaian keberhasilan suatu kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh UPT BPOM serta mempermudah deteksi dan identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sedini mungkin sehingga alternatif untuk penyelesaian masalah penyebab terhambatnya pencapaian indikator dapat segera ditemukan.



(A)



(B)



(C)



(D)

F. MONEV PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan; menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program; serta memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.



Gambar 3. 54 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Reformasi Birokrasi

Sampai saat ini, pelaksanaan monev di BPOM telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dengan beberapa tabel yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Pelaporan kinerja dari unit kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan LOKA POM diatur berdasarkan Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 192 Tahun 2022. Monev unit kerja di Pusat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap triwulan bersama penanggung jawab data dari unit kerja baik luring maupun daring untuk menyampaikan capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi.

Hasil dari pertemuan ini disusun menjadi Laporan Kinerja dalam Angka Triwulanan dan Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Fisik, Hambatan Pelaksanaan Kegiatan beserta Rencana Tindak Lanjut Per Triwulan.



Gambar 3. 55 Laporan Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulanan

G. MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/BALAI POM

Monev (Monitoring dan Evaluasi) merupakan proses review perkembangan dan pencapaian suatu program atau kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah serta penyebabnya. Siklus manajemen monev mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan. Dalam pelaksanaannya, monev berfungsi sebagai alat pembelajaran dengan memberikan bukti dan data yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Selain itu, monev juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada instansi pemberi dana atau pemilik program/kegiatan serta sarana komunikasi dalam melaporkan hasil program kepada stakeholder dan masyarakat sebagai umpan balik terhadap kebijakan dan program yang sedang berjalan.

Keberhasilan monev bergantung pada beberapa faktor, di antaranya pemanfaatan informasi yang diperoleh, kualitas informasi yang dihasilkan, serta kesinambungan dalam perencanaan ke depan. Seluruh capaian kinerja dan anggaran yang telah dilaporkan oleh unit kerja pusat dan UPT menjadi sumber data utama dalam penyusunan buku kinerja Badan POM yang dibuat setiap triwulan. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaporan, seperti ketidaksesuaian dengan pedoman, keterlambatan dalam penyampaian laporan, kepatuhan terhadap pelaporan, serta kurangnya pemahaman mengenai definisi operasional.

Oleh karena itu, sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Mengingat program Pengawasan Obat dan Makanan tidak didesentralisasikan, diperlukan pengawasan dari pusat terhadap program yang dijalankan oleh UPT BPOM. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas pusat juga menjadi proses pembelajaran bagi Balai Besar/Balai POM agar dapat melaksanakan monitoring secara mandiri sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern.

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan supervisi secara regional dengan rincian UPT di tiap regional sebagai berikut:

Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta (@1 orang)	Tanggal Pelaksanaan
Regional 1 (A)	Balai Besar POM di Bandung	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Mataram Balai Besar POM di Manado Balai Besar POM di Makassar Balai POM di Gorontalo Balai POM di Kendari Balai POM di Mamuju Balai POM di Palu Balai POM di Palopo Loka POM di Kabupaten Banggai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Loka POM di Kota Baubau Balai POM di Surakarta 	28 - 31 Mei 2024
Regional 2 (B)	Balai Besar POM di Batam	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Bandung Balai Besar POM di Jakarta Balai Besar POM di Pontianak Balai Besar POM di Banjarmasin Balai Besar POM di Palangka Raya Balai Besar POM di Samarinda Balai POM di Tarakan Loka POM di Kabupaten Tabalong Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Loka POM di Kabupaten Sanggau Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Loka POM di Kota Balikpapan Loka POM di Kabupaten Sambas 	25 - 28 Juni 2024
Regional 3 (C)	Balai Besar POM di Ambon	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Bandar Lampung Balai Besar POM di Palembang Balai POM di Batam Balai POM di Bengkulu Balai POM di Jambi Balai POM di Pangkalpinang Balai POM di Manokwari Loka POM di Kabupaten Belitung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Loka POM di Kabupaten Tulangbawang Loka POM di Kota Lubuklinggau Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Sorong 	24 - 25 Juli 2024
Regional 4 (D)	Balai Besar POM di Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Balai Besar POM di Jayapura Balai Besar POM di Semarang Balai POM di Kupang Balai POM di Mamuju Loka POM di Kabupaten Bima Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 	22 - 23 Agustus 2024

Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta (@1 orang)	Tanggal Pelaksanaan
		7. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur 8. Loka POM di Kabupaten Merauke 9. Loka POM di Kabupaten Ende 10. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 11. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
Regional 5	Balai Besar POM di Aceh	1. Balai Besar POM di Pekanbaru 2. Balai Besar POM di Surabaya 3. Balai Besar POM di Serang 4. Balai Besar POM di Medan 5. Balai POM di Jambi 6. Balai POM di Jember 7. Balai POM di Kediri 8. Balai POM di Bogor 9. Balai POM di Tasikmalaya 10. Balai POM di Tangerang 11. Loka TaPOM di Kabupaten Banyumas 12. Loka POM di Kabupaten Bungo 13. Loka POM di Kabupaten Buleleng 14. Loka POM di Kota Tanjungbalai	25 - 26 September 2024
Regional 6	Balai Besar POM di Samarinda	1. Balai Besar POM di Banda Aceh 2. Balai Besar POM di Padang 3. Balai Besar POM di Denpasar 4. Balai Besar POM di Samarinda 5. Balai POM di Payakumbuh 6. Balai POM di Tarakan 7. Loka POM di Kabupaten Toba 8. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 9. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 10. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 11. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 12. Loka POM di Kota Dumai	22 - 25 Oktober 2024

Dalam setiap pelaksanaan monev secara regional, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah paparan capaian anggaran dan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan; diskusi terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, beserta rencana tindak lanjut; kemudian evaluasi entri data capaian kinerja dan anggaran UPT baik pada aplikasi monev *online* (Bappenas, Smart DJA, Simetris modul RHPK dan Simetris modul E-Performance) maupun pelaporan manual (Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal). Dengan adanya kegiatan monitong dan supervisi ini diperoleh pola pencapaian keberhasilan suatu kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh UPT BPOM serta mempermudah deteksi dan identifikasi masalah-masalah yang timbul

dalam pelaksanaan kegiatan sedini mungkin sehingga alternatif untuk penyelesaian masalah penyebab terhambatnya pencapaian indikator dapat segera ditemukan.



(A)



(B)



(C)



(D)

H. PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN (JUKLAK) DAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) TAHUN 2024

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dan dituangkan dalam RKAKL, DIPA, dan POK tahun anggaran 2024 dalam proses pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan uraian, sifat dan proses yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, sehingga dalam implementasinya petunjuk teknis tidak dapat dipisahkan dari petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan POM.



Gambar 3. 56 Buku petunjuk pelaksanaan anggaran ta 2024

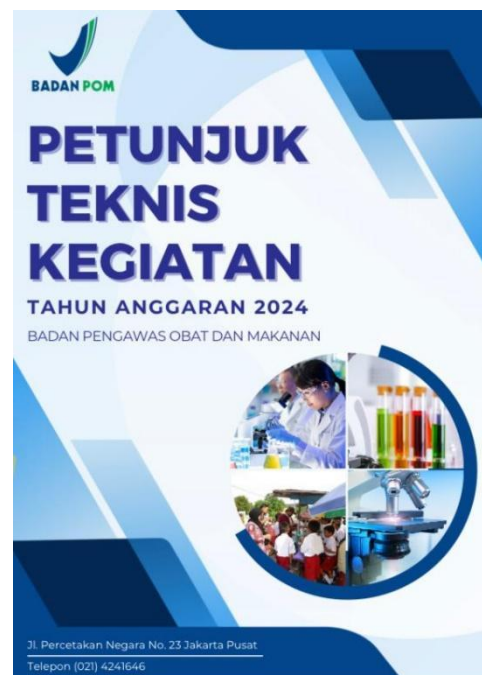
Petunjuk pelaksanaan tahun anggaran 2024 ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan secara terus menerus. Petunjuk teknis kegiatan tahun anggaran 2024 merupakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya bagi Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia utamanya untuk kegiatan yang pelaksanaannya terpadu dengan unit yang ada di pusat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Juklak akan dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024, Peraturan Menteri

Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL, SE tentang Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2024 serta peraturan lainnya terkait pelaksanaan anggaran yang akan ditetapkan kemudian sehingga dapat membantu para pengelola anggaran dalam melaksanakan DIPA tahun 2024. Sedangkan petunjuk teknis berisi tentang uraian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang secara substansial terkait dengan kebijakan ditingkat pusat dimaksudkan untuk memberikan arahan/acuan pelaksanaan kegiatan bersifat teknis pada satker pusat dan daerah.

Output dari pertemuan ini adalah buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan buku Petunjuk Teknis Tahun 2024 yang akan dicetak dan disampaikan kepada seluruh Satker di Lingkungan BPOM.

Pertemuan pembahasan penyusunan draft Juklak dan Juknis dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2024 membahas penyusunan draft Juklak dan penyusunan draft Juknis serta finalisasi Juklak



Gambar 3. 57 Buku Petunjuk Teknis Kegiatan TA 2024

pada tanggal 16 – 17 Januari 2024 di Hotel Aston Bekasi secara *hybrid* (daring dan luring) dengan mengundang Narasumber Kementerian Keuangan, perwakilan Unit Eselon II Pusat serta UPT.



Gambar 3. 58 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2024

I. PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM

Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Balai Besar/Balai POM dilakukan melalui kegiatan visitasi/kunjungan asistensi penganggaran dan asistensi penyusunan RKA-K/L di beberapa Balai Besar/Balai POM serta Loka POM yang diidentifikasi membutuhkan asistensi lebih lanjut, yaitu Balai Besar/Balai POM di Palu, Mamuju, Ambon, Semarang, Pekanbaru, Manokwari, Gorontalo, Yogyakarta, Tangerang, Bogor, Banda Aceh, Palembang, Lampung, Tasikmalaya, Samarinda. Asistensi ke Loka POM di Toba Samosir, Banyumas pada rentang waktu Februari hingga Desember 2024.

Tujuan dari dilaksanakannya asistensi adalah melakukan verifikasi dan *rapid appraisal* terhadap usulan BB/Balai POM dan Loka POM terkait rencana kerja dan anggaran di 2025 baik yang sudah termuat dalam RKA-K/L maupun belum tertampung dalam RKA-K/L 2025. Pendampingan/asistensi RKA-K/L maupun asistensi penganggaran kepada unit Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dilaksanakan oleh pejabat/staf dari Tim Koordinator Fungsi Penganggaran ke Balai Besar/Balai POM dan Loka POM selama 2 sampai 3 hari per kunjungan.



Gambar 3. 59 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM di Gorontalo, 28 Februari – 1 Maret 2024



Gambar 3. 60 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Samarinda, 22 – 25 Oktober 2024.



Gambar 3. 61 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Loka POM di Banyumas, 6 – 8 November 2024.



Gambar 3. 62 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Loka POM Toba Samosir, 13 – 15 November 2024.

J. SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Komisi IX DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan dan Kunjungan Kerja Spesifik. Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait dalam rangka Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI antara lain :

- ✓ Kunker Reses ke Batam, Tanjung Pinang, Bintan pada tanggal 28 – 29 Februari 2024.
- ✓ Kunker Spesifik ke Bogor, Tangerang Selatan, Depok pada tanggal 21 Maret 2024.
- ✓ Kunker Reses ke Provinsi Bali, Badung, Gianyar, Tabanan pada tanggal 10 - 11 Mei 2024.
- ✓ Kunker Reses ke Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Minahasa Utara, Bitung pada tanggal 16 – 17 Juli 2024.

- ✓ Kunker Panja Pengawasan mengenai Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat, Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji ke Medan dan Denpasar pada tanggal 12 September 2024.
- ✓ Kunker Spesifik ke Tangerang Selatan pada tanggal 19 September 2024.
- ✓ Kunker Spesifik ke Bogor pada tanggal 1 November 2024.
- ✓ Kunker Spesifik ke Bogor, Bekasi, Tangerang pada tanggal 7 November 2024.
- ✓ Kunker Reses ke Balikpapan, Surabaya, Pekanbaru pada tanggal 9 – 10 Desember 2024.

Kegiatan ini merupakan pendampingan kunjungan kerja Anggota Komisi IX oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPOM. Kegiatan ini dilakukan sejumlah 22 kali yang dilaksanakan pada rentang waktu Februari hingga Desember 2024.



Gambar 3. 63 Suasana Diskusi dan Tanya Jawab dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun 2023-2024 di Kota Batam, 29 Februari 2024



Gambar 3. 64 Suasana Diskusi dan Tanya Jawab dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun 2023-2024 di Kabupaten Bintan, 29 Februari 2024



Gambar 3. 65 Kunjungan Kerja ke Pasar Modern BSD, Tangerang Selatan, 21 Maret 2024



Gambar 3. 66 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, 14 – 17 Juli 2023 & Kunjungan Kerja ke Pasar Cibinong, 21 Maret 2024



Gambar 3. 67 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 28 – 29 Maret 2023 & Kunjungan Kerja ke Pasar Depok Jaya, 21 Maret 2024

**K. PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA KERJA
BADAN POM**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setiap penggunaan APBN memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR-RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi anggaran. Sesuai pembagian tugas komisi, BPOM bermitra dengan Komisi IX DPR-RI yang memiliki lingkup tugas Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Koordinasi dan persetujuan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP dapat dilakukan dengan tujuan pendalaman dan persetujuan anggaran serta RDP yang bertujuan khusus seperti tindak lanjut isu yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun bahan paparan pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Mitra Kerja BPOM Mengingat bahan tersebut perlu dipersiapkan secara matang dan akurat, sehingga dibutuhkan suatu pembahasan. Selain itu, kegiatan ini juga berupa pengawalan RDP yang diikuti peserta dari BPOM di Gedung DPR-RI. Pelaksanaan kegiatan RDP antara lain:

- ✓ RDP Pembahasan penguatan pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring (e-commerce) pada tanggal 28 Maret 2024.
- ✓ RDP Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2025 pada tanggal 10 Juni 2024.
- ✓ RDP Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2025 pada tanggal 12 Juni 2024.
- ✓ RDP Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 pada tanggal 27 Agustus 2024.
- ✓ RDP Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi pada tanggal 2 September 2024.
- ✓ RDP Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI pada tanggal 10 September 2024.



Gambar 3. 68 RDP dengan Komisi IX DPR RI, 28 Maret 2024



Gambar 3. 69 RDP dengan Komisi IX DPR RI, 10 September 2024

L. KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR

Tim Koordinator Fungsi Penganggaran perlu melakukan Pertemuan Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor antara lain Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan lintas sektor dari instansi terkait lain yang diharapkan dapat menjadi pertemuan konsolidasi eksternal untuk melakukan pembahasan bahan penetapan pagu alokasi anggaran tiap unit eselon II Pusat dan UPT Badan POM serta pembahasan yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran tahun berjalan seperti revisi anggaran yang melibatkan DJA, tambahan anggaran tahun berjalan, penerbitan SE MP PNBPN. Kegiatan yang dilakukan pada pembahasan perencanaan dan penganggaran bersama lintas sektor antara lain:

- ✓ Pembahasan Koordinasi Kenaikan Tunjangan Kinerja BPOM pada tanggal 19 Maret 2024 di Hotel Aston Bekasi.

- ✓ Pembahasan Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2024 terkait Buka Blokir Alat Laboratorium PPPOMN pada tanggal 11 Juli 2024 di Hotel Vertu Harmoni Jakarta.
- ✓ Pembahasan usulan SBKU BPOM Tahun 2024 pada tanggal 13 Agustus 2024 di Hotel Lumire Senen.
- ✓ Pembahasan Rekomendasi Alat Laboratorium dan Bangunan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Hotel Best Western Cawang.
- ✓ Pembahasan RO SBKU pada BPOM pada tanggal 11 September 2024 di Hotel Aryaduta Menteng.
- ✓ Pembahasan Anggaran UPT TA 2025 pada tanggal 13 September 2024 di Hotel Novotel Cikini.
- ✓ Pembahasan Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2024 terkait Optimalisasi Anggaran TA 2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 di Hotel Acacia Jakarta.



Gambar 3. 70 Rapat Koordinasi Penganggaran dengan lintas sektor, Jakarta 13 Agustus 2024.



Gambar 3. 71 Rapat Koordinasi Penganggaran dengan lintas sektor, Jakarta 11 September 2024.

M. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM membutuhkan standar biaya khusus dalam bentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku di BPOM dan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) bertujuan untuk menghasilkan usulan SBK untuk menunjang penyusunan RKAKL tahun mendatang. SBK merupakan standar yang ditetapkan terhadap kegiatan berkaitan tupoksi langsung dari pengawasan Obat dan Makanan dan bersifat terus menerus serta dapat diukur. Namun pemilihan SBK yang nantinya akan dipilih berdasarkan arahan pimpinan serta kesiapan dari masing-masing unit terkait.

Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit penunjang dari unit teknis bertindak sebagai fasilitator dari unit teknis dalam penyusunan SBK. Penyusunan SBK ini terus berjalan setiap tahun, terutama untuk memenuhi permintaan Kementerian Keuangan terhadap usulan SBK setiap tahun dari masing-masing K/L, melibatkan pelaksana rencana SBK dari masing-masing unit pusat terkait maupun pelaksana SBK dari Balai Besar/Balai POM dan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan SBK berupa pembahasan, penyusunan draft SBK dan review pelaksanaan SBK tahun sebelumnya sebagai ajang evaluasi.



Gambar 3. 72 Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2024, Jakarta tanggal 22 Maret 2024

N. PENYELARASAN PENGANGGARAN KEBIJAKAN BARU BPOM TA 2024

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. BPOM menyadari bahwa peran serta tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat

meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat.



Gambar 3. 73 Pedoman KIE Tahun 2024

Pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2024 bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan TA 2024 bersama lintas sektor. Kesepakatan tata cara pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan TA 2024. Keluaran dari pertemuan ini adalah Tersusunnya rancangan akhir Pedoman Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan TA 2024.

Pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di Aryaduta Menteng.



Gambar 3. 74 Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2024, Jakarta, 20 Februari 2024

SASARAN KEGIATAN 4:

**MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA,
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
BPOM**

IKU 7: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 7 adalah:

A. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BPOM TAHUN 2025-2029



Gambar 3. 75 Penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029

Dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra BPOM Tahun 2025-2029, telah dilakukan penelaahan Rancangan Renstra BPOM Tahun 2025-2029 dalam rangka untuk memastikan bahwa rencana strategis BPOM selaras dengan rencana pembangunan nasional, yaitu RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJMN 2025-2029. Pembahasan ini dilakukan bersama Bappenas pada tanggal 12

November 2024. Pada Pembahasan tersebut, menghasilkan lembar catatan kesepakatan pertemuan dua pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2025 – 2029 antara BPOM dan Bappenas. Untuk selanjutnya BPOM akan melakukan perbaikan rancangan Renstra sesuai dengan hasil penelaahan.

Hal-hal yang telah ditelaah meliputi:

1. Visi dan Misi K/L mendukung pencapaian Visi Misi Presiden.
2. Kebijakan K/L, Program, Kegiatan konsisten dengan rancangan RPJMN 2025-2029.
3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan mendukung sasaran di rancangan RPJMN 2025-2029.
4. Indikasi output prioritas K/L dan indikatornya mendukung pencapaian Prioritas di rancangan RPJMN 2025-2029.
5. ISS, IKP, IKK menerjemahkan dan mendukung indikator pembangunan di rancangan RPJMN 2025-2029

B. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPOM TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2024 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2025. Tujuan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2025 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM pada Tahun Anggaran 2024.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		- 3 -	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,		LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025	
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pelayanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu Persentase pangan olahan dalam kemasan yang aman dan bermutu Persentase FORT yang aman dan bermutu Indeks Kualitas Kepuasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,07 78 75 88,05 64,25 77,1
2	Mengaktifnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design pengujian laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	51,7
3	Memperkuatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Memperkuatnya efektivitas regulatory assistance dan kemitraan industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilindungi hak paten dan/atau terdaftar Persentase UINIK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produk Obat Dasar Alami, Kosmetik, dan Pangan Olahan Tingkat kemitraan pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	71,3 64 32,75
5	Tertegapnya Pengawasan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Pengawasan Hukum terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,5

Gambar 3. 76 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2025

C. PENYUSUNAN BUKU 100 HARI KERJA KEPALA BPOM



Gambar 3. 77 Buku Pencapaian 100 Hari Kerja Kepala BPOM RI

Buku *Pencapaian Kinerja 100 Hari Kepala BPOM 2024 – Taruna Ikrar* yang diinisiasi dan disusun Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan dokumentasi komprehensif mengenai langkah-langkah strategis dan capaian BPOM dalam 100 hari pertama kepemimpinan Taruna Ikrar. Buku ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik serta sebagai bahan evaluasi awal terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Fokus utama buku ini adalah bagaimana BPOM melakukan transformasi dalam mendukung kesehatan masyarakat, meningkatkan efisiensi pengawasan, serta

memperkuat daya saing global di sektor farmasi dan pangan. Presiden RI memberikan lima direktif utama kepada BPOM, yaitu meningkatkan standar global, menurunkan harga sediaan farmasi, menjamin keamanan farmasi dan pangan, mempercepat perizinan obat inovasi, serta melakukan reformasi standardisasi BPOM.

Dalam implementasi direktif Presiden, BPOM melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya dengan mendorong pengakuan global melalui WHO Listed Authority (WLA). Selain itu, BPOM juga berupaya mempercepat proses perizinan obat inovatif, memperluas penggunaan bahan baku obat dalam negeri, serta meningkatkan pengawasan terhadap produk farmasi dan pangan. Reformasi standar juga dilakukan dengan memperkuat regulasi terhadap produk obat dan makanan, termasuk pengawasan pangan berbasis rekayasa genetik serta hilirisasi fitofarmaka. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi BPOM sebagai regulator yang kredibel di tingkat internasional.

Selain itu, BPOM juga memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum. Dalam 100 hari pertama, BPOM memperkenalkan berbagai program seperti percepatan layanan publik berbasis digital, penguatan penindakan terhadap pelanggaran farmasi dan pangan, serta pengembangan desain laboratorium yang lebih modern. BPOM juga menjalin kerja sama lintas sektor untuk memastikan efektivitas pengawasan serta meningkatkan sinergi dengan berbagai

pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Di bagian akhir, buku ini menyoroti strategi pengawasan jangka panjang BPOM untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa inisiatif utama meliputi sinergi BPOM dalam program makan bergizi gratis, kolaborasi dengan regulator global, serta perencanaan jangka panjang untuk pengawasan obat dan makanan. Dengan strategi ini, BPOM berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan di masa depan.

D. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TA 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan obat dan Makanan (BOK POM) sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOK POM yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

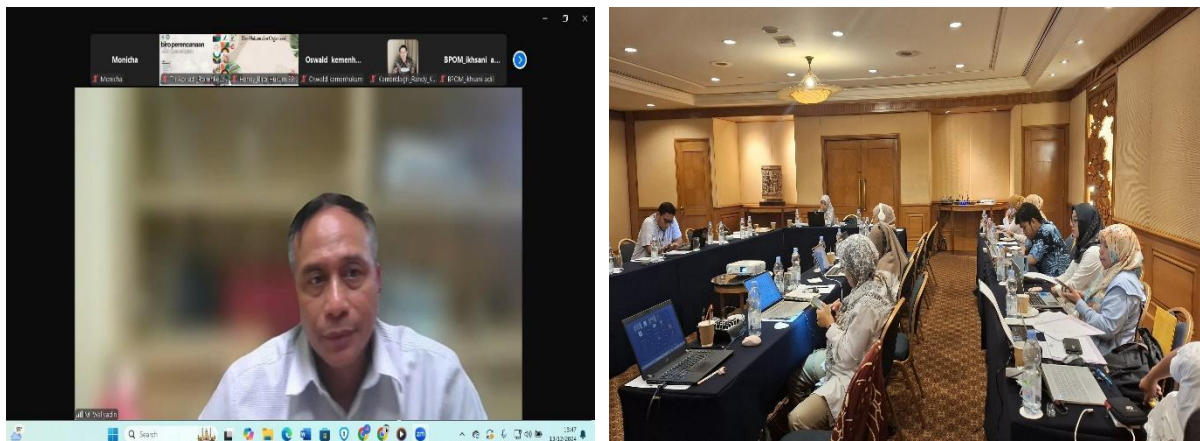
Penyusunan juknis mengacu pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran $n+1$, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, dan BA MM DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Proses penyusunan Juknis Pengelolaan Dana BOK POM antara lain:

- 1) Permintaan masukan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM kepada unit kerja teknis pengampu
- 2) Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu, dan/atau pakar terkait
- 3) Konsultasi publik, finalisasi dan harmonisasi Rancangan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOK POM.
- 4) Pengesahan (persetujuan prinsip, penomoran dan penetapan Peraturan BPOM) Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM.

Penyusunan Juknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2025 ($n+1$) berbeda dengan penyusunan pada tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2025, dana BOK POM terpisah penyalurannya dengan BOK Dinas sehingga Juknisnya dapat disusun tanpa

harus menunggu Juknis BOK Dinas diundangkan. Konsekuensinya adalah Juknis Dana BOK POM harus diundangkan maksimal 1 bulan setelah perpres APBN terbit. Dalam rangka penyusunan Juknis tersebut dilakukan pembahasan bersama Kemenkeu, Kemendagri, Setkab, Kemenhukum dan Bappenas serta unit kerja teknis pengampu dilakukan secara luring pada tanggal 5 Agustus 2024 di Aryaduta Menteng, dilanjutkan dengan Konsultasi Publik pada 9 Oktober 2024 di Aryaduta Menteng serta Harmonisasi dilakukan pada 13 Desember 2024 melalui *zoom meeting*.



Gambar 3. 78 Kegiatan Penyusunan Juknis BOK POM TA 2025

E. MONITORING DAN EVALUASI DAK NON FISIK BOK POM

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan DAK, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

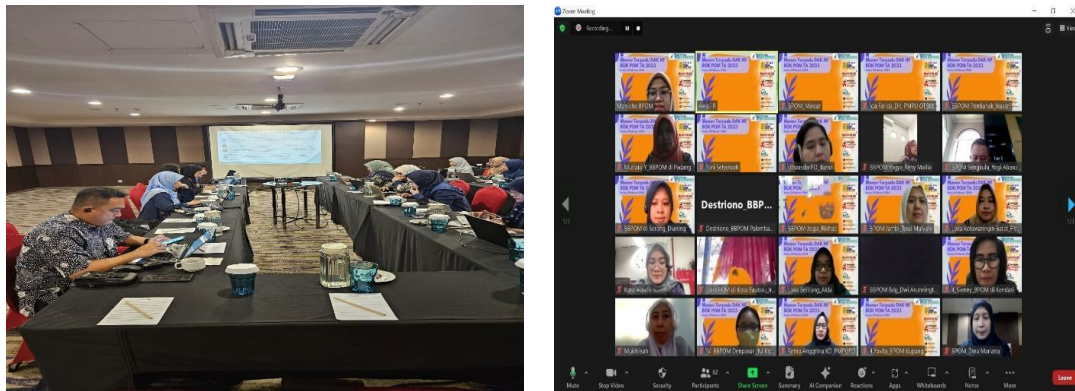
Biro Perencanaan dan keuangan melaksanakan Monev DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2024 melalui luring/daring antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2024 dengan BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, UPT, unit kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) yang membahas progres realisasi anggaran dan output, hambatan/kendala dan rencana tindak lanjut.



Gambar 3. 79 Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK Nonfisik dengan UPT dan Dinas Kesehatan Kab/Kota

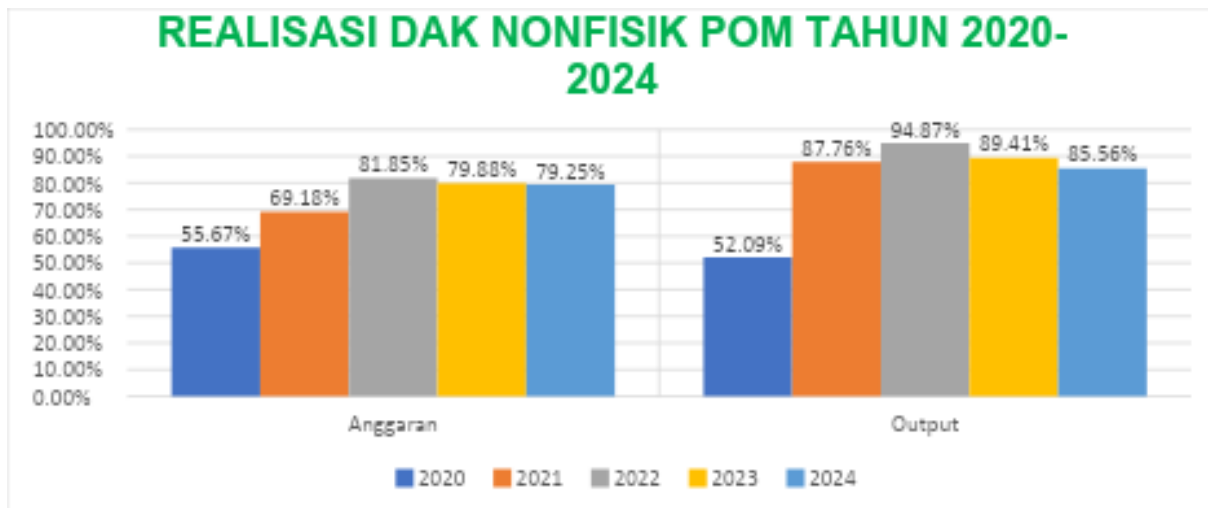
Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Pertemuan Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2023 (tahun n-1) dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada Kamis 15 Februari 2024 di ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center yang mengundang unit pengampu DAK Nonfisik di BPOM Pusat, Inspektorat, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis POM. Monev Terpadu DAK NF BOK POM TA 2023 bertujuan membahas capaian kegiatan dan realisasi anggaran DAK NF POM sekaligus mengidentifikasi kendala dan tantangan serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan perencanaan ke depan. Tindak lanjut pertemuan ini antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi unit kerja teknis pengampu dan UPT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan pembinaan/pendampingan dan monev terhadap pelaksanaan DAK baik secara mandiri atau bersama sama Unit Pusat.
3. Meningkatkan kepatuhan UPT dalam memverifikasi terhadap pelaporan pelaksanaan DAK yang disi oleh Dinas Kesehatan melalui SMART POM.



Gambar 3. 80 Pertemuan Money Terpadu DAK Nonfisik BOK POM

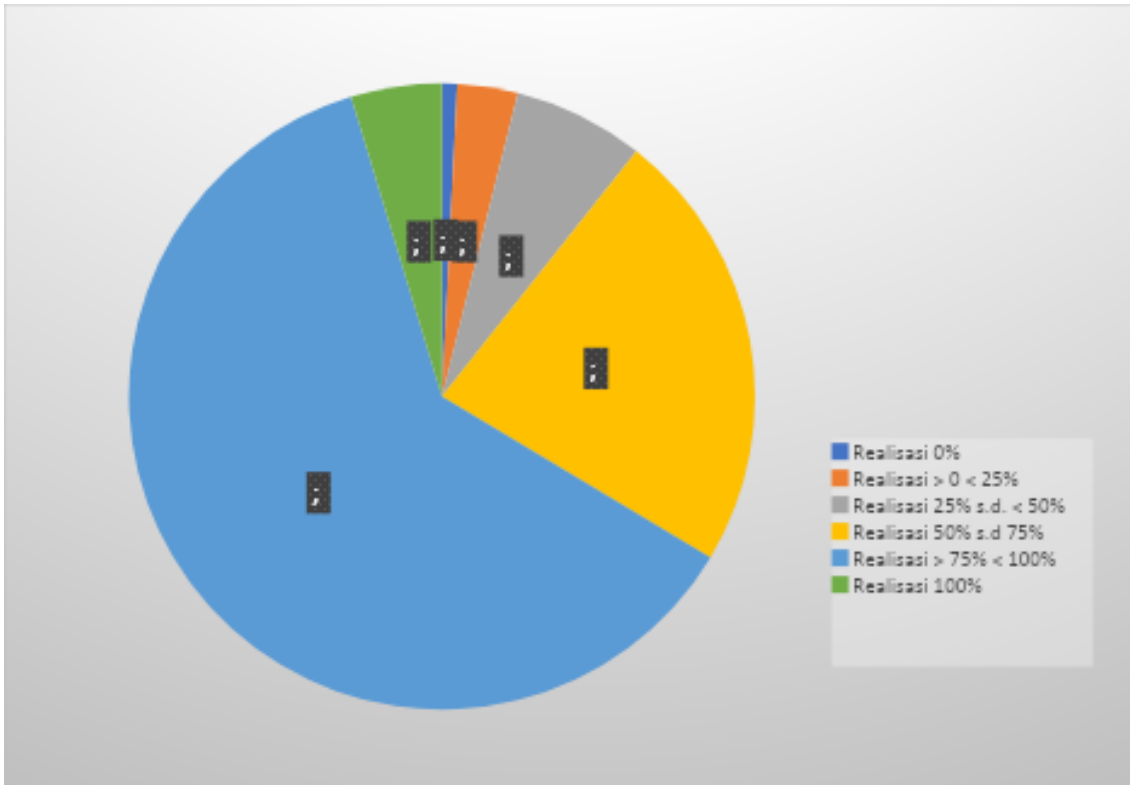
Pada tahun 2024, realisasi anggaran DAK NF BOK POM yang dilaporkan oleh 384 Dinkes Kabupaten/kota melalui aplikasi SMART POM per 20 Januari 2025 adalah sebesar Rp118.871.871.670, - (79,25%) dari pagu Rp150.000.000.000, -



Gambar 3. 81 Persentase Realisasi Anggaran dan Output DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi anggaran maupun capaian output DAK Nonfisik BOK POM dibandingkan dengan realisasi tahun 2022-2023 namun masih lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021.

Ditinjau dari tingkat kepatuhan pelaporan, Jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana terdapat 60 Kab/Kota yang tidak melakukan pelaporan melalui SMARTPOM dan tahun 2021 terdapat 25 Kab/Kota dengan realisasi 0% atau tidak melaporkan realisasi melalui SMARTPOM, maka pada tahun 2024 seperti halnya dengan tahun 2022-2023 terdapat perbaikan tingkat kepatuhan pelaporan, dimana seluruh Kab/kota sudah melaporkan realisasi melalui SMARTPOM.



GAMBAR 3. 82 REALISASI ANGGARAN DAK NONFISIK BOK POM PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

F. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BPOM

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

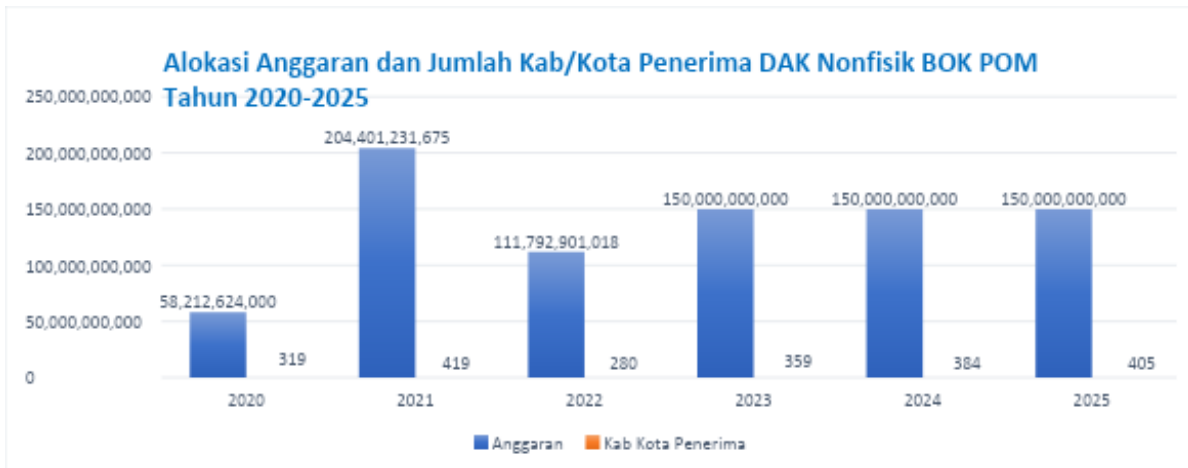
Dalam hal pembiayaan mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan pelaksanaan operasional pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui penyediaan BOK POM.

Siklus perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik BOK POM mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perencanaan diawali dengan penyusunan rancangan arah kebijakan DAK Nonfisik dan rancangan jenis DAK Nonfisik antara Bappenas dan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk selanjutnya, proses perencanaan dan penganggaran melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, sebagaimana tampak pada ilustrasi berikut



Gambar 3. 83 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM

Berdasarkan Berita Acara Multilateral Meeting (BA MM), DAK Non Fisik BOK POM TA 2025 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 150 Milyar, - untuk 405 Kabupaten/Kota yang tersebar di 36 Provinsi.



Gambar 3. 84 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2025

Berdasarkan BA MM tersebut, Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui aplikasi KRISNA dengan tautan <https://krisna.systems/auth/portal>. Usulan RKA tersebut ditelaah oleh BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, Unit Kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) melalui kegiatan *desk/penelaahan* RKA DAK Nonfisik BOK POM TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Agustus 2024 secara luring untuk penelaahan usulan BOK POM TA 2025 dan tanggal 15 Oktober-1 November 2024 secara hybrid (daring/luring) dengan turut mengundang Dinas Kesehatan Penerima DAK NF BOK POM TA 2025 di Hotel sekitar Jakarta Pusat untuk penelaahan RPD BOK POM TA 2025. RKA yang telah disepakati dialokasikan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.



Gambar 3. 85 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2024

G. PENGELOLAAN HIBAH

Hibah merupakan penerimaan negara yang tidak perlu dikembalikan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, jasa, maupun surat berharga, yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sebagai salah satu komponen pendapatan negara dalam APBN, hibah berperan penting dalam mendukung program pembangunan nasional, penanggulangan bencana alam, serta bantuan kemanusiaan. Instrumen ini dikenal karena fleksibilitas dan kecepatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hibah, sejak 2022 Kementerian Keuangan mengembangkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI). Aplikasi ini menyatukan berbagai sistem ke dalam satu portal guna membentuk basis data yang mendukung inisiatif strategis, otomatisasi kantor, dan pengambilan keputusan berbasis data.

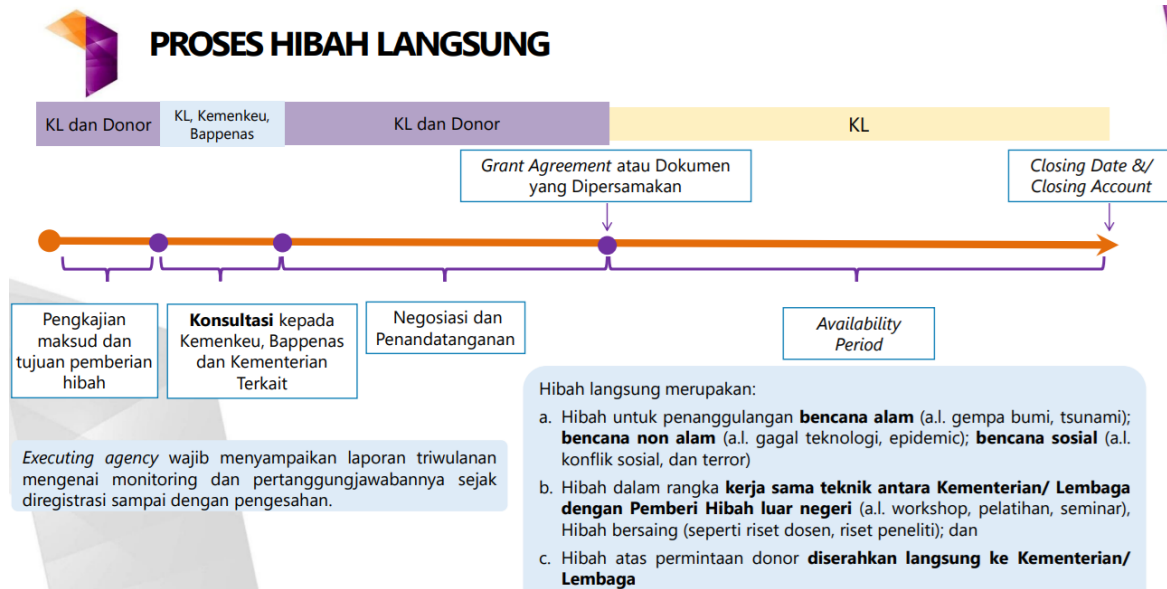
Fitur yang terdapat dalam SEHATI meliputi:

1. **Modul E-Register:** menyediakan fasilitas Permohonan Registrasi, Pemutakhiran Data, dan Pembatalan Hibah dapat dilakukan secara *online* dimanapun dan dapat dipantau secara *real time*.
2. **Modul Monitoring Pengelolaan Hibah:** mencakup pemantauan pertanggungjawaban hibah mulai dari register sampai dengan pengesahan.
3. **Modul E-Konfirmasi Penerimaan Hibah:** menyediakan fasilitas konfirmasi penerimaan hibah antara Pemerintah dengan K/L dan Donor.
4. **Modul Reporting:** menyediakan berbagai jenis informasi hibah yang dibutuhkan *stakeholders*, berisi data realisasi dan status hibah.

Berikut siklus pengelolaan hibah:



GAMBAR 3. 86 SIKLUS HIBAH



GAMBAR 3. 87 PROSES HIBAH LANGSUNG

Kegiatan Pengelolaan Hibah Tahun 2024 dimulai dengan koordinasi Pengelola Admin Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi pada lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, membuat SK Tim Pengelola Hibah Pusat dan reviu SOP Makro pengelolaan hibah dan melakukan monev penerimaan hibah dilingkungan BPOM.

Kegiatan asistensi dan bimtek pengelolaan Hibah pada Satker BPOM yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024, sebagai berikut:

- ✓ Pertemuan monev hibah dengan satker terkait progress penerimaan dan pemutakhiran register hibah WHO periode 2024-2025 dimana WHO memberikan komitmen hibah sebesar \$646.180 dengan penerima hibah satker Kedeputin 1, 2, 3 dan P3OMN dan progress penerimaan hibah Tanah pada beberapa Loka dan Balai POM pada tanggal 24 April 2024, 18 April 2024, 11 Oktober 2024 dan 14 Nopember 2024.
- ✓ Rapat Konsultasi Hibah Langsung dengan Kementerian Keuangan tanggal 15 Mei 2024 secara daring
- ✓ Forum Koordinasi Pengelola Hibah di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta secara Hybrid Tanggal 16 Juli 2024, dengan tema Sosialisasi Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Hibah Terencana dan Pinjaman Luar Negeri dari Bappenas dan Kementerian Keuangan

Tahun 2024 Badan POM melakukan pelaporan terhadap penerimaan dan pengesahan Hibah langsung Uang, Barang dan Jasa sebanyak 8 penerimaan hibah dengan total Rp2.486.940.161 (Dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

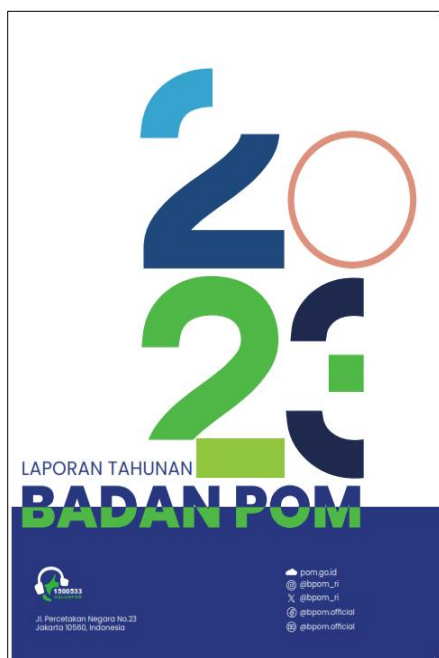
Tabel 3. 3 Pelaporan Penerimaan dan pengesahan Hibah langsung Uang, Barang dan Jasa Tahun 2024

Tahun	Triwulan	Nomor Register	Kode Satker	Nama Satker	Bentuk Hibah	Nama Hibah	Nilai Realisasi IDR
2024	1	23LNGDLA	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	KAS	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF	78.797.000
2024	2	2GFR6FQA	432979	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	BARANG	HIBAH BARANG BERUPA TANAH SELUAS 2.860 M2 SENILAI RP114.400.000,- DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU UNTUK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI	114.400.000
2024	2	2CNPB4RA	672851	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	BARANG	HIBAH BARANG BERUPA PAGAR PERMANEN DARI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU	442.561.000
2024	2	2WCZA7BA	690465	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	BARANG	HIBAH BARANG LANGSUNG BERUPA TANAH BANGUNAN PASAR SELUAS	328.800.342

Tahun	Triwulan	Nomor Register	Kode Satker	Nama Satker	Bentuk Hibah	Nama Hibah	Nilai Realisasi IDR
						834 M2 DARI PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KE BALAI POM DI PAYAKUMBUH	
2024	4	2SRVKB4A	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	JASA	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2024-2025 INDONESIAN FDA AND WHO COUNTRY OFFICE INDONESIA - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN NAPPZA	419.033.991
2024	4	2NYBVR9A	672841	BALAI POM DI KEDIRI	BARANG	HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG YAITU TANAH EKS SDN TUGUREJO II DAN III SELUAS 6.604 M2, SERTA BANGUNAN GEDUNG BPP NGASEM SELUAS 41,25 M2, DARI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	992.919.399
2024	4	229F8J5A	690469	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	BARANG	HIBAH BARANG BERUPA TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KEPADA LOKA POM DI KOTAWARINGIN BARAT	39.068.240

Tahun	Triwulan	Nomor Register	Kode Satker	Nama Satker	Bentuk Hibah	Nama Hibah	Nilai Realisasi IDR
2024	4	29HUWE9A	690483	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	BARANG	HIBAH BARANG LANGSUNG BERUPA TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KE LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	71.360.189
							2.486.940.161

H. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2023



Gambar 3. 89 Buku Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2023

Laporan Tahunan BPOM merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Lingkungan strategis yang semakin dinamis berimplikasi pada luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh BPOM. Jejaring kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina, dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab BPOM.

Laporan tahunan merupakan sumber informasi tentang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam satu tahun anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan data hasil pengawasan Obat dan Makanan dari unit kerja di

pusat dan daerah dengan harapan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. Selain masyarakat, instansi terkait juga dapat melihat keberhasilan program yang dikerjakan bersama BPOM di dalam laporan tahunan ini.

Selain itu, laporan tahunan juga penting untuk menegakkan salah satu azas pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan laporan tahunan diperlukan data yang valid dan dapat dipercaya, kajian yang mendalam serta analisis yang tajam. Laporan yang disusun berdasarkan sumber data yang sahih akan menghasilkan informasi yang berharga baik untuk keperluan eksternal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri, maupun untuk keperluan internal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang matang dan handal di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan BPOM menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam periode tahun 2023 yang mencakup kegiatan standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat dengan maksud untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap daerah membuat standar tersendiri. Kegiatan lain adalah penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat dengan maksud agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Kegiatan lain yang ada dalam laporan tahunan BPOM adalah pengawasan setelah beredar (*post-market control*). Kegiatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kegiatan selanjutnya yang disajikan dalam laporan tahunan BPOM tahun 2023 adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi

administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Sedangkan kegiatan terakhir pada laporan tahunan BPOM adalah manajemen atau tata kelola pemerintah, fungsi ini sendiri bertugas untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di bidang Obat dan Makanan di Indonesia.

Di dalam laporan tahunan juga disampaikan upaya BPOM dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting karena merupakan salah satu pilar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Pencapaian BPOM dalam Laporan Tahunan ini menjadi titik tumpu bagi BPOM untuk bekerja lebih baik lagi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu. Serta dapat meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional dan dengan masyarakat luas untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.

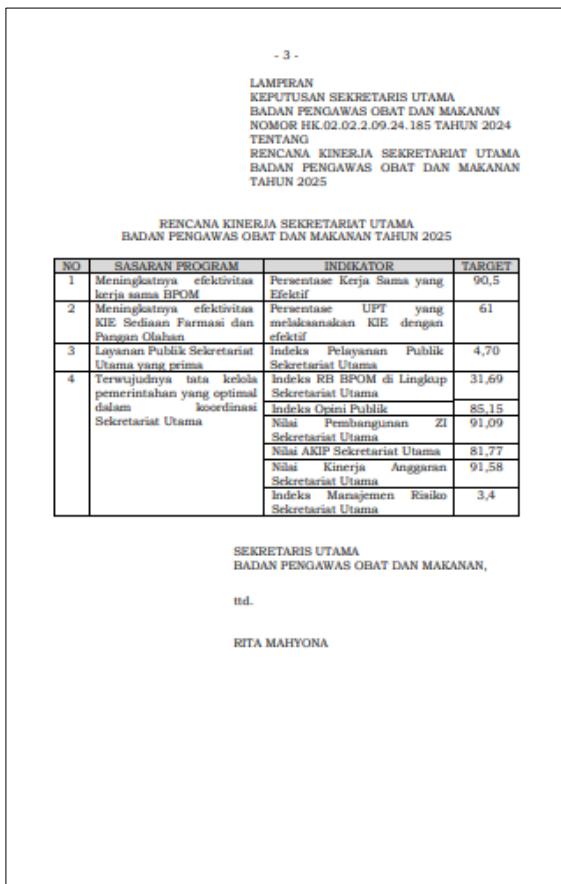
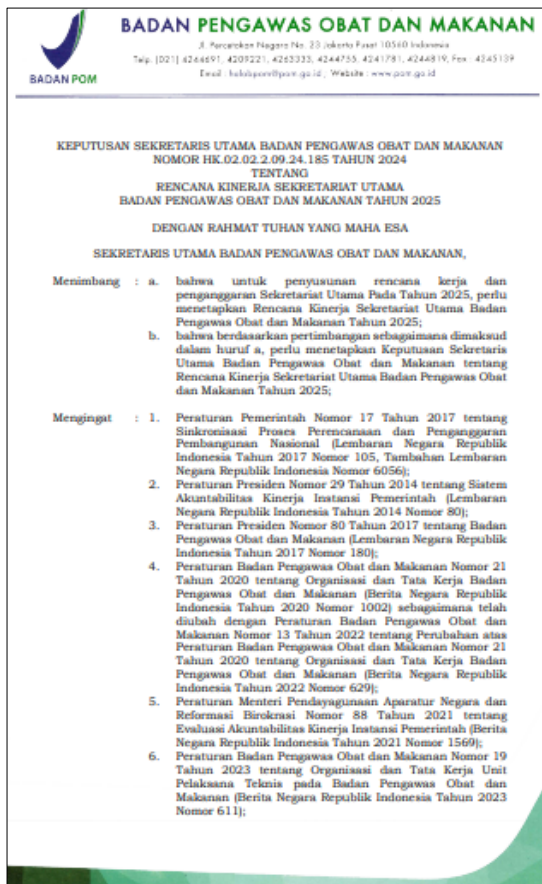
IKU 8: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SETTAMA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 8 adalah:

A. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIS UTAMA TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2024 dan berdasarkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2025. Tujuan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2024.



Gambar 3. 90 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2025

B. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024



Gambar 3. 91 Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2024

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan dokumen evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bahan untuk perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Sekretariat Utama dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM ke depan.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode Renstra 2020-2024, sehingga laporan kinerja tahun ini menjadi evaluasi akhir terhadap pencapaian strategis selama lima tahun terakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan, implementasi, serta capaian kinerja yang telah dicapai, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki guna menyusun kebijakan dan strategi yang lebih baik di periode berikutnya.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Utama Tahun 2024 menunjukkan nilai akhir sebesar 82,81, mencerminkan pencapaian kinerja yang baik secara keseluruhan. Pada hasil penilaian SAKIP poin pelaporan kinerja memiliki bobot nilai sebesar 12 dan sestama mendapatkan nilai sebesar 9,48. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan kinerja Sekretariat Utama telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna mencapai nilai maksimal.

C. LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023



Gambar 3. 92 Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi Badan POM yaitu Obat dan, “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Pada laporan tahunan 2023 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 8 Sasaran kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu:

1. Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas.
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM.
3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM.
5. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP
6. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.
7. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman.
8. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
10. Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan.
11. Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan.

12. Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan;
dan
13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dari ketiga belas indikator, satu indikator telah *exclude* pada tahun 2023 karena indikator tidak dihitung kembali di akhir tahun, 3 indikator mendapat kriteria **Cukup**, 2 indikator kriteria **Baik**, dan 7 diantaranya memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

SASARAN KEGIATAN 5: **TERWUJUDNYA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG EFEKTIF**

IKU 9: INDEKS REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 9 adalah:

A. RAPAT TINJAU MANAJEMEN TAHUN 2024

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Biro Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juli 2024 di Hotel Lumire, Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan dihadiri oleh seluruh pegawai Biro. RTM ini merupakan bagian dari penerapan siklus Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan keselarasan sistem manajemen mutu terhadap arah strategis organisasi.



Gambar 3. 93 Secara Daring Ka. Biro Renkeu membuka RTM 2024

Agenda rapat mencakup evaluasi tindak lanjut tinjauan sebelumnya, perubahan isu internal dan eksternal, penilaian kinerja proses dan kepuasan pelanggan, audit internal dan eksternal, kecukupan sumber daya, serta peluang dan kebutuhan perubahan sistem manajemen. Penguatan pada sistem informasi anggaran

Simetris menjadi salah satu capaian penting dalam mendukung penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Tabel 3. 4 Matriks Daftar Isu Internal dan Eksternal Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No.	Proses/Kegiatan	Isu	Dampak Negatif Jika Tidak Dikontrol	Dampak Positif Jika Dikontrol	Aktivitas Pengendalian Internal
1	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan tidak sesuai SAP	Tidak mendapatkan opini WTP	Mendapatkan opini WTP terbaik	Konsolidasi, FGD, pedoman CaLK, monev temuan BPK
2	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	Nilai kinerja anggaran menurun	Citra organisasi menurun	Nilai kinerja tetap Baik/Sangat Baik	Monev berkala, bimtek, SOP pencairan
3	Layanan Perbendaharaan & LK	Layanan tidak optimal	Kepuasan menurun	Efektivitas meningkat	Jadwal layanan, konsultasi terbuka
4	Pedoman & Juklak/Juknis	Tidak mutakhir	Informasi tidak handal	Dokumen sesuai sistem & regulasi	Penyusunan & sosialisasi pedoman
5	Peningkatan Pemahaman Pimpinan	Kurangnya kesadaran manajerial	Keputusan tidak tepat	Pemahaman target meningkat	Workshop, koordinasi dengan PPSDM
6	Monitoring & Pelaporan Kinerja	Data tidak valid	Kebijakan salah arah	Rekomendasi tepat sasaran	Bimtek DO indikator, desk capaian
7	Ketepatan Pelaporan Kinerja	Pelaporan terlambat	Ganggu capaian BPOM	Laporan tepat waktu	SK tim monev, reminder internal, timeline pelaporan
8	Revisi DIPA	Sistem baru & frekuensi revisi tinggi	Ganggu nilai kinerja anggaran	Target anggaran tercapai	Bimtek, penjadwalan dan reminder revisi
9	Kebutuhan SDM	Kekurangan tenaga kerja	Beban kerja tidak seimbang	Kinerja meningkat	Rekrutmen CASN/PPNPN sesuai kebutuhan
10	Sarana & Prasarana	APD belum memadai	Proses lambat	Efisiensi kerja meningkat	Pengadaan alat pengolah data & BMN
11	Budaya Organisasi	Solidaritas rendah	Kinerja stagnan	Budaya kerja solid	Internalisasi budaya, kegiatan tim

No.	Proses/Kegiatan	Isu	Dampak Negatif Jika Tidak Dikontrol	Dampak Positif Jika Dikontrol	Aktivitas Pengendalian Internal
12	Desain Pengawasan Nasional	Belum akomodasi multisektor	Perencanaan tidak menyeluruh	Kinerja DAK meningkat	Koordinasi lintas sektor
13	Pelaporan DAK oleh Pemda	Laporan belum lengkap	Laporan ke pusat rendah	Capaian meningkat	Desk monev triwulan, koordinasi UPT
14	Penyusunan Renstra 2025–2029	Belum sinkron RPJMN & Renstra	AKIP menurun	Efektivitas pengawasan meningkat	Evaluasi Renstra, penyusunan teknokratik
15	Perubahan Struktur APBN	Pergeseran output & indikator	Ketidaksesuaian perencanaan	Anggaran relevan & adaptif	Revisi anggaran, perubahan dokumen
16	Pelaporan DAK oleh Pemda	Keterlambatan juknis & SMARTPOM	Pelaksanaan DAK terhambat	DAK terlaksana optimal	Koordinasi lintas kementerian, pengembangan aplikasi

Pada aspek kinerja, capaian tahun 2023 menunjukkan hasil sangat baik dengan mayoritas indikator mencapai atau melampaui target. Beberapa indikator seperti kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (100%), efisiensi penggunaan anggaran (100%), serta indeks pengelolaan data (2,75 dari target 2,5) mencerminkan pengelolaan yang akuntabel dan responsif. Sementara itu, survei kepuasan internal menunjukkan peningkatan dari 88,22 menjadi 90,77 poin. Hasil ini didukung dengan audit internal yang tidak menemukan ketidaksesuaian (zero NC), dan audit eksternal ISO 9001:2015 yang menyatakan Biro tetap layak mempertahankan sertifikasi.



Gambar 3. 94 Kegiatan RTM 22 Juli 2024 di Hotel Lumire

Dari sisi sumber daya, alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp20,3 miliar menurun menjadi Rp14,7 miliar di tahun 2025. Sedangkan kebutuhan SDM masih menjadi tantangan dengan realisasi hanya 60 orang dari kebutuhan 114 (sekitar 52,63%). Strategi untuk meningkatkan efektivitas telah dirancang, antara lain pengembangan sistem monitoring, pembentukan UAPPA-W, penyusunan SOP pengelolaan piutang, dan penyempurnaan dokumen perencanaan jangka menengah.

Sebagai penutup, disepakati bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Biro Perencanaan dan Keuangan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta membangun kepercayaan publik terhadap BPOM. Komitmen seluruh unsur organisasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keberhasilan tersebut dan mengupayakan peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja, keuangan, serta pelayanan internal secara menyeluruh.

B. RAPAT EVALUASI INTERNAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2024

Laporan Evaluasi Internal Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disusun berdasarkan hasil rapat evaluasi triwulanan sepanjang tahun 2024. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro, dihadiri secara luring oleh para Ketua Tim, serta disimak secara daring oleh seluruh pegawai. Evaluasi ini bertujuan menilai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, dan efisiensi penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Laporan ini juga memuat identifikasi kendala yang dihadapi serta rekomendasi strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, Biro diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan agar selaras dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta mendukung prioritas kelembagaan dan nasional. Adapun isi laporan setiap triwulannya dipaparkan sebagai berikut:



Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM mencakup capaian kinerja dan realisasi anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari–Maret 2024. Total realisasi anggaran mencapai **Rp4,77 miliar** dari total pagu Rp20,3 miliar atau setara dengan **23,5%**. Penilaian terhadap indikator kinerja strategis menunjukkan capaian *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)* sebesar **100,10%** yang dikategorikan “**Sangat**

Baik”, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, meskipun beberapa indikator masih dalam proses pengukuran karena bersifat tahunan.

Beberapa indikator menunjukkan performa **sangat baik**, seperti *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM* sebesar **100,4%**, *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar* sebesar **270%**, serta *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar* sebesar **165%**. Namun demikian, beberapa indikator masih tergolong **cukup**, seperti *Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan (95%)*, *Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan (82%)*, dan *Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan (95%)*. Ketiga indikator ini menjadi perhatian untuk ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih aktif, penguatan sistem informasi, serta percepatan pelaksanaan program sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.



Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, mencerminkan pelaksanaan program dan serapan anggaran hingga **30 Juni 2024** dengan capaian **realisasi anggaran sebesar Rp7,8 miliar** dari total pagu Rp20,3 miliar atau sebesar **38,27%**. Capaian *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)* tercatat sebesar **94,79%** dengan kategori **“Baik”**. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah berjalan sesuai rencana meskipun beberapa indikator kinerja masih perlu diperbaiki atau akan tercapai di akhir tahun.

Beberapa indikator yang menunjukkan hasil **sangat baik dan baik** antara lain *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar (100,32%)*, *Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP (100%)*, serta *Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan (100%)*. Namun, terdapat indikator dengan capaian **cukup**, seperti *Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan*

Keuangan (95,06%), Persentase kesesuaian dokumen satker terhadap pedoman (98,5%), dan Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan (75%).

Rencana tindak lanjut yang disusun mencakup peningkatan strategi komunikasi layanan internal, pendampingan satker dalam penyusunan dokumen, serta optimalisasi penggunaan sistem informasi seperti BOC dan email instansi. Selain itu, kegiatan strategis seperti penyusunan Renstra 2025–2029, evaluasi kebijakan PDDM, dan revisi SOP pengelolaan hibah terus diupayakan guna memperkuat sistem perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan responsif.



Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, menunjukkan capaian *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)* sebesar **96,24%** dengan predikat “Baik” dan realisasi anggaran sebesar **Rp14,09 miliar** dari pagu Rp20,78 miliar (**67,80%**). Beberapa indikator strategis mencapai kategori “**Sangat Baik**”, seperti *Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman (100,94%), Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar (100,14%), dan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar (100,18%).*

Namun, dua indikator masih berada pada kategori “**Cukup**”, yakni *Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan (92%)* serta *Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan (83,33%)*. Hambatan utama berasal dari performa sistem pelayanan daring, alur prosedur, serta keterlambatan optimalisasi platform BOC. Sebagai tindak lanjut, dilakukan peningkatan pelayanan, sosialisasi melalui media internal, dan penguatan pemanfaatan sistem informasi. Selain itu, Biro juga aktif dalam penyusunan Renstra 2025–2029, pengembangan aplikasi Simetris e-Planning, serta monitoring pengelolaan DAK, hibah, dan PNBP guna memperkuat reformasi tata kelola perencanaan dan keuangan BPOM secara menyeluruh.



Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, mencatat capaian *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)* sebesar **98,20%** dengan kategori **Baik**, serta realisasi anggaran sebesar **Rp20,15 miliar** dari total pagu **Rp20,16 miliar** atau **99,98%**. Seluruh output kegiatan berhasil tercapai 100% sesuai target, dan dari 13 indikator kinerja yang dievaluasi, 7 indikator mencapai atau melampaui target, 3 indikator masih menunggu realisasi final, dan 3 lainnya belum mencapai target. Dua indikator berhasil meraih kategori **“Sangat Baik”** yakni *Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM (102,20%)* dan *Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan (100,98%)*.

Sementara itu, beberapa indikator yang masih tergolong **“Cukup”** mencakup *Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja BPOM (97,99%)*, *Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM (85,90%)*, *Indeks kepuasan internal (95,84%)*, *Indeks Profesionalitas ASN (95,54%)*, serta *Indeks pengelolaan data dan informasi (91,67%)*. Beberapa kendala diidentifikasi seperti keterbatasan data final dari KemenPAN-RB dan DJA, serta hambatan teknis dalam sistem informasi. Sebagai rencana tindak lanjut, Biro mengedepankan penguatan komunikasi, peningkatan kualitas layanan, pemutakhiran sistem informasi, serta finalisasi dokumen strategis untuk tahun 2025–2029 guna memperkuat kinerja dan tata kelola yang lebih optimal.

C. RAPAT MPH 2024 DIALOG KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPOM

Rapat diadakan di Bekasi pada tanggal 13 Februari 2024, membahas penyusunan MPH Biro Perencanaan dan Keuangan masih dalam proses dikarenakan beberapa Ketua Tim masih belum menyelesaikan MPH masing-masing. Batas waktu untuk draft MPH Biro Perencanaan dan Keuangan versi excel (dikarenakan aplikasi SIMAKIN belum siap) tanggal 16 Februari 2024. Menurut rekomendasi dari Biro SDM, dimohon untuk mendiskusikan MPH Ketua dan Anggota Tim Kerja pada masing-masing fungsi, karena indikator pembentuk menempel di Ketua Tim. Ketua Tim Pokja dimohon untuk melihat lagi siapa saja anggota tim beserta tugasnya, dikarenakan anggota tim hanya boleh dibawah maksimal 5 Ketua Tim agar lebih efektif.



Gambar 3. 95 Rapat penyusunan MPH Biro Perencanaan dan Keuangan di Bekasi, 13 Februari 2024

Kesepakatan nama anggota tim dalam pelaksanaan / implementasi RB/ ZI, AoC, CC, QMS, SPIP, MR, AI, Arsip, Penanggung Jawab Data akan menjadi pembagian tugas dalam MPH dan SK tim sedang berproses. Terdapat 3 unsur terkait layanan internal yaitu ketepatan, prosedur dan sarana prasarana, sehingga akan ada suatu intervensi yang bisa

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Untuk sarana prasarana dapat menyediakan tempat untuk layanan dan akan dilakukan sosialisasi mengenai layanan yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Hasil Reviu Penilaian Kinerja Tahun 2023 oleh Biro SDM. Untuk mempertimbangkan ketersediaan jumlah SDM, kompetensi SDM, dan pemerataan anggota tim berdasarkan jenjang jabatan saat pembentukan tim kerja.

Dalam menentukan target kinerja, untuk memperhatikan bahwa penggunaan *range* hanya untuk RHK yang capaian kerjanya tidak dapat diprediksi secara tepat, target *range* tidak boleh dimulai dari angka 0, Ketua dan anggota Tim yang mendapatkan indikator yang sama sebaiknya memiliki satuan target yang sama dan satuan target kinerja dengan persentase sebaiknya dilengkapi dengan kertas kerja penetapan dan pembagian target kinerja.

Dalam memanfaatkan kriteria pemenuhan ekspektasi untuk pendistribusian nilai istimewa kepada pegawai. Hal ini akan dinilai oleh Biro SDM, akan ada pemeringkatan, dan biasanya di REN / Rakor SDM akan muncul. Rorenkeu belum memanfaatkan pendistribusian nilai istimewa berdasarkan kriteria pemenuhan ekspektasi. Belum ada kesepakatan di antara Ketua Tim bagaimana kriteria untuk pendistribusian nilai Istimewa.

IKU 10: NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 10 adalah:

A. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF DALAM RANGKA PENYUSUTAN ARSIP UNTUK Mendukung Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2024.

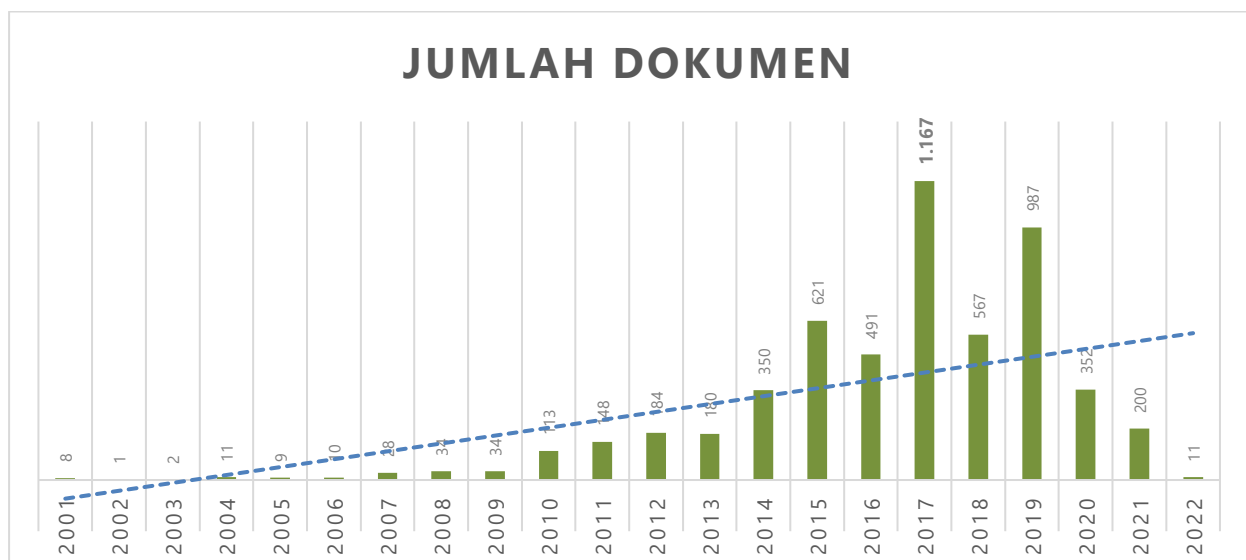
Pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, telah dilaksanakan kegiatan serah terima **pemindahan arsip inaktif** dari **Biro Perencanaan dan Keuangan** kepada **Unit Kearsipan Biro Umum** di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Pemindahan ini merupakan bagian dari **penyusutan arsip dinamis tahun 2024**, yang bertujuan untuk mengelola arsip secara efisien, memastikan retensi tepat waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan tata kelola kelembagaan.

Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: KA.04.02.21.05.25.07, ditandatangani secara elektronik oleh:

- **Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.**, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (PIHAK PERTAMA), dan
- **Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes.**, Kepala Biro Umum (PIHAK KEDUA).

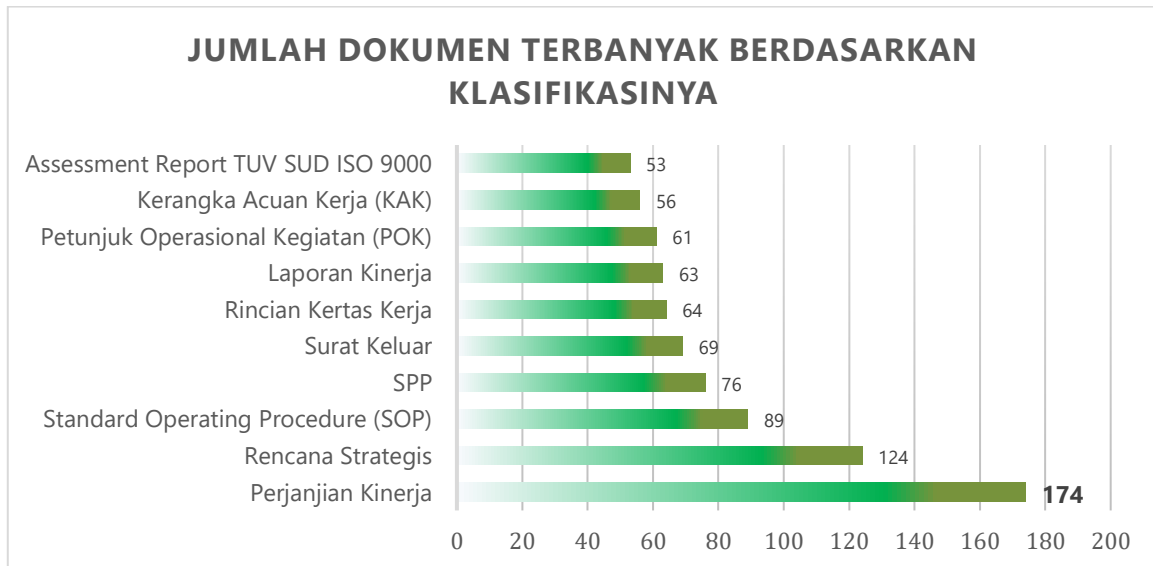
Adapun terkait data Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan 2024, diperoleh ringkasan sebagai berikut:

1. Total Dokumen yang Dipindahkan: **5.517 Berkas.**
2. Distribusi Dokumen **per Tahun**



Data ini menunjukkan tren peningkatan volume arsip yang cukup signifikan pada tahun-tahun dengan beban administrasi tinggi, khususnya periode 2015–2019 dan puncaknya di 2017.

3. Klasifikasi Dokumen Terbanyak



Pemindahan sebanyak **5.517 arsip inaktif** dari unit pengolah ke unit kearsipan merupakan langkah strategis dalam mendukung prinsip akuntabilitas, efisiensi ruang, dan kemudahan pelacakan informasi. Tahun-tahun dengan beban arsip terbesar mencerminkan intensitas aktivitas kelembagaan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, terutama pada masa transisi sistem, evaluasi kinerja, dan penguatan tata kelola.

Dengan penyusutan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan komitmen terhadap implementasi **pengelolaan arsip dinamis yang tertib dan sistematis**, sejalan dengan kebijakan nasional kearsipan. Pemindahan ini memperkuat ketersediaan arsip bernilai guna bagi kebutuhan administratif, hukum, audit internal, maupun sebagai sumber data sejarah kelembagaan.



SASARAN KEGIATAN 6:**TERWUJUDNYA SDM BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BERKINERJA OPTIMAL****IKU 11: INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 11 adalah:

A. PELATIHAN KEPEMIMPINN PENGAWAS (PKP)

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Tahun 2024 diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PPKASN) Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode 22 Maret hingga 7 Agustus 2024 dengan menggunakan metode Blended Learning, yang menggabungkan pembelajaran klasikal (tatap muka) dan pembelajaran jarak jauh (distance learning). Pelaksanaan pembelajaran tatap muka bertempat di PPKASN Kemensetneg, Jakarta.



Pelatihan ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri dari para pejabat Kepala Loka POM, Kepala Subbagian Kesekretariatan Unit Eselon I, serta Kepala Subbagian Tata Usaha, termasuk Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan.

B. PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) TINGLAT II

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IX Tahun 2024 diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei hingga 5 September 2024 dengan menggunakan metode *Blended Learning*, yaitu kombinasi antara jalur pembelajaran klasikal dan nonklasikal.

Pembelajaran nonklasikal dilakukan melalui *e-learning* secara langsung (*synchronous*) dan tidak langsung (*asynchronous*) dari tempat kedudukan masing-masing peserta, sedangkan metode klasikal dilaksanakan di Puslatbang PKASN LAN, Jatinangor, Bandung.

Pelatihan ini diikuti oleh 10 (sepuluh) pejabat struktural Eselon II, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.



SASARAN KEGIATAN 7:

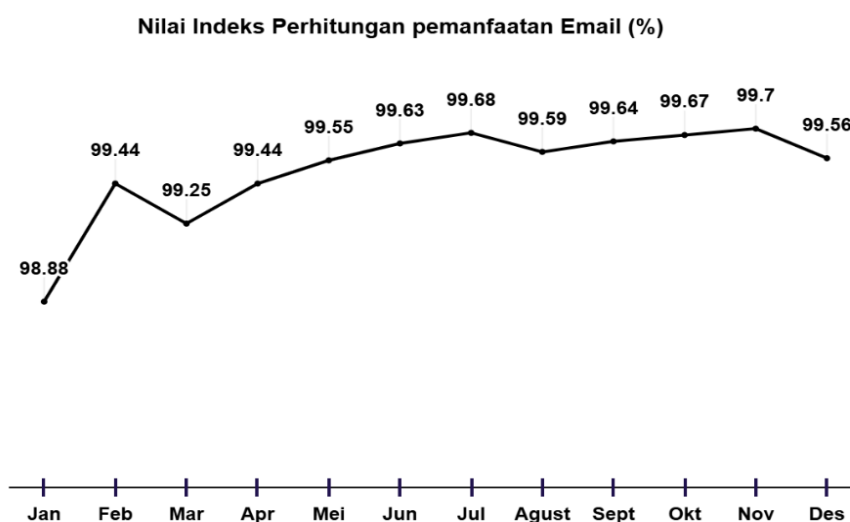
MENGUATNYA DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 12: INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BAIK

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 12 adalah:

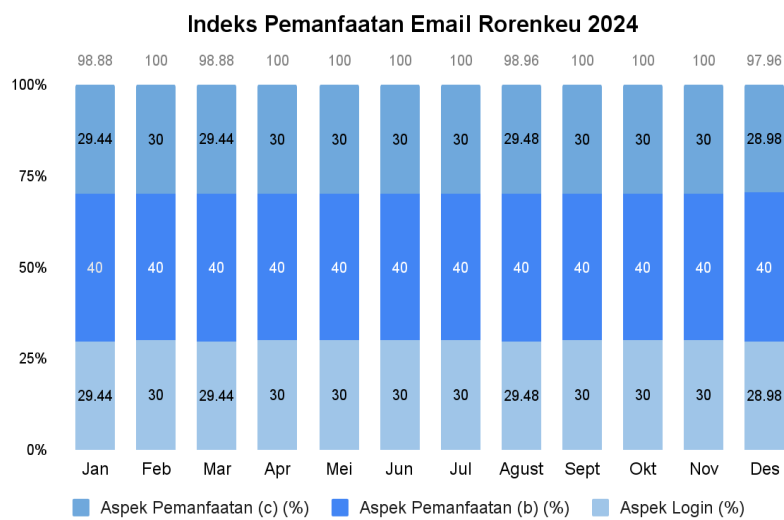
A. TINJAUAN PEMANFAATAN EMAIL KORPORASI DAN CAPAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2024

Selama tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan secara aktif mengoptimalkan pemanfaatan email korporasi dengan domain mail.pom.go.id sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola administrasi digital serta peningkatan efisiensi komunikasi internal. Pemantauan indeks pemanfaatan email dilakukan secara berkala setiap bulan dengan hasil yang menunjukkan tren positif dalam penggunaan layanan email tersebut di lingkungan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan.



Gambar 3. 96 Indeks Pemanfaatan per Bulan

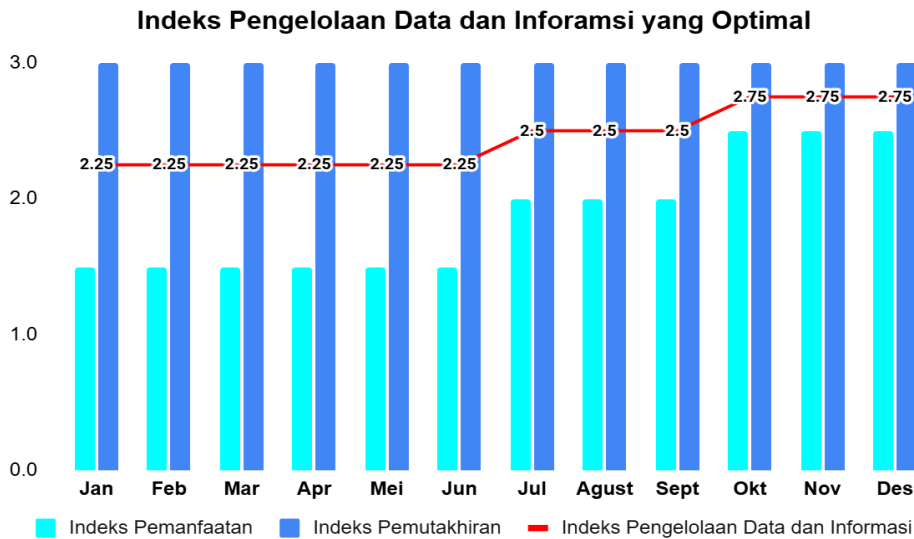
Berdasarkan data grafik pada Gambar 3.96, indeks pemanfaatan email, nilai indeks sepanjang tahun berada pada kisaran sangat tinggi (>98,5%). Setelah Februari, nilai indeks pemanfaatan secara konsisten berada di atas 99%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh potensi pemanfaatan email telah teroptimasi secara maksimal dan berada pada tingkat kejenuhan yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam budaya kerja digital serta meningkatnya kesadaran pegawai akan pentingnya penggunaan saluran komunikasi resmi dan terdokumentasi.



Gambar 3. 97 Indeks Pemanfaatan Email Rorenkeu 2024

Di samping itu, capaian rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar **2,75** per bulan. Meskipun menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan biro, capaian

ini belum mencapai target bulanan yang telah ditetapkan sebesar **3,00**. Perkembangan capaian indeks PDI tersebut dapat dilihat pada gambar 3.98 terkait.



Gambar 3. 98 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Rorenkeu selama Tahun 2024

Temuan ini menjadi perhatian strategis bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola data serta optimalisasi pemanfaatan sarana komunikasi digital pada tahun-tahun mendatang. Upaya peningkatan perlu difokuskan pada pendekatan yang lebih adaptif dan integratif melalui pelatihan SDM, penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, serta kebijakan internal yang mendukung penguatan sistem informasi biro secara menyeluruh.

SASARAN KEGIATAN 8:

TERKELOLANYA KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

IKU 13: TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 13 adalah:

A. SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN TA 2025

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025, BPOM telah melewati beberapa tahapan dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Untuk itu perlu segera dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA- K/L Pagu Anggaran TA 2025 dengan peserta dari unit Pusat dan UPT BPOM, pertemuan ini adalah rangkaian pertama dalam melakukan penyusunan RKA-K/L tahun 2025 dimana seluruh Satker akan diminta melakukan penyusunan KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan untuk selanjutnya akan dilakukan penelaahan verifikasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review RKA-K/L oleh APIP.

Hal-hal yang perlu disesuaikan, disempurnakan atau perlu diklarifikasi dengan unit Pusat dan UPT BPOM terkait dalam rangka penyusunan RKA-K/L TA 2025. Untuk itu telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran yang mengundang PPK dan operator Aplikasi RKA-K/L.

Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025 bertujuan untuk menyusun RKA-K/L masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 tahun 2024 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, Melakukan finalisasi penyusunan KAK, RAB dan data dukung dan Penelaahan RKA-K/L TA 2025 oleh tim Biro Perencanaan dan Keuangan. Output dari pertemuan ini adalah himpunan data elektronik RKA-K/L dan Data Dukung Tahun Anggaran 2025 seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM.

Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025 dilaksanakan mulai 31 Juli - 1 Agustus 2024 bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta, dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan peserta terdaftar dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama.



Gambar 3. 99 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025, Jakarta 31 Juli – 1 Agustus 2024

B. SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKA-K/L ALOKASI ANGGARAN TA 2025

Pada pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025 yang lalu, telah diperoleh data dukung yang telah disesuaikan sesuai PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta hasil evaluasi penelaahan RKAKL yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu perlu segera dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025 dengan peserta dari unit Pusat dan UPT BPOM serta menyusun KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan pada saat penelaahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review RKA-K/L oleh APIP.

Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025 bertujuan untuk menindaklanjuti proses penyusunan RKA-K/L sesuai penajaman program dan kegiatan dan melakukan finalisasi penyusunan KAK, RAB dan data dukung, dan Desk RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025 oleh APIP BPOM.

Output dari pertemuan ini adalah dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran dan Data Dukung TA 2025 Satker Pusat dan Satker Balai Besar/Balai POM/Loka POM serta tersusunnya DIPA TA 2025 masing-masing unit Pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dokumen ini selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan diterbitkannya Satuan Alokasi Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan DIPA Badan POM.

Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025 dilaksanakan mulai 8 – 10 Oktober 2024 bertempat di Hotel JS Luwansa Jakarta dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan peserta terdaftar dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama.



Gambar 3. 100 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2025, Jakarta, 8 – 10 Oktober 2024

BAB 4

PENUTUP



BAB 4: PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten, berlandaskan visi Badan POM: *"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."* Dalam kerangka tersebut, seluruh kegiatan difokuskan untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh gambaran bahwa:

- ✓ 2 IKU berada dalam kategori **Sangat Baik**,
- ✓ 5 IKU masuk dalam kategori **Baik**,
- ✓ dan 6 IKU lainnya berada pada kategori **Cukup**.

Capaian tersebut menandakan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, menunjukkan pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan akuntabel. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana pendukung, Biro Perencanaan dan Keuangan tetap mampu menunjukkan kinerja optimal dengan semangat kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran pegawai.

Hasil yang dicapai bukan hanya menjadi refleksi atas upaya yang telah dilakukan, namun juga menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan penguatan berkelanjutan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem kerja, serta sinergi yang lebih erat baik secara internal di lingkungan Badan POM maupun dengan mitra eksternal, guna menjawab tantangan pengelolaan perencanaan dan keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.

Dengan semangat transformasi dan komitmen terhadap integritas, profesionalisme, serta pelayanan prima, Biro Perencanaan dan Keuangan optimis akan terus berkontribusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Semoga laporan tahunan ini menjadi wujud akuntabilitas publik dan dasar evaluasi bersama demi perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.



MMXXIV
RORENKEU

LAPORAN TAHUNAN 2024

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



☎ 021-424-1646

✉ rorenkeu@pom.go.id

🌐 <https://sites.google.com/view/rorenkeu-bpom/>